



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

JAKARTA 2019

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV maupun satuan kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggungjawaban atas terwujudnya hasil-hasil (*outcome*) pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi keuangan maupun akuntabilitas instansi .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam Tahun 2019 yang berisi gambaran serta penilaian secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Diharapkan dengan telah disusunnya laporan ini, akan bermanfaat dan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Jakarta, 4 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


R. AGUS H. FURNOMO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
I.1 Latar Belakang	I - 1
I.2 Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
I.3 Sumber Daya Manusia	I - 33
I.4 Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi	I - 34
BAB II PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2019	II - 1
II.1 Perencanaan Strategis.....	II - 1
II.2 Perjanjian Kinerja.....	II - 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2019	III - 1
III.1 Capaian Kinerja.....	III - 1
III.2 Kontribusi Terhadap Capaian IKU Sekretariat Jenderal.....	III -110
III.3 Realisasi Anggaran.....	III -111
BAB IV PENUTUP	II - 1
IV.1 Kesimpulan	II - 1
IV.2 Langkah Kedepan	II - 1

DAFTAR TABEL

I.2.1	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan	I - 24
I.2.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan	I - 25
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (awal)	II - 2
II.2.2	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terakhir).....	II - 6
III.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	II - 3
III.1.2	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah.....	II - 8
III.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 dengan Target Kinerja Tahun 2015 - 2019	III - 10
III.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 10
III.1.5	Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional	III -11
III.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2 dengan Target Kinerja Tahun 2015 – 2019	III - 13
III.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 13
III.1.8	Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	III - 14
III.1.9	Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2019	III - 16
III.1.10	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3 dengan Target Kinerja Tahun 2015 -2019	III -17
III.1.11	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 17
III.1.12	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut.....	III - 18
III.1.13	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 4 dengan Target Kinerja Tahun 2015 -2019	III - 20
III.1.14	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 4 dengan Target Renstra Tahun 2019	III -20
III.1.15	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective	

	Time (ET/BT).....	III - 22
III.1.16	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 5 dengan Target Kinerja Tahun 2015 -2019	III - 26
III.1.17	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 5 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 25
III.1.18	Data Musibah Tumpahan Minyak Dilaut Direktorat Kesatuan Penjagaar Laut dan Pantai Tahun 2019	III - 28
III.1.19	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 6 dengan Target Kinerja Tahun 2015 -2019	III - 30
III.1.20	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 6 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 30
III.1.21	Rasio Rancangan Dan Peraturan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan	III - 31
III.1.22	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 7 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 33
III.1.23	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 7 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 34
III.1.24	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan.....	III - 34
III.1.25	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 8 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 36
III.1.26	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 8 dengan Target Renstra Tahun 2018	III - 36
III.1.31	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang.....	III - 37
III.1.32	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 9 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 38
III.1.33	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 9 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 39
III.1.34	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang	III - 39
III.1.35	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 10 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 41
III.1.36	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 10 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 42
III.1.37	Persentasi Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/Lanjutan/Penyelesaian/Pembangunan Non-Komersial)	III - 42
III.1.38	Pelabuhan-pelabuhan yg Sudah Kontrak dan Terealisasi	III - 43

III.1.39	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 11 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 48
III.1.40	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 11 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 49
III.1.41	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat....	III - 49
III.1.42	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 12 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 50
III.1.43	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 12 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 51
III.1.44	Tingkat Kecukupan SBNP	III - 51
III.1.45	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 13 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 53
III.1.46	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 13 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 53
III.1.47	Tingkat Keandalan SBNP	III - 54
III.1.48	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 14 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 55
III.1.49	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 14 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 56
III.1.50	Persentase Pembangunan/Up-Grade GMDSS.....	III - 56
III.1.51	Jumlah Pembangunan dan Upgrade GMDSS.....	III - 57
III.1.52	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 15 dengan Target Kinerja 2015-2019	III - 58
III.1.53	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 15 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 58
III.1.54	Persentase Pembangunan/Up Grade VTS.....	III - 59
III.1.55	Pembangunan/Up-Grade VTS.....	III - 60
III.1.56	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 16 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 61
III.1.57	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 16 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 61
III.1.58	Persentase Pembangunan/Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patroli.....	III - 61
III.1.59	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 17 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 63
III.1.60	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 17 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 63

III.1.61	Rasio Layanan Transportasi Laut Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	III - 64
III.1.62	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 18 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 66
III.1.63	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 18 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 66
III.1.64	Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim.....	III - 67
III.1.65	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 19 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 69
III.1.66	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 19 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 70
III.1.67	Persentase prasarana yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (SBNP solar cell).....	III - 70
III.1.68	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 20 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 72
III.1.69	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 20 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 72
III.1.70	Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Keterampilan serta Dokumen Kepelautan Lainnya.....	III - 73
III.1.71	Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Keterampilan Serta Dokumen Kepelautan Lainnya yang Terealisasi Pada Tahun 2019	III - 74
III.1.72	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 21 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 75
III.1.73	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 21 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 76
III.1.74	Penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kepelautan lainnya yang terealisasi pada tahun 2019	III - 76
III.1.75	Penerbitan Sertifikat/Surat/Akta/Dokumen Kelaiklautan KapaL	III - 77
III.1.76	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 22 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 78
III.1.77	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 22 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 78

III.1.78	Rasio Penerbitan Sertifikat di Bidang Perlindungan Lingkunga Maritim..	III - 79
III.1.79	Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim.....	III - 80
III.1.80	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 23 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 81
III.1.81	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 23 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 82
III.1.82	Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai).....	III - 82
III.1.83	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 24 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III - 84
III.1.84	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 24 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 85
III.1.85	Persentase peningkatan jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat.....	III - 85
III.1.86	Perhitungan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis).....	III - 86
III.1.87	Rincian Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis).....	III - 86
III.1.88	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 25 dengan Target Kinerja 2015 – 2019	III.89
III.1.89	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 25 dengan Target Renstra Tahun 2019	II 90
III.1.90	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III - 90
III.1.91	Tabel Skala Likert	III - 91
III.1.92	Tabel Skala Likert	III - 92
III.1.93	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 26 dengan Target Kinerja 2015 - 2019	III - 93

III.1.94	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 26 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 94
III.1.95	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5).....	III - 94
III.1.96	Tabel Skala Likert	III - 95
III.1.97	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 27 dengan Target Kinerja 2015 - 2019	III - 97
III.1.98	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 27 dengan Target Renstra Tahun 2019.....	III - 98
III.1.99	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	III - 98
III.1.100	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....	III - 99
III.1.101	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 28 dengan Target Kinerja 2015 - 2019	III - 100
III.1.102	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 28 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 100
III.1.103	Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun.....	III - 100
III.1.104	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 29 dengan Target Kinerja 2015 - 2019	III - 102
III.1.105	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 29 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 102
III.1.106	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III - 103
III.1.107	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 30 dengan Target Kinerja 2015 - 2019	III -104
III.1.108	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 30 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 104
III.1.109	Nilai Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III - 105
III.1.110	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 31 dengan Target Kinerja 2015 - 2019	III - 106
III.1.111	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 31 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 107
III.1.112	Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pehubungan Laut.....	III – 107

III.1.13	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 32 dengan Target Kinerja 2015 - 2019	III - 108
III.1.14	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 32 dengan Target Renstra Tahun 2019	III - 109
III.2.1	Kontribusi Terhadap Capaian IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2019....	III - 110
III.3.1	Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2019	III - 111
III.3.2	Realisasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2019	III – 112
II.3.3	Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 113
II.3.4	Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaa Sumber Daya Tahun 2019	III - 114

DAFTAR GRAFIK

III.1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah.....	III - 8
III.1.2	Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional	III - 11
III.1.3	Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut.....	III - 15
III.1.4	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi laut	III - 18
III.1.5	Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Laut.....	III - 23
III.1.6	Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran.....	III - 27
III.1.7	Rasio Rancangan Dan Peraturan Perundangan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan.....	III - 32
III.1.8	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan.....	III - 35
III.1.9	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang.....	III - 37
III.1.10	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang	III - 40
III.1.11	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial).....	III - 43
III.1.12	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran rakyat	III - 49
III.1.13	Tingkat Kecukupan SBNP.....	III - 52
III.1.14	Tingkat Keandalan SBNP.....	III - 54
III.1.15	Persentase Pembangunan/Up-Grade GMDSS.....	III - 57
III.1.16	Persentase Pembangunan dan <i>Upgrade VTS</i>	III - 59
III.1.17	Persentase Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian Kapal Patroli.....	III - 62
III.1.18	Rasio Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil.....	III - 64
III.1.19	Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim.....	III - 68
III.1.20	Persentase Prasarana Yang Telah Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan (SBNP Solar Cell.....	III - 71
III.1.21	Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian Dan Keterampilan Serta Dokumen	

	Kepelautan Lainnya.....	III - 73
III.1.22	Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian Dan Keterampilan Serta Dokumen Kepelautan Lainnya.....	III - 77
III.1.23	Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim.....	III - 80
III.1.24	Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	III - 83
III.1.25	Persentase Peningkatan JUmlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	III - 88
III.1.26	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III - 91
III.1.27	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5)	III - 95
III.1.28	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....	III - 98
III.1.29	Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun.....	III - 101
III.1.30	Prosentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan laut.....	III - 103
III.1.31	Nilai Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III - 105
III.1.32	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III - 108



BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2019 secara berkala. Laporan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasarnya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan strategik organisasi telah diformalkan di dalam suatu Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam Rencana Strategis ditetapkan sejumlah Sasaran Strategis. Pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategik organisasi di akhir tahun kelima.



Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



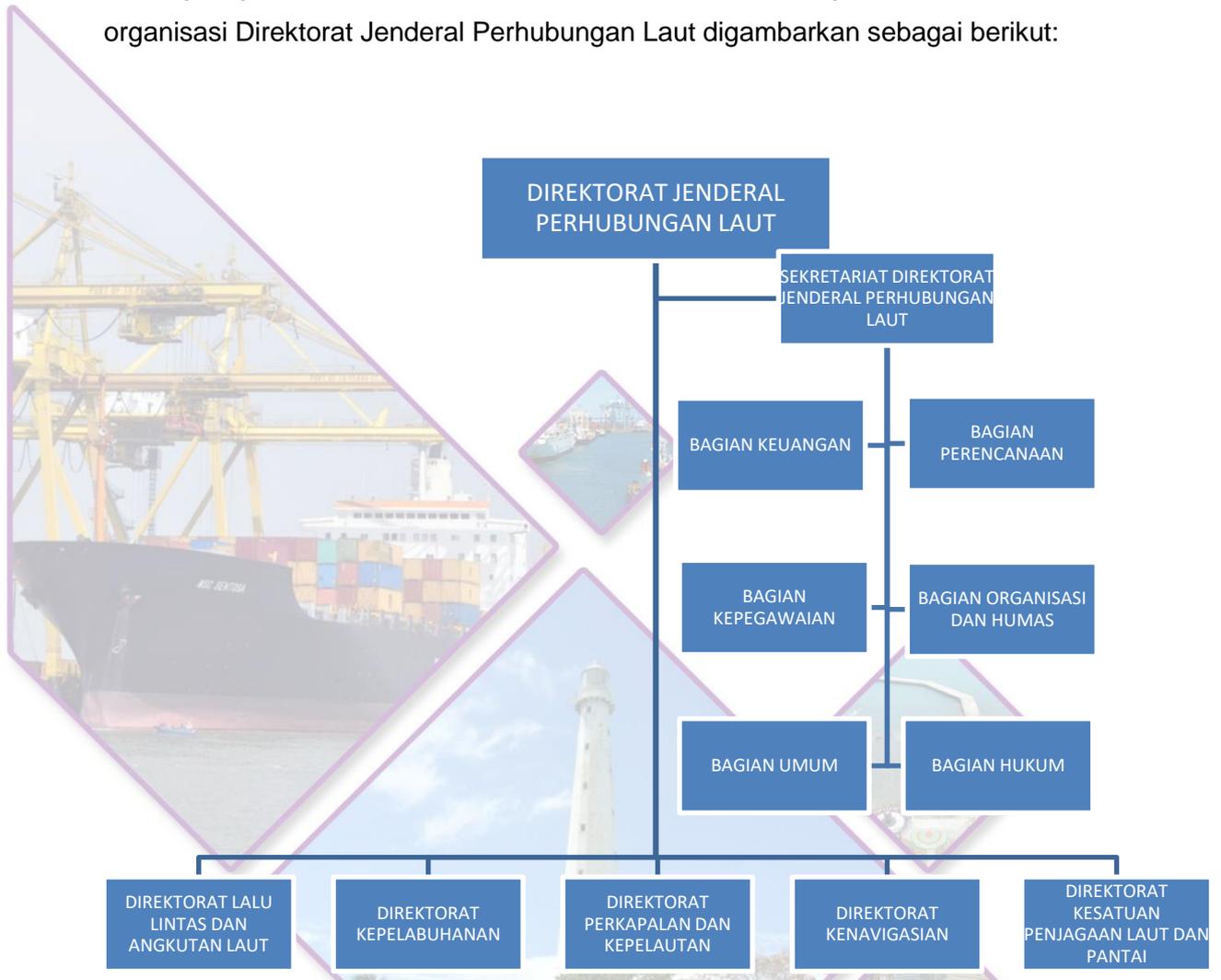
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DITJEN HUBLA

1.2.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



1.2.2. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut; kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

c. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- 3) Direktorat Kepelabuhan;
- 4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;



- 5) Direktorat Kenavigasian; dan
- 6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- 2) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- 3) Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- 4) Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- 6) Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Perencanaan

- a. Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Keuangan

- a. Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan reuvi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruak dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruak dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reuvi laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, - 134 - penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reuvi laporan keuangan.



c. **Bagian Kepegawaian**

1) **Tugas Bagian Kepegawaian**

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) **Fungsi Bagian Kepegawaian**

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

d. **Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri**

1) **Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) **Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri**

- a. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan



- c. Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

e. Bagian Umum dan Perlengkapan

1) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

1) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan



masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a) Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

b) Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana



prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha - 143 - angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Kepelabuhanan

a) Tugas Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

b) Fungsi Direktorat Kepelabuhanan



- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.



4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a) Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan.

b) Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang - 180 - tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan



kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;

- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan - 181 - perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Kenavigasian

a) Tugas Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

b) Fungsi Direktorat Kenavigasian

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak



digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;

- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a) Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana

b) Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib - 219 - pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;



- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

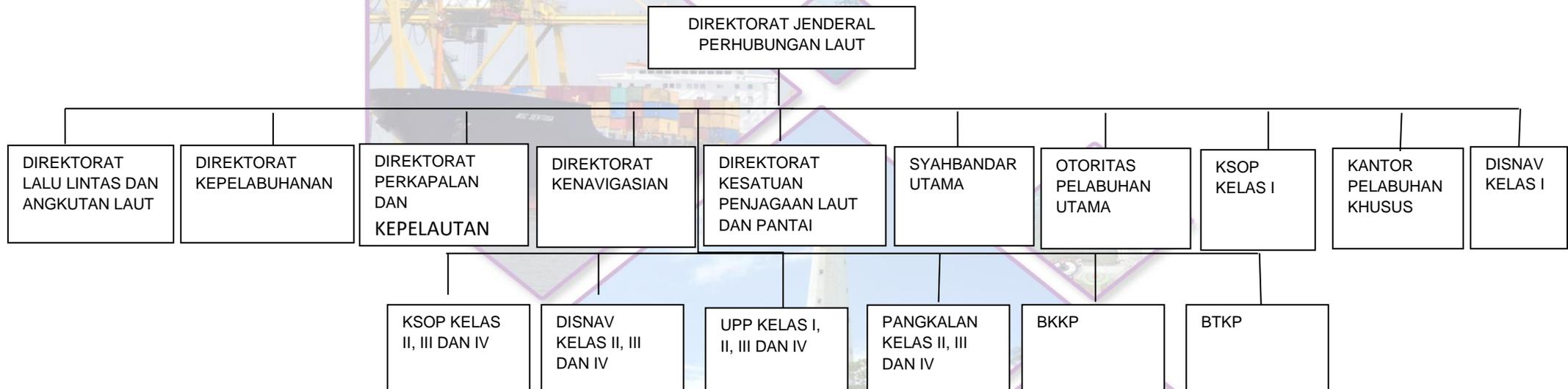




1.2.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.



Gambar 1.2.3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

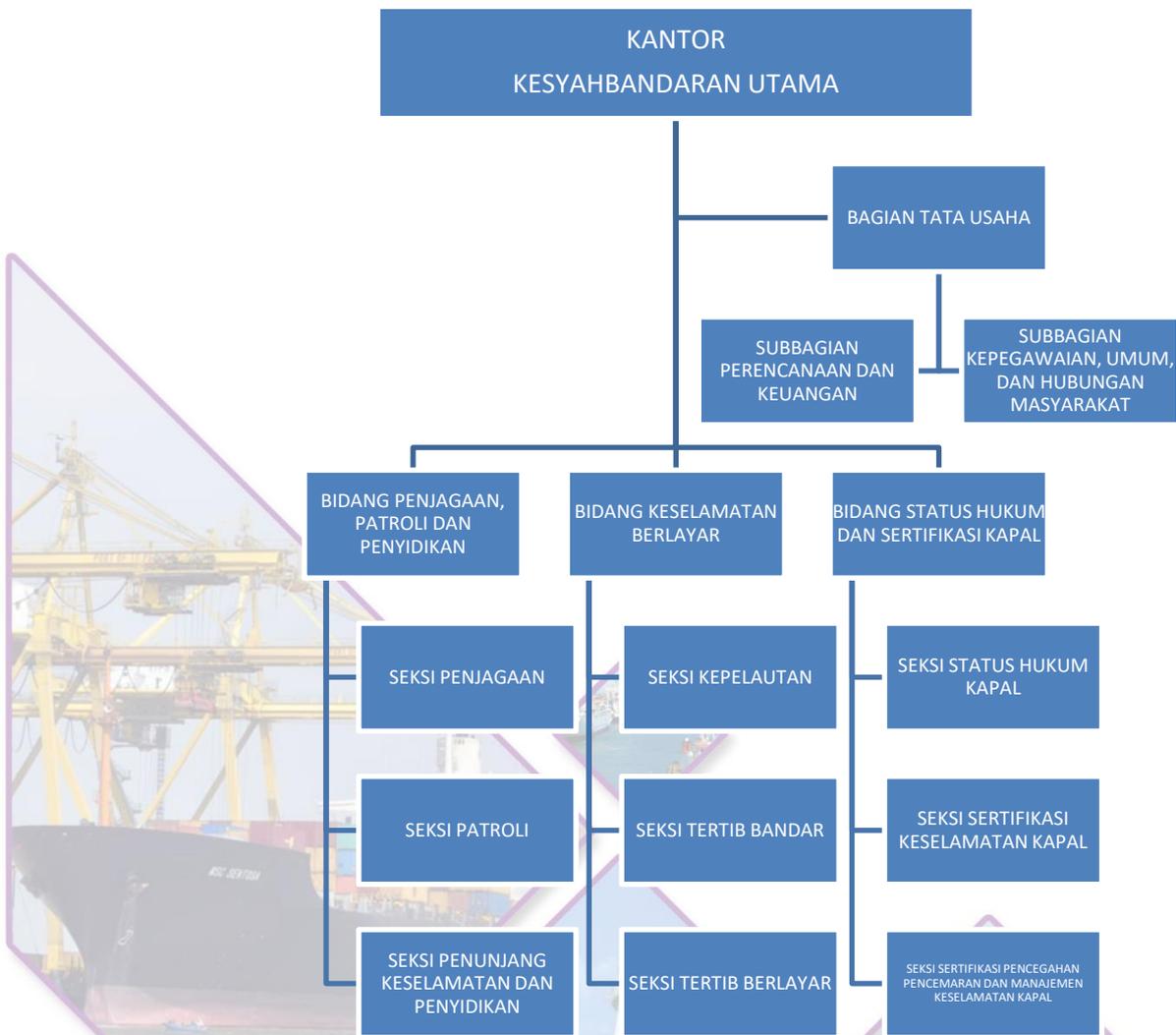


d. Tugas dan Fungsi kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla

1) Kantor Kesyahbandaran Utama

Berdasarkan PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta peneritan Surat Persetujuan Berlayar;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
- d) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan disembarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- e) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/ SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime;
- f) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar 1.2.3.2 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama

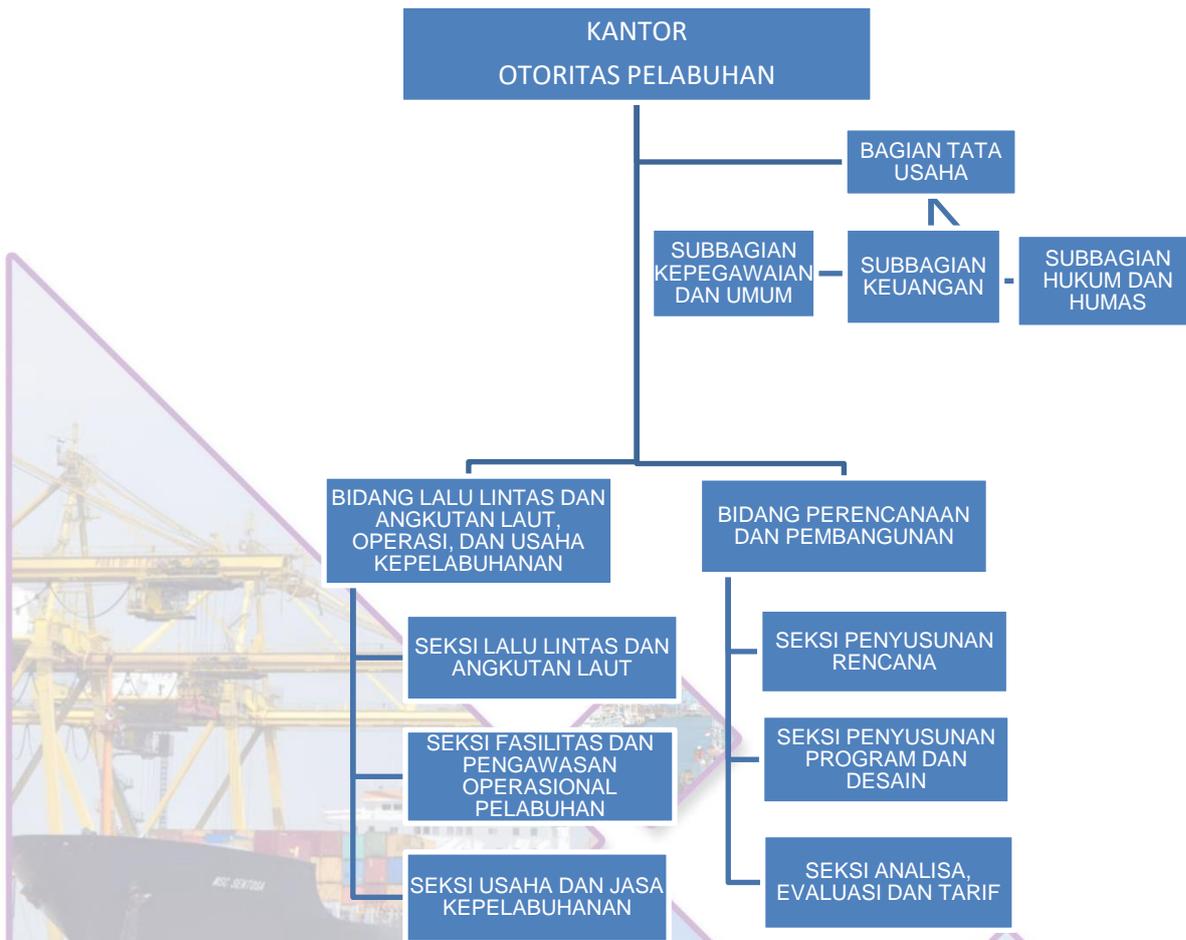
2) Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan;



- b) Penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- c) Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- e) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- f) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;;
- g) Pelaksanaan peran sebagai wakil Pemerintah dalam pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan;
- h) Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hUbugan masyarakat.



Gambar 1.2.3.3 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan

3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- b) Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- c) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi

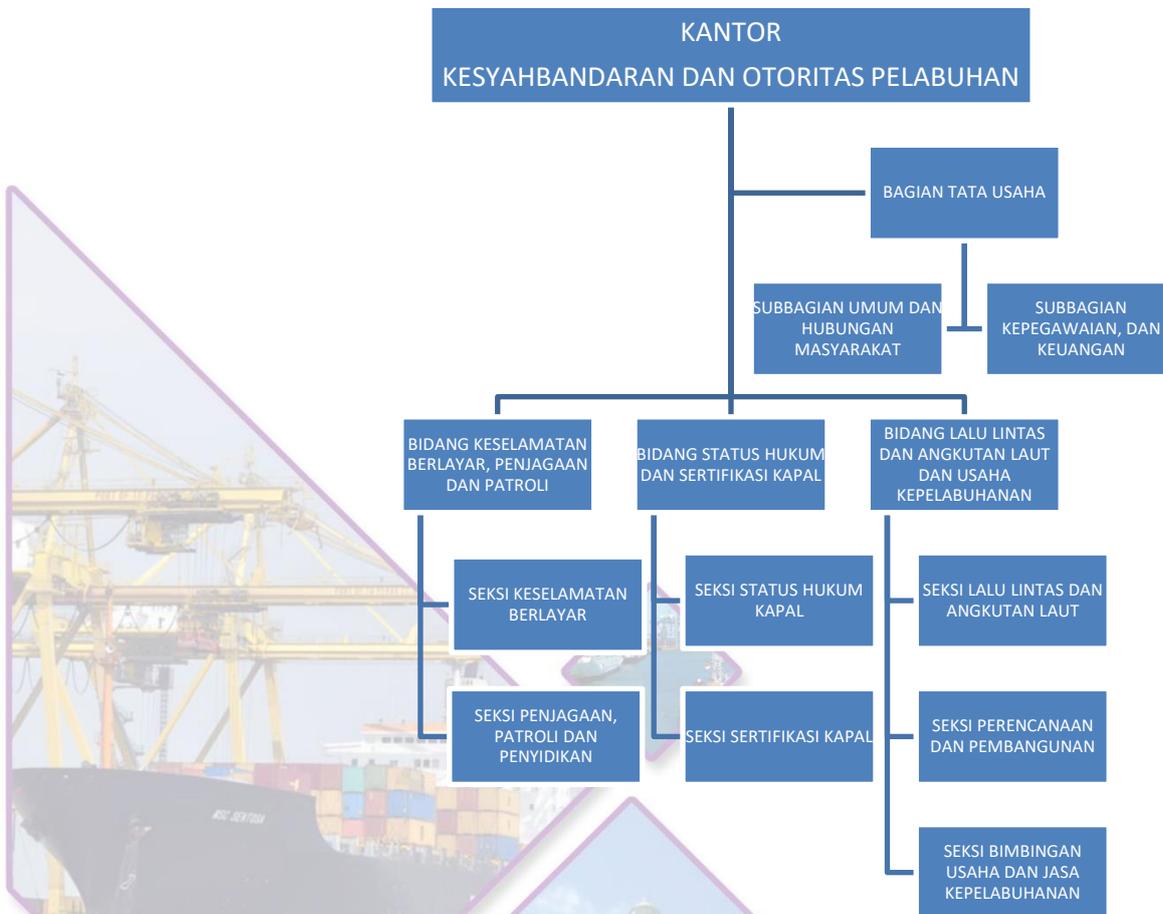


penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- d) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;
- g) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- k) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hokum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, yaitu:

- a) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- c) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- d) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV



Gambar 1.2.3.4 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

4) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;



- c) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, ke karantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*);
- g) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h) Pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
- j) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- l) Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Gambar 1.2.3.5 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

5) **Unit Penyelenggara Pelabuhan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp);
- b) Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- c) Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- d) Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
- e) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- f) Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;



- g) Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h) Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i) Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- j) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hokum dan hubungan masyarakat.

Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
- c) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III



Gambar 1.2.3.6 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)

6) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai, melalui pelaksanaan fungsi berikut:

- a) Penyusunan rencana, program dan evaluasi;
- b) Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/ eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air;



- e) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran;
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;
- g) Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;
- h) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistic;
- i) Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelas, yaitu:

- a) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
- b) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II

7) Distrik Navigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan;
- b) Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- c) Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, dan fasilitas pangkalan serta bengkel;



- d) Pelaksanaan pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- e) Pelaksanaan urusan logistic;
- f) Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- g) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Distrik Navigasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Distrik Navigasi Kelas I
- b) Distrik Navigasi Kelas II
- c) Distrik Navigasi Kelas III



Gambar 1.2.3.7 Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi



8) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran serta Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- b) Melaksanakan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- c) Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- d) Melaksanakan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran, penentuan kedalaman;
- e) Melaksanakan pemberitaan keselamatan pelayaran;
- f) Menetapkan rencana program kerja serta evaluasi;
- g) Melaksanakan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtangaan;
- h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- i) Memelihara dan merawat sarana dan prasarana;
- j) Mengoperasikan sarana, prasarana dan instalasi.



Gambar 1.2.3.8 Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



9) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran serta penilaian dan penilikan terhadap lingkungan kerja pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi;
- b) Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan tenaga fungsional pelayaran;
- c) Pelaksanaan penilaian dan penilikan penerapan keselamatan kerja, gizi kerja, ergonomic, hygiene dan sanitasi;
- d) Pelaksanaan penilaian lingkungan kerja pelayaran;
- e) Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan dan lingkungan kerja pelayaran;
- f) Penyiapan penyusunan standar kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- g) Pemberian sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- h) Penilaian rumah sakit untuk pengujian dan penilaian kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran;
- i) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.





Gambar 1.2.3.9 Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2019 yaitu 14.096 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.2.1 Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2018	2019
1.	S3	3	3
2.	Spesialis	0	0
3.	S2	867	963
4.	S1	3.491	3.659
5.	D4	190	190
6.	D3	1.371	1.327
7.	D2	28	21
8.	D1	77	74
9.	SLTA	7.809	7.541
10.	SLTP	419	282
11.	SD	102	36
TOTAL		14.357	14.096

2) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.2.2 Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2018	2019
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	3	4
3.	IV/c	20	24
4.	IV/b	77	65



No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2018	2019
5.	IV/a	289	296
6.	III/d	1.195	1.276
7.	III/c	1.690	1.720
8.	III/b	3.392	3.314
9.	III/a	2.357	2.625
10.	II/d	1.967	1.397
11.	II/c	1.588	2.232
12.	II/b	1.467	714
13.	II/a	293	407
14.	I/d	10	15
15.	I/c	6	3
16.	I/b	2	3
17.	I/a	1	1
TOTAL		14.357	14.096

1.4. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis nasional pada tahun 2019 adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keselamatan pelayaran dan percepatan pembangunan infrastruktur di sub sektor Transportasi Laut. Pada tahun 2019 terdapat beberapa program yang disusun sebagai upaya dalam menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:

- a. Pelaksanaan Program Tol Laut;
- b. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bidang Kepelabuhanan;
- c. Pembangunan Pelabuhan Patimban;
- d. Penerapan Sistem *Inaportnet* secara bertahap pada 16 pelabuhan komersil yaitu Belawan, Pontianak, Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Banten, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Gresik, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Bitung, Ambon, dan Sorong;
- e. Penurunan *Dwelling Time* (Waktu yang ditempuh oleh *container*/barang) untuk melalui proses kepelabuhanan, mulai dari proses *discharge*/bongkar sampai dengan keluar terminal pelabuhan (Lini I) di Pelabuhan;
- f. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
- g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu Nabire;
- h. *Multiyers Kontrak* (MYC).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019

II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 15 (Lima belas) Sasaran Strategis dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Utama yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2015 – 2019) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla tahun 2015 – 2019.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2015 – 2019. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 (yang sudah ditandatangani antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 disusun setelah DIPA Tahun 2019 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel II.2.1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (awal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Stakeholders Perspectives					
SS.1	Terwujudnya pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional	IKU.1	Rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah	Nilai	1
		IKU.2	Pangsa muatan angkutan laut barang luar negeri oleh pelayaran nasional	%	5
Costumer Perspectives					
SS.2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	IKU.3	Rasio kejadian kecelakaan pada transportasi laut	kecelakaan/ 10.000 <i>freight</i> (pelayaran)	1,11
		IKU.4	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut	Kejadian/ 100.000 <i>freight</i> (pelayaran)	0,5
SS.3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKU.5	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	80,00



SS.4	Terlaksananya upaya perlindungan lingkungan maritim	IKU.6	Persentase penanggulangan tumpahan minyak yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari kegiatan pelayaran	%	100
Internal Business Process Perspective					
SS.5	Terlaksananya perumusan kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan transportasi laut	IKU.7	Terlaksananya pembinaan teknis transportasi laut	Rasio	1
SS.6	Terlaksananya pembinaan teknis transportasi laut	IKU.8	Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan	%	100
SS.7	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKU.9	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut penumpang	%	25,18
		IKU.10	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut barang	%	12,56
		IKU.11	Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut (pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian/ pengembangan pelabuhan non-komersial)	%	90
		IKU.12	Persentase pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat	%	61,61



SS.8	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKU.13	Tingkat kecukupan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	83,28
		IKU.14	Tingkat kehandalan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	97,00
		IKU.15	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> GMDSS (<i>Global Maritime Distess Safety System</i>)	%	94,05
		IKU.16	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> VTS (Vessel Traffic Service)	%	95,83
		IKU.17	Persentase pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian kapal patrol	%	81
SS.9	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	IKU.18	Rasio layanan transportasi laut pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil (jumlah trayek angkutan perintis)	Rasio	1
SS.10	Terlaksananya kegiatan perlindungan maritim	IKU.19	Rasio pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan lingkungan maritim	Rasio	1
		IKU.20	Persentase prasarana yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (SBNP <i>solar cell</i>)	%	89,63
SS.11	Meningkatnya efektivitas kinerja pengendalian di bidang pelayaran	IKU.21	Rasio penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kepelautan lainnya	Rasio	1
		IKU.22	Rasio penerbitan sertifikat / surat/ akta/ dokumen kelaiklautan kapal	Rasio	1



		IKU.23	Rasio penerbitan sertifikat di bidang perlindungan lingkungan maritime	Rasio	1
		IKU.24	Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	Rasio	1
Learn and Growth Perspective					
SS.12	Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan professional	IKU.25	Persentase peningkatan jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
SS.13	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.27	Persepsi <i>user</i> terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert</i> 1-5).	Nilai	4



SS.14	Terwujudnya good governance and clean government di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.28	Tingkat kualitas akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP	87,00
		IKU.29	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.15	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang optimal	IKU.30	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.31	Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	56.418.617.607.856
		IKU.32	Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	3.716.688.810.520

Terdapat perubahan penetapan kinerja / reviu PK yang disebabkan adanya perubahan pada dokumen anggaran, sehingga target-target yang ditetapkan pada tiap indikator di penetapan kinerja tahun 2018 turut berubah, adapun total anggaran awal semula Rp. 11.600.486.955.000,00 kemudian berubah menjadi Rp. 14.417.626.963.000, 00.

Berikut merupakan matriks Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Tabel II.2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Terakhir)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Stakeholders Perspectives					
SS.1	Terwujudnya pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional	IKU.1	Rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah	Nilai	1
		IKU.2	Pangsa muatan angkutan laut barang luar negeri oleh pelayaran nasional	%	5
Costumer Perspectives					



SS.2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	IKU.3	Rasio kejadian kecelakaan pada transportasi laut	kecelakaan/ 10.000 <i>freight</i> (pelayaran)	1,11
		IKU.4	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut	Kejadian/ 100.000 <i>freight</i> (pelayaran)	0,5
SS.3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKU.5	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	80,00
SS.4	Terlaksananya upaya perlindungan lingkungan maritim	IKU.6	Persentase penanggulangan tumpahan minyak yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari kegiatan pelayaran	%	100
Internal Business Process Perspective					
SS.5	Terlaksananya perumusan kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan transportasi laut	IKU.7	Terlaksananya pembinaan teknis transportasi laut	Rasio	1
SS.6	Terlaksananya pembinaan teknis transportasi laut	IKU.8	Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan	%	100
SS.7	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKU.9	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut penumpang	%	25,18
		IKU.10	Persentase peningkatan kapasitas sarana	%	12,56



			transportasi laut barang		
		IKU.11	Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut (pembangunan/lanjutan/penyelesaian/pengembangan pelabuhan non-komersial)	%	90
		IKU.12	Persentase pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat	%	61,61
SS.8	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKU.13	Tingkat kecukupan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	83,11
		IKU.14	Tingkat kehandalan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	97,00
		IKU.15	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> GMDSS (<i>Global Maritime Distess Safety System</i>)	%	94,05
		IKU.16	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> VTS (<i>Vessel Traffic Service</i>)	%	95,83
		IKU.17	Persentase pembangunan/lanjutan/ penyelesaian kapal patrol	%	81
SS.9	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	IKU.18	Rasio layanan transportasi laut pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil (jumlah trayek angkutan perintis)	Rasio	1



SS.10	Terlaksananya kegiatan perlindungan maritim	IKU.19	Rasio pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan lingkungan maritim	Rasio	1
		IKU.20	Persentase prasarana yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (SBNP <i>solar cell</i>)	%	89,60
SS.11	Meningkatnya efektivitas kinerja pengendalian di bidang pelayaran	IKU.21	Rasio penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kepelautan lainnya	Rasio	1
		IKU.22	Rasio penerbitan sertifikat / surat/ akta/ dokumen kelaiklautan kapal	Rasio	1
		IKU.23	Rasio penerbitan sertifikat di bidang perlindungan lingkungan maritim	Rasio	1
		IKU.24	Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	Rasio	1
Learn and Growth Perspective					
SS.12	Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan professional	IKU.25	Persentase peningkatan jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90



SS.13	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.27	Persepsi <i>user</i> terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert 1-5</i>).	Nilai	4
SS.14	Terwujudnya good governance and clean government di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.28	Tingkat kualitas akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP	87,00
		IKU.29	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.15	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang optimal	IKU.30	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90.50
		IKU.31	Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	54.137.268.800.155
		IKU.32	Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	3.716.688.810.520



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang



telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 dalam Nomor KP. 873 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019. Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 – 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Revisi PK Tahun 2019 dan Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019)

Tabel III.1.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
							TWI	TW II	TW III	TWIV	TOTAL	
SS.1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Laut Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan	IKU. 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah	Nilai	1	Dit. LALA	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	88
		IKU. 2	Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri Oleh Pelayaran Nasional	%	5	Dit. LALA	1,06	3,74	4,09	4,98	4,98	99,60
SS.2	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran	IKU. 3	Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	Kecelakaan/ 10.000 Freight (Pelayaran)	1,11	Dit. KPLP	0,84	1,21	1,24	0,87	0,87	122
		IKU. 4	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kejadian/100.000 Freight (Pelayaran)	0,5	Dit. KPLP	0	0	0	0	0	200
SS.3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKU. 5	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	80	Dit. KEPELABUHANAN	88,67	94	94	95	95	119
SS.4	Terlaksananya Upaya Perlindungan Lingkungan <i>Maritime</i>	IKU. 6	Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Dari Kegiatan Pelayaran	%	100	Dit. KPLP	100	100	100	100	100	100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL		
SS.5	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Dan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Transportasi	IKU. 7	Rasio Rancangan Dan Peraturan Perundangan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan	Rasio	1	Bag. HUKUM	0,1	0,2	0,4	0,9	0,9	90
SS.6	Terlaksananya Pembinaan Teknis Transportasi Laut	IKU. 8	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan	%	100	Para Direktorat Dan Bagian	10	23	55	100	100	100
SS.7	Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi	IKU. 9	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang	%	25,18	Dit. LALA	7,15	16,14	21,01	25,18	25,18	100
		IKU. 10	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang	%	12,56	Dit. LALA	2,98	4,58	10,41	12,56	12,56	100
		IKU. 11	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Non - Komersial)	%	90	Dit. KEPSELABUHANAN	1,97	3,94	82,23	86,58	86,58	96,20
		IKU. 12	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat	%	61,61	Dit. LALA	61,61	61,61	61,61	61,61	61,61	100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL		
SS.8	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKU. 13	Tingkat kecukupan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	83,11	Dit. KENAVIGASIAN	81,93	82,13	82,39	82,99	82,99	99,86
		IKU. 14	Tingkat kehandalan SBNP (Sarana Bantu Navigasian Pelayaran)	%	97	Dit. KENAVIGASIAN	97,80	97,80	97,03	97,00	97,00	100
		IKU. 15	Persentase Pembangunan/ upgrade GMDSS (Global Maritime Distess Safety System)	%	94,05	Dit. KENAVIGASIAN	94,05	94,05	94,05	94,05	94,05	100
		IKU. 16	Persentase Pembangunan/ upgrade VTS (Vessel Traffic Service)	%	95,83	Dit. KENAVIGASIAN	91,76	91,76	91,76	95,83	95,83	100
		IKU. 17	Persentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patrol	%	81	Dit. KPLP	65	65	65	76	76	93,83
SS.9	Meningkatnya Layanan Transportasi Di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	IKU. 18	Rasio Layanan Transportasi Laut Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil (Jumlah Trayek Angkutan Perintis)	Rasio	1	Dit. LALA	1	1	1	1	1	100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
							TWI	TWII	TWIII	TWIV	TOTAL	
1	2	3		4	5							
SS.10	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan <i>Maritime</i>	IKU. 19	Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan <i>Maritime</i>	Rasio	1	Dit. KAPPEL	1	1	1	1	1	100
		IKU. 20	Persentase Prasarana Yang Telah Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan (SBNP <i>solar cell</i>)	%	89,60	Dit. KENAVIGASIAN	89,30	89,31	89,44	89,59	89,59	99,99
SS.11	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengendalian Di Bidang Pelayaran	IKU. 21	Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian Dan Keterampilan Serta Dokumen Kepelautan Lainnya	Rasio	1	Dit. KAPPEL	1	1	1	1	1	100
		IKU. 22	Rasio Penerbitan Sertifikat / Surat/ Akta/ Dokumen Kelaiklautan Kapal	Rasio	1	Dit. KAPPEL	1	1	1	0,996	0,996	99,6
		IKU. 23	Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan <i>Maritime</i>	Rasio	1	Dit. KAPPEL	1	1	1	0,997	0,997	99,7
		IKU. 24	Rasio Penerbitan Perizinan/ Rekomendasi Di Bidang Pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	Rasio	1	PARA DIREKTORAT	1	1	1	1	1	1



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS.12	Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Kompeten Dan Profesional	IKU.25	Persentase Peningkatan Jumlah SDM Aparatur Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	%	90	BAG. KEPEGAWAIAN	83,53	88,24	95,07	96,40	96,40	107,11
SS.13	Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal Dan Mudah Diakses Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	BAG. ORGANISASI DAN HUMAS	100	100	100	100	100	100
		IKU.27	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5).	Nilai	4	BAG. ORGANISASI DAN HUMAS	0	0	0	4	4	100
SS.14	Terwujudnya Good Governance And Clean Government di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.28	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP	87	BAG. PERENCANAAN	0	0	0	0	0	0,00
		IKU.29	Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun	Dokumen	5	BAG. PERENCANAAN	5	5	5	5	5	100
SS.15	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Optimal	IKU.30	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90	Bag. KEUANGAN	7,06	24,98	47,80	89,58	93,03	103
		IKU.31	Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	59.137.268.800.155	Bag. KEUANGAN	55.074.532.350.671	54.429.468.029.601	54.778.274.170.426	55.751.465.389.549	55.751.465.389.549	94,27
		IKU.32	Target PNBPN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	3.716.688.810.520	Bag. KEUANGAN	1.023.379.627.405	1.939.460.283.253	2.883.664.180.512	3.928.866.648.168	3.928.866.648.168	106



SASARAN STRATEGIS (1)

Sasaran strategis **Terwujudnya Pelayanan Transportasi Laut Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

1) Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah.

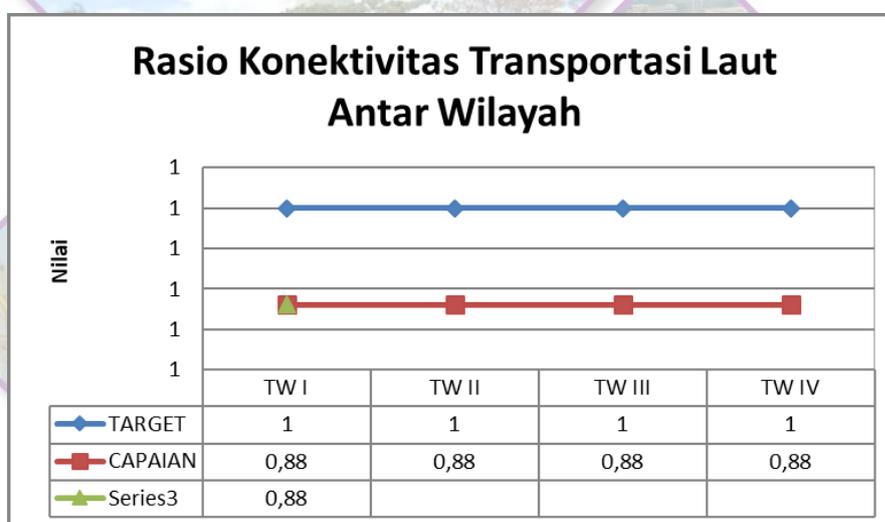
Tabel III.1.2
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah	Nilai	1	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	88

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 1 (Satu) Nilai. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 0,88 Nilai, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 88% dan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.1.1
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah





Rasio konektivitas Antar Wilayah Transportasi Laut diukur melalui jumlah pelabuhan laut yang disinggahi oleh trayek liner untuk memastikan adanya layanan transportasi ke wilayah *hinterland* pelabuhan tersebut. Trayek liner merupakan Pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, trayek tersebut antara lain sebagai berikut : trayek Angkutan Barang di Laut (Tol), Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, angkutan laut perintis, dan angkutan ternak, atau dengan rumus:

$$\text{Rasio konektivitas antar wilayah} = \frac{\sum \text{Pelabuhan yang dilayani angkutan laut (Pemerintah)}}{\sum \text{Total Pelabuhan Laut yang beroperasi}}$$

$$\text{Rasio konektivitas antar wilayah Transportasi Laut} = \frac{560 \text{ Pelabuhan}}{636 \text{ Pelabuhan}} = 0,88$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terdapat sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) lokasi pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut (Lampiran A1), dan yang sudah disinggahi secara keseluruhan oleh angkutan laut sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) pelabuhan. Evaluasi angkutan laut tahun 2019 berdasarkan Sistem Informasi Angkutan Laut (SIMLALA) menyimpulkan bahwa kapal angkutan laut telah melayani 560 pelabuhan tersebut, dengan target pelayanan 636 pelabuhan dengan nilai kinerja sebesar 88% sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan karena :

1. Masih ada yg proses penyelesaian pembangunan pelabuhan dengan status KDP;
2. Ada beberapa pelabuhan lokal yg digunakan oleh pelayaran rakyat;
3. Ada beberapa pelabuhan yang ditinggalkan oleh pelayaran nasional karena tidak ada muatan yg signifikan, kondisi alur pelayaran, SBNP dan fasilitas pelabuhan yang tidak aman lagi untuk pelayaran. Untuk itu, perlu evaluasi lebih lanjut guna menentukan kriteria operasional pelabuhan.

IKU no 1 : Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah

Realisasi Kinerja Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 nilai sehingga persentasenya sebesar 100%, sedangkan realisasi Tahun 2019 sebesar 0,88 Nilai dari target yang telah di tetapkan yaitu 1 (satu) Nilai sehingga persentasenya sebesar 88% belum sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Capaian Kinerja tidak bisa dibandingkan dengan Capaian Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 karena belum ada IKU.



Tabel III.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 3	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018 -2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah	-	NILAI	Target				1	1
			Realisasi				1	0,88
			Kinerja (%)				100	88

Rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menggunakan IKU baru sesuai dengan Reviu PK. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

IKU no 1 : Rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah

Realisasi Tahun 2019 belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu 0.88 nilai dengan Realisasi Kinerja sebesar 88%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 Dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 1	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2019	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar wilayah	-	NILAI	1	0.88	88



2) Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional.

Tabel III.1.5

Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional

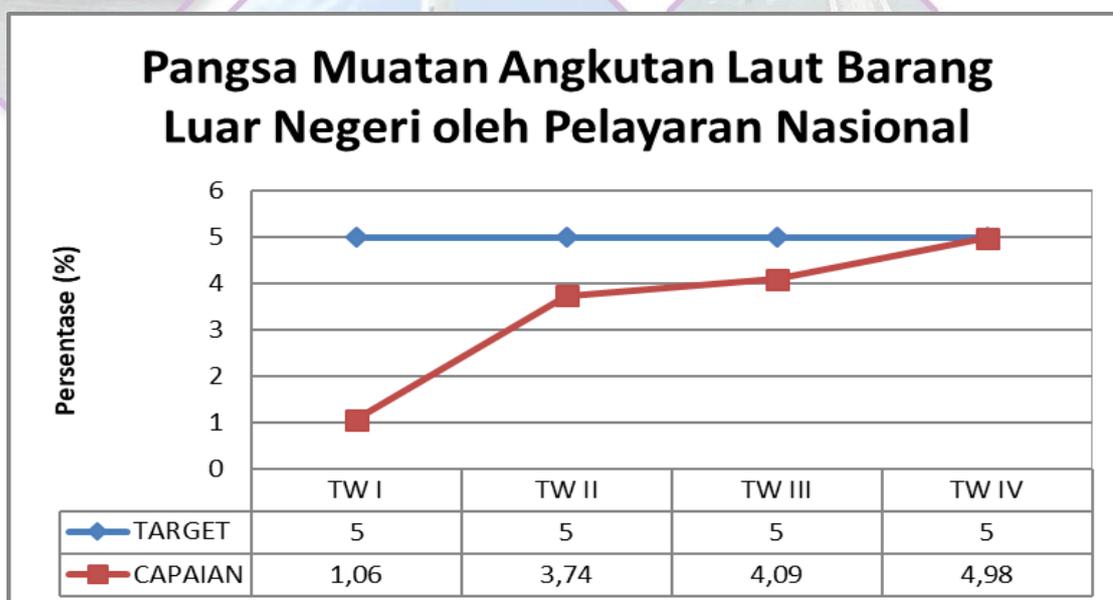
INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.2	Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional	%	5	1.06	3.74	4.09	4.98	4.98	99.60

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 5%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 1.06%, pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 3.74%, sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 4.09 % dan pada Triwulan IV mencapai 4,98%. Dengan demikian Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional mencapai 4.98% dan capaian kinerja terhadap target sebesar 99.60%.

Grafik III.1.2

Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional



Pangsa muatan angkutan laut barang luar negeri oleh pelayaran nasional diukur melalui jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut kapal bendera Indonesia terhadap jumlah total muatan angkutan laut luar negeri, atau dengan rumus :



$$\frac{\text{Jumlah muatan luar negeri yang diangkut kapal Indonesia}}{\text{Jumlah total muatan angkutan laut luar negeri}} \times 100\%$$

$$Pangsa = \frac{36.803.336,1}{739.670.738} \times 100\% = 4,98 \%$$

Realisasi Angkutan Laut Luar Negeri Oleh Kapal Indonesia Tahun 2019

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
7.857.348,10	27.682.148,10	30.272.148,1	36.803.336,1

Jumlah muatan angkutan laut barang luar negeri yang diangkut kapal bendera Indonesia sampai dengan triwulan IV mencapai 36.803.336,1 ton adapun capaian terhadap target sebesar 4,98% Pangsa muatan kapal berbendera Indonesia terhadap angkutan laut luar negeri didominasi pada angkutan lintas batas Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia dan komodite berupa barang umum.

IKU No. 2: Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 11,12% dengan Realisasi kinerja sebesar 11,02% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 99,09%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 11,23% dengan realisasi kinerja sebesar 12,40% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 110,42%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 10,87% dengan realisasi kinerja sebesar 9,10% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 83,72%. Pada tahun 2018 dari target kinerja sebesar 11,45% dengan realisasi kinerja sebesar 4,98% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 43,49%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target kinerja sebesar 5% turun dari target tahun sebelumnya karena mengacu dari capaian Tahun 2018 yang hanya sebesar 4,98% dan karena penundaan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kewajiban Penggunaan Kapal Indonesia untuk Ekspor Impor CPO dan Batu Bara sehingga dalam menentukan target tahun 2019 tidak bisa terlalu tinggi sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 99,60%. Pangsa muatan kapal berbendera Indonesia terhadap angkutan laut luar negeri didominasi pada angkutan lintas batas Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia dan komodite berupa barang umum.



Tabel III.1.6

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2 dengan Target Kinerja 2015-2019

IKU 2	SATUAN - 2019	KRITERIA	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional	PERSEN (%)	Target	11,12	11,23	10,87	11,45	5
		Realisasi	11,02	12,40	9,10	4,98	4,98
		Kinerja (%)	99,09	110,42	83,72	43,49	99,60

IKU no 2 : Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional

Realisasi Tahun 2019 sebesar 4.98 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 4,98 sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 43,08%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.7

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2 Dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 2	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri Oleh Pelayaran Nasional	%	11,56	4,98	43,08

SASARAN STRATEGIS (2)

Sasaran strategis **Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:



3) Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut.

Tabel III.1.8

Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.3	Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	Kecelakaan/10.000 <i>freight</i> (pelayaran)	1.11	0.84	1.21	1.24	0.87	0.87	122%

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Ratio Kejadian Kecelakaan Laut} = \left(\frac{\sum \text{kejadian kecelakaan}}{\sum \text{SPB yang diterbitkan}} \right) \times 10.000 \text{ SPB}$$

$$\text{Ratio Kejadian Kecelakaan Laut} = \left(\frac{93}{1.072.000} \right) \times 10.000 \text{ SPB} = 0.87$$

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 1,11 rasio Kejadian Kecelakaan/10.000. Terlihat pada Triwulan I setiap 10.000 SPB terdapat rasio kejadian kecelakaan sebesar 0.84 rasio kejadian kecelakaan, Pada Triwulan II terdapat rasio kejadian kecelakaan sebesar 1.21, pada Triwulan III terdapat rasio kejadian kecelakaan sebesar 1.24 pada Triwulan IV terdapat rasio kejadian kecelakaan sebesar 0,87 sehingga prosentase pencapaian sebesar 122%.

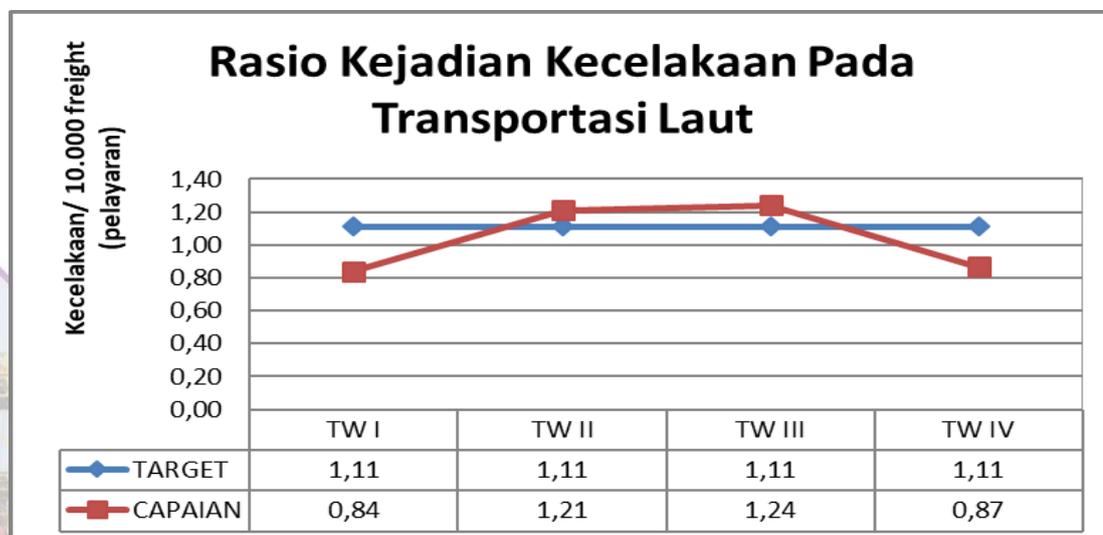
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(1,11 - (0,87 - 1,11))}{1,11} \times 100\%$$



Grafik III.1.3

Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut



Pada tahun 2019 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan sampai Triwulan I sebanyak 289.000 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu) dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 23 (dua puluh tiga) kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0.84 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 132%. Pada Triwulan II sebanyak 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu) SPB dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 52 (lima puluh dua) kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,21 Kecelakaan/10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 91.74%, sedangkan pada Triwulan III sebanyak 623.000 SPB dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,24 Kecelakaan/10.000 *freight* (pelayaran) sampai dengan Triwulan IV jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 93 (sembilan puluh tiga) kejadian yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak sebanyak 1.072.000 SPB dengan jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,87 kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentasenya sebesar 122%. Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca *extrim* secara berkala;



2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
3. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
4. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
7. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
8. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.

Tabel III.1.9
Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2019

NO	BULAN	FAKTOR PENYEBAB			TRIWULANAN	JUMLAH SPB 2019	
		Ala m	Manusi a	Teknis		BULANAN	TRIWULANAN
1	Januari	9	2	0	23	86.000	289.000
2	Februari	2	1	2		104.000	
3	Maret	1	2	4		99.000	
4	April	5	1	4	29	74.000	142.000
5	Mei	3	0	1		41.000	
6	Juni	6	3	6		27.000	
7	Juli	8	0	2	25	47.000	192.000
8	Agustus	5	2	2		69.000	
9	September	3	1	2		76.000	
10	Oktober	1	1	3	16	151.000	449.000
11	November	-	-	7		229.000	
12	Desember	-	1	3		69.000	
	TOTAL	43	14	36	93	1.072.000	1.072.000

IKU No. 3: Rasio kejadian kecelakaan pada transportasi laut

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 0,972 dengan Realisasi kinerja sebesar 1,382 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 57,87%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 0,875 dengan realisasi kinerja sebesar 0,814 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 106,97%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 0,802 dengan realisasi kinerja sebesar 0,4843 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 139,61%. Pada tahun 2018 dari target 1,41 dapat tercapai sebesar 1,066 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 124,40%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 1,11 dapat tercapai sebesar 0,877 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 122%.



Tabel III.1.10

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3 dengan Target Kinerja Tahun 2015 – 2019

IKU 3	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018 -2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	Rasio	Kecelakaan/ 10.000 Freight (Pelayaran)	Target	0,972	0,875	0,802	1,41	1,11
	Kejadian		Realisasi	1,382	0,814	0,4843	1,066	0,87
	Kecelakaan (Jumlah Jadian Kecelakaan/ 10.000 Freight)		Kinerja (%)	57,87	106,97	139,61	124,40	122

IKU no 3 : Rasio Kejadian Kecelakaan pada Transportasi Laut

Realisasi Tahun 2019 sebesar 1,276 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 0,877, sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 145%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.11

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3 Dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 3	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio kejadian kecelakaan pada transportasi laut	Kecelakaan/10.000 Freight (Pelayaran)	1,276	0,877	145



4) Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut.

Tabel III.1.12

Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.4	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kejadian/ 100.000 freight (pelayaran)	0,50	0	0	0	0	0	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target pada Tahun 2019 sebesar 0 Kejadian/ 100.000 freight (pelayaran). Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tidak terdapat gangguan keamanan dikarenakan tidak ada laporan dari UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sehingga prosentase pencapaian sebesar 200%.

Grafik III.1.4

Jumlah Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut



Adapun dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019, belum terjadi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. Sedangkan Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan adalah berjumlah 1.072.000 (satu juta tujuh puluh dua ribu) SPB, sehingga realisasi mencapai 200%. Adapun dasar menggunakan perkalian 100.000 SPB dari manual IKU Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



$$\begin{aligned} \text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Laut} &= \frac{0 \text{ kejadian}}{1.072.000 \text{ SPB}} \times 100.000 \text{ SPB} && = 0 \\ & && (2 \times 0,5) - 0 && = 200\% \\ & && \% \text{ Capaian} && = 0,5 \end{aligned}$$

Menurut Amandemen *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* pada Chapter XI-2 tentang *International Ship And Port Facility Security Code (ISPS Code)*/Keamanan *Maritime* yang termasuk Gangguan Keamanan adalah sebagai berikut

1. Perusakan terhadap atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan sengaja, tindakan sabotase atau corat coret;
2. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang di atas kapal;
3. Merusak muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya atau tempat penyimpanan kapal;
4. Keluar masuk secara tidak sah atau menggunakannya termasuk kehadiran penumpang gelap;
5. Penyelundupan senjata atau peralatannya termasuk senjata pemusnah massal;
6. Menggunakan kapal untuk membawa semua yang bermaksud menyebabkan peristiwa keamanan dan atau peralatannya;
7. Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau penghancuran;
8. Penyerangan dari arah laut ketika di Dermaga atau di tempat labuh;

Adapun Gangguan keamanan adalah sebagai berikut : Nihil (0) dan dalam rangka mengurangi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Mengoptimalkan manajemen keamanan kapal dan kemananan pelabuhan;
2. Menerbitkan surat edaran tentang peningkatan pengawasan keamanan di kapal dan pelabuhan;
3. Melaksanakan kerjasama dengan Negara lain yang berkaitan dengan pengembangan personil terkait bidang *maritime security*.

IKU No. 4: Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 7 dengan Realisasi kinerja sebesar 6 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 85,71 %. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 6 dengan realisasi kinerja sebesar 0 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 200 %. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 5 dengan realisasi kinerja sebesar 3 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 60 %. Pada tahun 2018 dari target 0,50 dapat tercapai sebesar 0 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 200%. Sedangkan pada tahun 2019



dari target 0,50 dapat tercapai sebesar 0 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 200%, artinya tidak terdapat gangguan keamanan dikarenakan tidak ada laporan dari UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel III.1.13
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 4 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 4	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kejadian/ Tahun	Kejadian/ 100.000 <i>Freight</i> (Pelayaran)	Target	7	6	5	0,50	0,50
			Realisasi	6	0	3	0	0
			Kinerja (%)	85,71	200	60	200	200

IKU no 4 : Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut

Realisasi Tahun 2019 sebesar 0 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 tidak sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 0,50. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 200%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.14
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 4 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 4	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kejadian/100.000 <i>Freight</i> (Pelayaran)	0,50	0	200



SASARAN STRATEGIS (3)

Sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

5) Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach Time* (AT), *Effective Time* (ET/BT)

Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) merupakan pencapaian atas kinerja pelayanan kapal yang terdiri dari *Waiting Time* (WT) dan *Approach Time* (AT), serta kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT). OTP dihitung berdasarkan pencapaian kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun rumus perhitungan pencapaian WT, AT, dan ET:BT adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian *Waiting Time* (WT)

Waiting Time (WT) merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (*Pilot on Board/POB*) pada pelayanan kapal masuk ke pelabuhan. *Waiting Time* (WT) disajikan dalam satuan jam.

Rumus perhitungan Pencapaian ***Waiting Time* (WT)**:

$$\text{Pencapaian (WT) pelabuhan} = \frac{\text{Capaian WT pada Terminal/Pelabuhan}}{\text{Standar WT pada Terminal/Pelabuhan}} \times 100\%$$

b) Pencapaian *Approach Time* (AT)

Approach Time (AT) merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari dan/atau ke pelabuhan. Untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar

sampai saat ikat tali di tambatan (*first line*), sedangkan untuk kapal keluar dari pelabuhan dihitung mulai lepas tali (*last line*) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari area lego jangkar). *Approach Time* (AT) disajikan dalam satuan Jam.

Rumus perhitungan Pencapaian ***Approach Time* (AT)**:

$$\text{Pencapaian (AT) pelabuhan} = \frac{\text{Capaian AT pada Terminal/Pelabuhan}}{\text{Standar AT pada Terminal/Pelabuhan}} \times 100\%$$

c) Pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

Effective Time : Berthing Time (ET:BT) atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan perbandingan waktu kapal berkerja efektif di dermaga (terminal) dengan



waktu kapal selama di tambatan dermaga (terminal). *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT) disajikan dalam satuan Persentase (%).

Rumus perhitungan Pencapaian **Effective Time : Berthing Time (ET:BT)**:

$$\text{Pencapaian (ET:BT) pelabuhan} = \frac{\text{Capaian ET:BT pada Terminal/Pelabuhan}}{\text{Standar ET:BT pada Terminal/Pelabuhan}} \times 100\%$$

Pencapaian *On Time Performance* (OTP)

Rata-rata Capaian atas *Waiting Time* (WT) + *Approach Time* (AT) + *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

$$\frac{\text{Waiting Time (WT) + Approach Time (AT) + Effective Time : Berthing Time (ET:BT)}}{3} \times 100\%$$

Target pencapaian *On Time Performance* pada tahun 2019 sebesar 80.00% yang berarti bahwa *On Time Performance* tahun 2019 diharapkan dapat mencapai 80.00% dari standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.15

Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach Time* (AT), *Effective Time* (ET/BT)

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.5	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	80	88.67	94	94	95	95	118,75

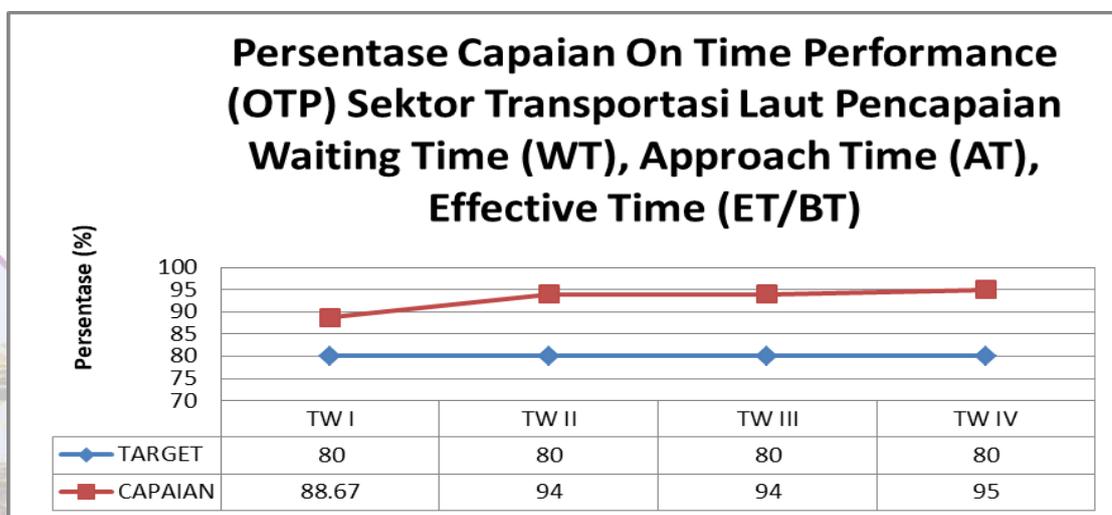
Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Hasil pencapaian *On Time Performance* tahun 2019 menunjukkan pada Triwulan I sebesar 88.67%, Triwulan II sebesar 94%, Triwulan III sebesar 94% dan pada Triwulan IV sebesar 95% dengan kesimpulan hasil pencapaian *On Time Performance* tahun 2019 sebesar 95%. Pencapaian *On Time Performance* sebesar 95% menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja pelayanan kapal dan pelayanan terminal pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial mencapai 118,75% dari standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang telah ditetapkan.



Grafik III.1.5

Presentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Laut



Jika dibandingkan dengan target *On Time Performance* pada tahun 2019 sebesar 80%, maka hasil capaian *On Time Performance* pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Kinerja pelayanan kapal dan pelayanan terminal pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial cenderung mendekati nilai standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan, dimana kondisi yang diharapkan yaitu hasil kinerja pelayanan kapal dan pelayanan terminal harus mencapai atau sesuai dengan standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan. Realisasi pencapaian *On Time Performance* dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV melebihi target dan mendekati nilai standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam mengatur kegiatan operasional di pelabuhan, serta ditunjang dengan peralatan bongkar muat yang handal. Pencapaian *On Time Performance* sebesar 95%, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kondisi alur, cuaca, masalah tenaga kerja bongkar muat pelabuhan, serta distribusi logistik di wilayah setempat yang akan memperlambat pencapaian *On Time Performance* sektor transportasi laut.

Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pandu akan menghambat capaian WT, sedangkan kondisi alur pelayaran yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nilai ET : BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET : BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan



dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhan akan terhambat dengan menurunnya produktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.

Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pandu akan menghambat capaian WT, sedangkan kondisi alur pelayaran yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nilai ET : BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET : BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhan akan terhambat dengan menurunnya produktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.

Realisasi *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Laut terdiri dari:

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{96\%}{100\%} \times 100\% = 96\%$$

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{98\%}{100\%} \times 100\% = 98\%$$

$$\text{Pencapaian (ET:BT) Pelabuhan} = \frac{92\%}{100\%} \times 100\% = 92\%$$

Sehingga diperoleh:

$$\text{OTP Transportasi Laut} = \frac{96\% + 98\% + 92\%}{3} \times 100\% = 95\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{95\%}{80\%} \times 100\% = 118,75\%$$



**IKU No. 5 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Laut
Pencapaian Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET/BT)**

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar WT:43,40 AT: 48,90 ET/BT: 71,80 dengan Realisasi kinerja sebesar WT:50,10 AT: 48,90 ET/BT: 73,80 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar WT:121,43 AT: 96,29 ET/BT: 109,81. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar WT:50,10 AT: 48,90 ET/BT: 73,80 dengan realisasi kinerja sebesar WT:89,1 AT: 47,09 ET/BT: 94,54 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar WT:177,94 AT: 96,29 ET/BT: 128,10. Pada tahun 2017 dari target 64,03 dapat tercapai sebesar 88 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 137,44%. Pada tahun 2018 dari target 68,7 dapat tercapai sebesar 89 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 129%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 80 dapat tercapai sebesar 95 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 119%. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah menggunakan IKU baru sesuai dengan Reviu Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel III.1.16
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 5 dengan Target Kinerja 2015 – 2019**

IKU 5	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET/BT)	%	% (OTP)	Target	WT:43,40 AT: 48,90 ET/BT: 71,80	WT:50,10 AT: 48,90 ET/BT: 73,80	WT:56,70 AT: 59,50 ET/BT: 75,90	68,7	80
			Realisasi	WT:52,70 AT: 47,09 ET/BT: 78,84	WT:89,1 AT: 47,09 ET/BT: 94,54	WT:92 AT: 91 ET/BT: 80	89	95
			Kinerja (%)	WT:121,43 AT: 96,29 ET/BT: 109,81	WT:177,94 AT: 96,29 ET/BT: 128,10	WT:89 AT: 90 ET/BT: 83	129	119



IKU no 5 : Presentasi Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Laut

Target Tahun 2019 sebesar 80 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 lebih besar dari pada target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 95. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 119%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.17
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 5 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 5	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET/BT)	%	80	95	119

SASARAN STRATEGIS (4)

Sasaran strategis **Terlaksana Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 6) Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Dari Kegiatan Pelayaran.**

Tabel III.1.18

Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Dari Kegiatan Pelayaran

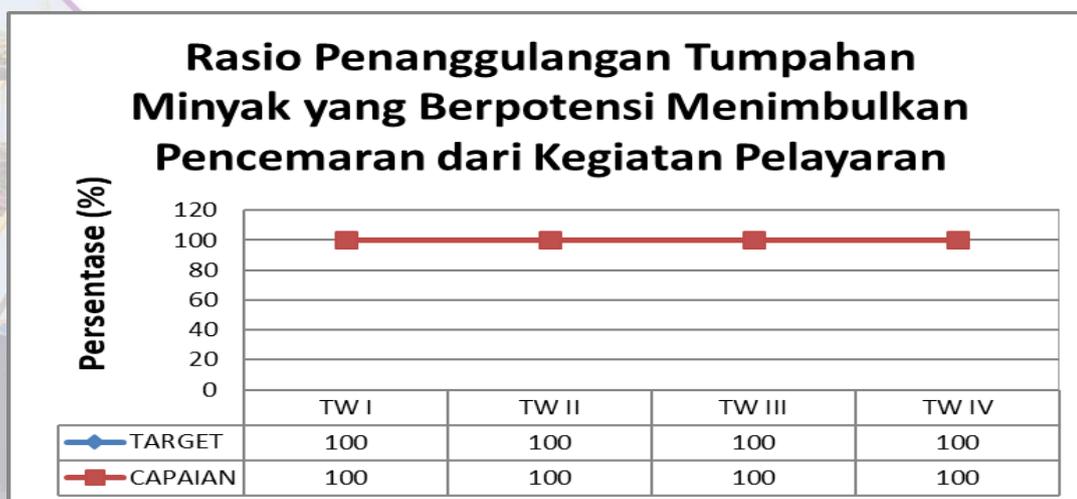
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.6 Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Dari Kegiatan Pelayaran	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.



Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 100% dan terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 100%, sehingga total Rasio Penanggulangan Tumpahan Minyak yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari kegiatan pelayaran sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% dan prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik III.1.6
Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak
yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran



Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak telah dilakukan upaya penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat. Hal ini sesuai amanat Perpres 109 Tahun 2006 serta PM.58 Tahun 2013 bahwa Syahbandar mengkoordinasikan aset penanggulangan tumpahan minyak yang dimiliki Tersus, Tuks dan BUP di pelabuhan. Frekuensi kejadian tumpahan minyak telah dilaporkan dapat ditanggulangi, adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \rightarrow \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$



Tabel III.1.18

**DATA MUSIBAH TUMPAHAN MINYAK DILAUT DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
TAHUN 2019**

NO	KEJADIAN		NAMA KAPAL	JENIS KAPAL	PENYEBAB	TUMPAHAN MINYAK		TINDAKAN PENANGGULANGAN
	TANGGAL	LOKASI				JENIS	JUMLAH	
1	31 Maret 2018	Pare-pare	MT Golden Pearl XVI	Tanker	Kebocoran Kapal	Solar	800 Liter	<p>Berkoordinasi dengan PT. Pertamina Pare-pare;</p> <p>Berkoordinasi dengan pemilik kapaol;</p> <p>Melakukan penanggulangan tumpahan minyak Bersama-sama PT. Pertamina Pare-pare;</p>
2	12 Juli 2019	Wilayah perairan Karawang	Pemboran Sumur YYA-1	-	Kebocoran pipa	Minyak Mentah	-	<p>Berkoordinasi dengan PT. Pertamina Hulu Energi <i>Offshore Noth West Java</i> (PHE ONWJ)</p> <p>Membentuk posko penanggulangan tumpahan minyak PHE ONWJ, dan berkoordinasi dengan SKK Migas, K3S, Kemenkomar, KKP, TNI dan Polri serta dengan pemerintah daerah</p> <p>Penggelaran oil boom sepanjang 5.800 meter sekitar lokasi pencemaran untuk mencegah meluasnya daerah yang terkena tumpahan minyak dan pemasangan fishnet sepanjang 2.540 meter dan solid boom sepanjang 5.040 meter untuk penanggulangan di pantai;</p> <p>Pengerahan kapal sebanyak 46 kapal;</p> <p>Melakukan pengumpulan minyak yang ada di pesisir pantai dengan menggunakan karung/kantong</p>



NO	KEJADIAN		NAMA KAPAL	JENIS KAPAL	PENYEBAB	TUMPAHAN MINYAK		TINDAKAN PENANGGULANGAN
	TANGGAL	LOKASI				JENIS	JUMLAH	
3	23-Sep-19	Plaju Palembang	---	---	Jetty tertabrak kapal	Premium	--	Ditanggulangi oleh Pertamina Plaju menggunakan peralatan penanggulangan dan personil Pertamina Plaju
4	16-Nov-19	Perairan Balongan Timur 06°21'521" S 108°33' 255"E	Pipa Kondensat/Gas	---	Kebocoran Pipa	Kondensat / Gas	---	Ditanggulangi oleh PHE dengan mematikan aliran kondensat / gas dan melakukan perbaikan terhadap kebocoran pipa.
5	28 Desember 2019	TUKS PT. IKPP Perawang Riau	SPOB Wijaya Kusuma		Tubrukan Kapal Antara SPOB Wijaya Kusuma dengan Intan Daya 7	Pertalite		<p>Kebocoran dapat diatasi dengan penggelaran oil boom untuk mengantisipasi penyebaran minyak yang tumpah;</p> <p>Menutup kebocoran dan memindahkan muatan ke kompartemen lainnya;</p> <p>KSOP Pekanbaru melakukan pengawalan kapal menggunakan KN.P483 sampai ke pelabuhan sungai duku Pekanbaru.</p>

IKU No. 6: Persentase Penanggulangan tumpahan minyak yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari kegiatan pelayaran pada pelayanan jasa transportasi laut.

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dengan Realisasi kinerja sebesar 100% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 111,11%. Target kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dengan Realisasi kinerja sebesar 100% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2018 dari target 100% dapat tercapai sebesar 100% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 100% dapat tercapai sebesar 100% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel III.1.19

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 6 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 6	SATUAN 2015 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Dari Kegiatan Pelayaran (DIT.KPLP) Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	PERSENTASE %	Target	100	90	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100
		Kinerja (%)	100	111,11	100	100	100

IKU no 6 : Presentase Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Berpotensi menimbulkan pencemaran dari Kegiatan Pelayaran pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut

Realisasi Tahun 2019 sebesar 100% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019% sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.20

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 6 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 6	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Dari Kegiatan Pelayaran (DIT.KPLP) Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	%	100	100	100

SASARAN STRATEGIS (5)

Sasaran strategis **Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:



7) Rasio rancangan dan peraturan perundangan di bidang pelayaran yang ditetapkan.

Tabel III.1.21
Rasio Rancangan Dan Peraturan Perundangan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.7 Rasio Rancangan Dan Peraturan Perundangan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan	Rasio	1	0.1	0.2	0.4	0,9	0.9	90

Sumber data : Bagian Hukum, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 1 (satu) Rasio, terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 0.1 Rasio, Pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 0.2 Rasio dan Pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 0,4 rasio dan Triwulan IV terdapat Realisasi sebesar 0.9 Rasio sehingga prosentase kinerjanya sebesar 90% dikarenakan masih dalam proses penyusunan peraturan. Adapun Rancangan yang sudah ditetapkan antara lain adalah :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 205/2/10/DJPL/2019 tentang Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukkan Ahli di Bidang Pelayaran;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Penanganan Tindak Pidana Pelayaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Statutory Kapal pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 211/6/14/DJPL/2019 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 15 Tahun 2019 tentang Prioritas Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Bulan Puasa dan Lebaran 2019;



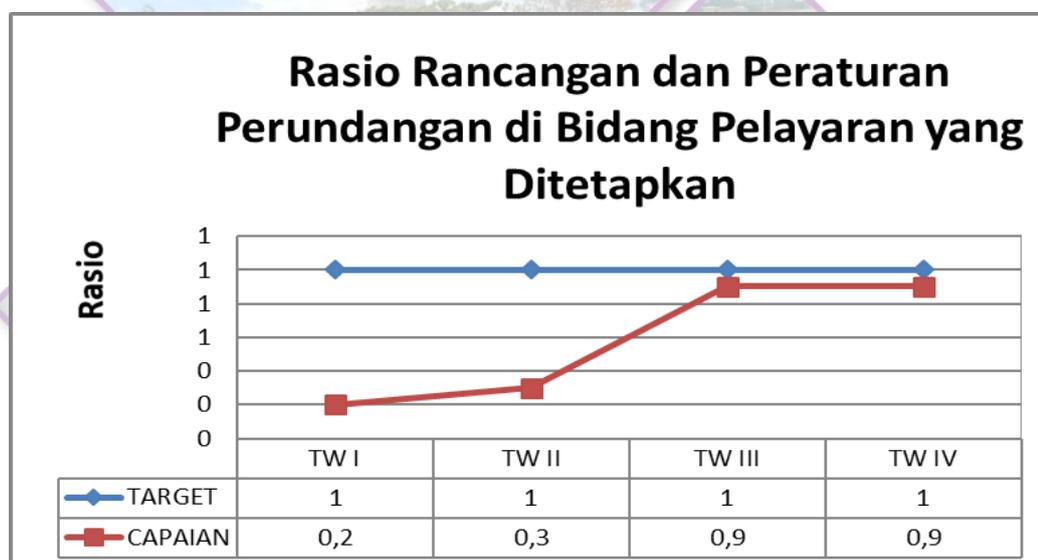
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 431/DJPL/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 205/8/5/DJPL/2019 tentang Pemberlakuan Standar Operasioal Prosedur Pengujian Peralatan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) Klas B;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 205/8/13/DJPL/2019 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penempatan Kapal Negara Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 205/8/14/DJPL/2019 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keselamatan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

Adapun terdapat beberapa rancangan peraturan yang belum ditetapkan adalah :

1. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Berbendera Indonesia;
2. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penyelenggaraan Fungsi Intelijen di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim di Area Labuh Perairan Indonesia.

Grafik III.1.7

Rasio Rancangan dan Peraturan Perundangan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan





Rumus dan Cara Perhitungannya Rancangan Peraturan Tahun ini dibagi dengan target rancangannya dikali dengan seratus persen.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{9}{10} \times 100\% = 0,9$$

IKU No. 7: Rasio Rancangan dan Peraturan Perundangan di Bidang Pelayaran yang ditetapkan

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 14 dengan Realisasi kinerja sebesar 15 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 107,14 %. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 28 dengan realisasi kinerja sebesar 28 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100 %. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 18 dengan realisasi kinerja sebesar 26 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 138,89%. Pada tahun 2018 dari target 1 dapat tercapai sebesar 1 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2018 dari target 1 dapat tercapai sebesar 0,9% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 90%.

Tabel III.1.22

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 7 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 7	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rancangan Dan Peraturan Perundangan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan	Peraturan	Rasio	Target	14	28	18	1	1
			Realisasi	15	28	26	1	0,9
			Kinerja (%)	107,14	100	138,89	100	90

IKU no 8 : Rasio Rancangan dan Peraturan Perundangan di Bidang Pelayaran yang ditetapkan

Realisasi Tahun 2019 sebesar 1 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 lebih kecil dari pada target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 0,9. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 90%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel III.1.23

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 7 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 7	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio Rancangan Dan Peraturan Perundangan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan	RASIO	1	0,9	90

SASARAN STRATEGIS (6)

Sasaran strategis **Terlaksananya Pembinaan Teknis Transportasi laut** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 8) **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan.**

Tabel III.1.24

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.8 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan	%	100	10	23	55	100	100	100

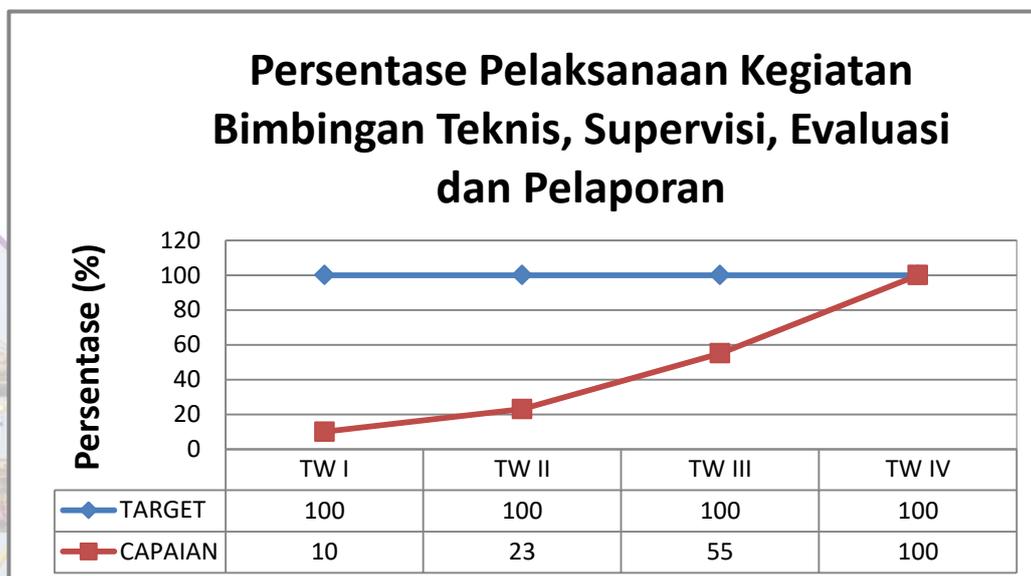
Sumber data : Para Direktorat dan Bagian, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai target Tahun 2019 sebesar 100% dan terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 10%, untuk Triwulan II terdapat realisasi sebesar 23%, dan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 55%, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 100%, sehingga prosentase capaian kinerja terhadap target sebesar 100%.



Grafik III.1.8

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan



Adapun pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan sbb :

1. Bimtek Keselamatan Pelayaran;
2. Monev Pengawasan Kelaikan Peti Kemas;
3. Monev Standar Mutu Kepelautan ;
4. Monev;
5. Monev Perlindungan Awak Kapal;
6. Bimtek Rencana Strategis (Renstra);
7. Bimtek Perjanjian Kinerja (PK);
8. Bimtek Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
9. Bimtek SPIP;
10. Penyusunan RKA/KL;
11. Sosialisasi Pengarahan KPA/PPK;
12. Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA 2019;
13. Bimtek Survey Kepuasan Masyarakat;
14. Pembinaan Pelaksanaan pengisian survey kepuasan pelanggan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait akan dilaksanakan Sistem Management Mutu ISO 9001:2015;
15. Pembinaan Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



IKU No. 8: Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan

Adapun target kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dengan Realisasi kinerja sebesar 100% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Sedangkan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dengan Realisasi kinerja sebesar 100% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Capaian Kinerja pada IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun-tahun sebelumnya belum terdapat IKU Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1 25
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 8 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 8	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018 – 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan	-	PERSENTASE %	Target	-	-	-	100	100
			Realisasi	-	-	-	100	100
			Kinerja (%)	-	-	-	100	100

IKU no 8 : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelaporan

Realisasi Tahun 2019 sebesar 100% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.26
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dengan Target Renstra Tahun 2018

IKU 8	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2018	KINERJA (%)
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan	%	100	100	100



SASARAN STRATEGIS (7)

Sasaran strategis **Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut** terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

9) Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang.

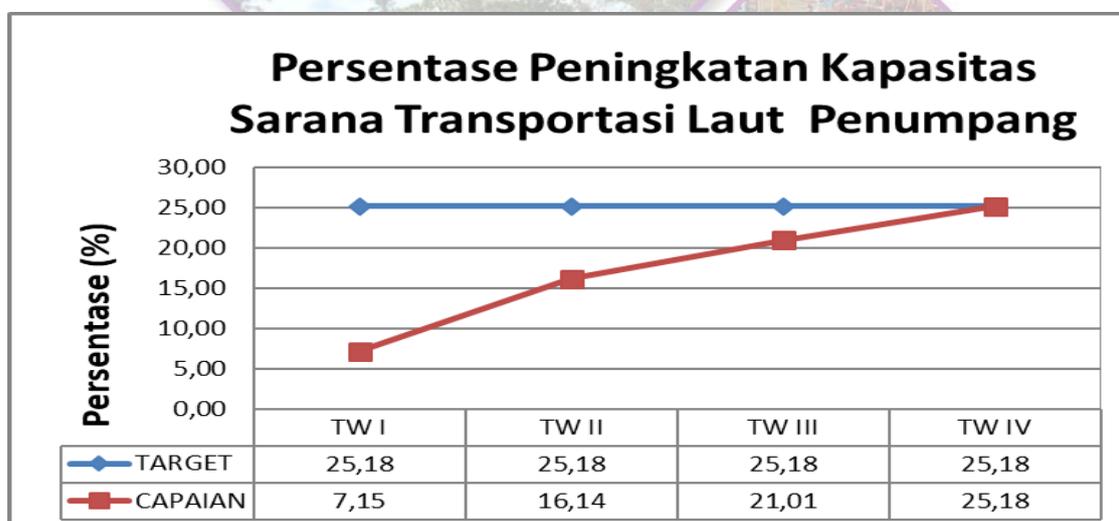
Tabel III.1.31
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.9 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang	%	25.18	7.15	16.14	21,01	25,18	25,18	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target Tahun 2019 sebesar 25,18%.Terlihat pada Triwulan I realisasi sebesar 7,15%, pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 16.14%, pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 21,01% dan pada Triwulan IV mencapai 25,18%, sehingga prosentase capaian kinerja terhadap target sebesar 100%.

Grafik III.1.9
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang





Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang diukur melalui jumlah muatan angkutan laut penumpang terhadap target muatan angkutan laut penumpang, atau dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah muatan angkutan laut penumpang}}{\text{Target muatan angkutan laut penumpang}} \times 100\%$$

$$25.18\% = \frac{40.800 - 32.594}{32.594} \times 100\%$$

Pencapaian target ini dikarenakan adanya pemeliharaan atau docking 42 (empat puluh dua) unit kapal perintis buatan tahun 2003 - 2013. Pemeliharaan kapal tersebut mengakibatkan adanya penambahan kapasitas penumpang sebanyak 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) penumpang.

IKU No. 9: Persentase peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 5.345.461 dengan Realisasi kinerja sebesar 5.333.044 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 99.77%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 8.081.413 dengan realisasi kinerja sebesar 8.071.717 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 99.88 %. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 8.081.413 dengan realisasi kinerja sebesar 8.071.717 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 99.88 %. Pada tahun 2018 dari target 8,76% dapat tercapai sebesar 8,76% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2019 dari target 25,18% dapat tercapai sebesar 25,18% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan satuan sedangkan Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.32

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 9 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 9	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang	Pnp/Tahun	%	Target	5.345.461	8.081.413	8.071.717	8,76	25,18
			Realisasi	5.333.044	8.071.717	8.053.910	8,76	25,18
			Kinerja (%)	99.77	99.88	99,78	100	100



IKU no 9 : Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang

Realisasi Tahun 2019 sebesar 25,18% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 8,86%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 284%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.33
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 9 Dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 9	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang	%	8,86	25,18	284

10) Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang.

Tabel III.1.34
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.10 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang	%	12.56	2.98	4.58	10,41	12,56	12,56	100

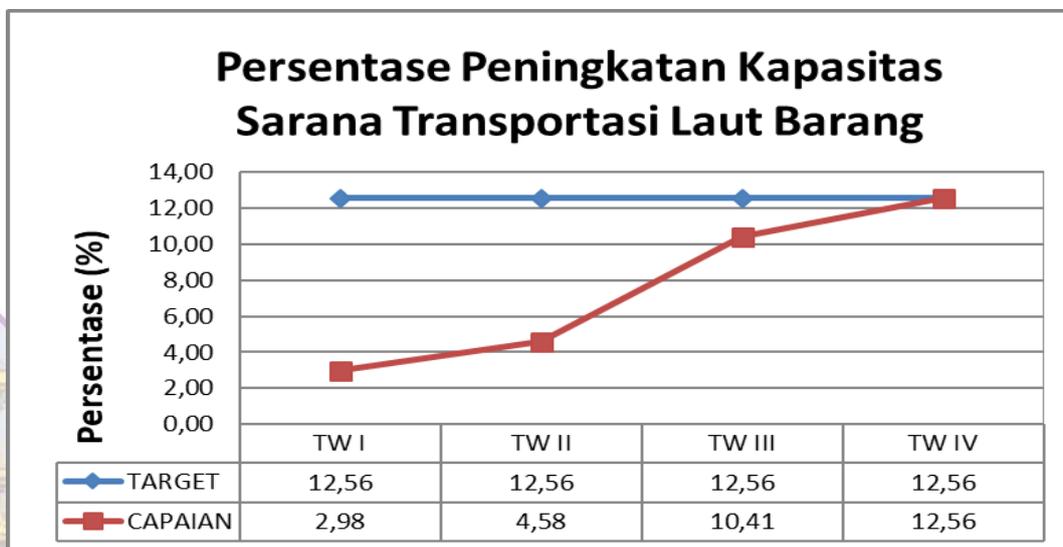
Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target Tahun 2019 sebesar 12.56%.Terlihat pada Triwulan I realisasi mencapai 2,98%, pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 4.58%, pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 10,41% dan pada triwulan IV mencapai 12,56 %, sehingga prosentase capaian kinerja terhadap target sebesar 100%.



Grafik III.1.10

Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang



Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang diukur melalui peningkatan jumlah muatan barang tahun berjalan terhadap jumlah muatan barang tahun sebelumnya, atau dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kapasitas angkut Tahun 2019} - \text{Jumlah kapasitas angkut Tahun 2018}}{\text{Jumlah kapasitas angkut Tahun 2018}}$$

$$12.56\% = \frac{18.914 - 16.804}{16.804} \times 100\%$$



Pencapaian target ini dikarenakan adanya pemeliharaan atau docking 42 (empat puluh dua) unit kapal perintis buatan tahun 2003 - 2013. Pemeliharaan kapal tersebut mengakibatkan adanya penambahan kapasitas angkut barang sebanyak 2.110 Ton.

IKU No. 10: Presentase peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 1.168.638.474 dengan Realisasi kinerja sebesar 1.112.258.468 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 95,17%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 1.285.502.322 dengan realisasi kinerja sebesar 1.221.409.253 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 95,01 %. Target kinerja pada tahun 2017 sebesar 1.221.822.690 dengan Realisasi kinerja sebesar 1.144.934.560 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 93,71%. Pada tahun 2018 dari target 10% dapat tercapai sebesar 10% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2019 dari target 12,56% dapat tercapai sebesar 12,56% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan satuan sedangkan Capaian Kinerja sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.35

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 10 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 10	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang	Ton/ Tahun	%	Target	1.168.638.474	1.285.502.322	1.221.822.690	10	12,56
			Realisasi	1.112.258.468	1.221.409.253	1.144.934.560	10	12,56
			Kinerja (%)	95,17	95,01	93,71	100	100



IKU no 10 : Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang

Realisasi Tahun 2019 sebesar 12,56% menunjukkan bahwa realisasi tahun : sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 10%. Sehingga Realisasi Kinerja sebesar 125,6%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.36
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 10 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 11	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang	%	10	12,56	125,6

11) Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial)

Tabel III.1.37
Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.11 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial)	%	90.00	1.97	3.94	82.23	86.58	86.58	96,20

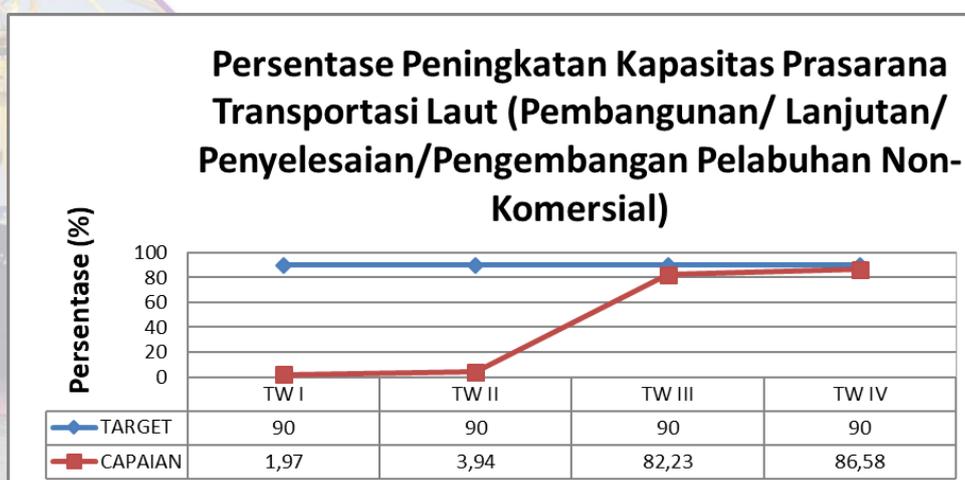
Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut



Sesuai target Tahun 2019 sebesar 90% dari total jumlah target Pembangunan/Lanjutan/Penyelesaian/Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) pelabuhan dan pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1.97% .Pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 3.94%, Triwulan III terdapat realisasi sebesar 8.23% dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 86.58% sehingga prosentase capaian sebesar 96,20% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.1.11

Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial)



Pagu	1,324,089,328,000
Nilai Kontrak	960,901,511,000
Realisasi	920,411,573.480
Total Lokasi Terlaksana	152
Total Lokasi Yang Tidak Terlaksana	6

Tabel III.1.38

Pelabuhan-Pelabuhan Yang Sudah Kontrak Dan Terealisasi

No	Kegiatan	Realisasi Bulan	Jumlah Lokasi	Lokasi	Realisasi Anggaran	Total Anggaran
1	Pembangunan Pelabuhan Baru	Desember	2	1	Labuhan Bajau	15,214,756.200
				2	Mansalean	9,221,903.148
2	Lanjutan	Desember	1	1	Pulau Banyak	3,854,915.000



	Pembangunan						
				2	Bagan Siapi-api	0	
3	Penyelesaian dan Pendukung Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Desember	96	1	Malahayati	361,647.000	424.817.345,755
				2	Lhokseumawe	320,030.000	
				3	Sabang	110,900.000	
				4	Kuala Langsa	107,000.000	
				5	Idi	184,700.000	
				6	Sibolga	850,750.000	
				7	Pulau Tello	3,940,174.000	
				8	Parlimbungan Ketek	6,277,380.000	
				9	Pulau Laut	3,938,000.000	
				10	Subi	11,546,897.000	
				11	Dabo Singkep	196,000.000	
				12	Ujung Jabung	35,642,080.000	
				13	Pangkal Balam	112,320.000	
				14	Manggar	123,300.000	
				15	Dendang	158,850.000	
				16	Tg. Emas	1,302,363.000	
				17	Batang	2,124,858.893	
				18	Tanglok	473,776.000	
				19	Benoa	132,729.173	
				20	Celukan Bawang	153,745.000	
				21	Tanah Ampo	32,584,900.000	
				22	Lembar	739,701.000	
				23	Labuhan Lombok	2,618,000.000	
				24	Sape	3,176,230.000	
				25	Batutua	1,065,900.000	
				26	Ndao	573,175.000	
				27	Papela	521,900.914	
				28	Nunbaunsabu	9,204,766.000	
				29	Kolbano	953,960.000	
				30	Padang Tikar	13,370,330.000	
				31	Samuda	51,000.000	
				32	Banjarmasin	806,736.000	
				33	Pelaihari	37,784,336.000	
				34	Sebuku	32,239,080.000	
				35	Matasiri	6,230,703.380	
				36	Marabatuan	9,858,423.000	
				37	Maloy	58,212,165.000	
				38	Tg. Santan	179,835.000	
				39	Kuala Semboja	313,362.000	
				40	Tarakan	1,095,000.000	
				41	Malinau	1,195,187.500	



				42	Petta	1,081,000.000	
				43	Kawaluso	168,260.000	
				44	Ngalipaeng	710,975.000	
				45	Marore	15,127,500.000	
				46	Marampit	761,347.000	
				47	Mangaran	199,800.000	
				48	Lirung	199,600.000	
				49	Essang	585,740.000	
				50	Pehe	187,760.000	
				51	Likupang	196,172.900	
				52	Gorontalo	476,929.000	
				53	Kwandang	410,000.000	
				54	Donggala	196,999.000	
				55	Sikeli	3,000,900.000	
				56	Boepinang	425,549.000	
				57	Kasipute	424,220.000	
				58	Kolaka	926,190.000	
				59	Makassar	4,229,000.000	
				60	Palopo	7,098,000.000	
				61	Siwa	1,140,000.000	
				62	Benteng Selayar	1,684,280.000	
				63	Polewali	1,050,000.000	
				64	Belang-belang	4,668,830.000	
				65	Saparua	780,320.000	
				66	Tepa	2,049,500.145	
				67	Molu Baru	2,292,708.500	
				68	Saumlaki	469,200.000	
				69	Bula	1,835,000.000	
				70	Kairatu	897,495.000	
				71	piru	452,515.500	
				72	Kaiwatu	5,088,050.874	
				73	Letti	2,524,029.500	
				74	Hila/Romang	4,152,345.726	
				75	Amahai	1,388,034.000	
				76	Dobo	4,094,911.500	
				77	Kesui	1,049,310.000	
				78	Geser	2,654,810.000	
				79	Gorom	2,087,910.000	
				80	Namrole	611,844.806	
				81	Babang	656,000.249	
				82	Mafa	1,583,100.000	
				83	Weda	1,871,097.600	
				84	Jailolo	1,080,000.000	
				85	Matui	884,990.000	
				86	Wayaloar	328,336.000	
				87	Depapre	16,875,344.113	



				88	Waren	1,146,344.535	
				89	Moor	16,868,780.000	
				90	Korido	19,145,540.640	
				91	Sorong	1,823,994.307	
				92	Fak-Fak	1,982,000.000	
				93	Teminabuan	1,487,090.000	
				94	Pota	117,400.000	
				95	Ambon	198,800.000	
				96	Bulukumba	559,300.000	
3	Pengembangan dan Rehabilitasi	Desember	53	1	Tapaktuan	4,041,675.000	467.302.653,377
				2	Kuala Gaung	1,348,405.000	
				3	Sungai Guntung	17,360,560.000	
				4	Belinyu	616,441.000	
				5	S. Selan	568,355.000	
				6	Tg. Batu	12,413,232.129	
				7	Pulau Baai	921,993.000	
				8	Tg. Priok	1,873,674.000	
				9	Larangan	179,695.527	
				10	Karimunjawa	989,260.000	
				11	Gresik	1,313,140.000	
				12	Masalembu	21,107,030.000	
				13	Nusa Penida	2,609,368.000	
				14	GILI	18,244,276.000	
				15	Biu	17,086,646.350	
				16	Seba	15,775,374.000	
				17	Baranusa	954,750.000	
				18	Waikelo	5,819,645.200	
				19	Reo	29,901,884.684	
				20	Atapupu	12,890,573.950	
				21	Baa	17,978,997.000	
				22	Larantuka	19,644,841.800	
				23	Labuan Bajo	10,520,129.000	
				24	Kendawangan	1,154,855.000	
				25	Tahuna	12,520,634.000	
				26	Miangas	21,603,169.715	
				27	Beo	929,578.000	
				28	Melonguane	870,325.000	
				29	Ulu Siau	1,026,747.000	
				30	Bumbulan	740,487.000	
				31	Wanci	10,839,485.500	
				32	Jampea	9,988,317.000	
				33	Garongkong	4,642,478.500	
				34	Tulehu	29,580,568.400	
				35	Wonreli	717,895.000	
				36	Tual	23,739,500.000	



				37	Ternate	4,129,287.000	
				38	Dofa	3,692,290.850	
				39	Sanana	870,301.000	
				40	Malbufo	1,784,977.000	
				41	Falabisahaya	871,265.000	
				42	Tikong	564,690.000	
				43	Bobong	606,568.000	
				44	Tobelo	783,000.000	
				45	Kedi	395,000.000	
				46	Laiwui	609,700.000	
				47	Biak	2,899,832.926	
				48	Merauke	1,845,986.878	
				49	Nabire (SBSN)	7,232,960.161	
				50	Sarmi	63,854,801.057	
				51	Serui	14,993,073.000	
				52	Kaimana	23,206,654.750	
				53	Teminabuan	5,924,500.000	

Adapun Pelabuhan yang tidak terlaksana, terdiri dari:

No	Kegiatan	Jumlah Lokasi	Lokasi		Keterangan
1	Penyelesaian dan Pendukung Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	6	1	Mocoh	Blokir, yang hingga pertengahan Tahun 2019 tidak ditindak lanjuti, maka pekerjaan tersebut direlokasi
			2	S. Liat	Blokir, yang hingga pertengahan Tahun 2019 tidak ditindak lanjuti, maka pekerjaan tersebut direlokasi
			3	Bojonegara	Blokir, yang hingga pertengahan Tahun 2019 tidak ditindak lanjuti, maka pekerjaan tersebut direlokasi
			4	Pelabuhan ratu	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pelabuhanratu sesuai surat UM.003/3//19/UPP-Plr-19 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Laporan Pembangunan Pelabuhan Regional Tahap IV 2019, tentang Revisi RIP Pelabuhanratu yang mana revisi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhanratu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat belum selesai.
			5	Brebes	Blokir, yang hingga pertengahan Tahun 2019 tidak ditindak lanjuti, maka pekerjaan tersebut direlokasi
			6	Wiradesa	Blokir, yang hingga pertengahan Tahun 2019 tidak ditindak lanjuti, maka pekerjaan tersebut direlokasi



**IKU No. 11: Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut
(Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial)**

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 306 dengan Realisasi kinerja sebesar 306 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 100 %. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 72 dengan realisasi kinerja sebesar 72 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 100 dengan realisasi kinerja sebesar 98 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 99%. Pada tahun 2018 dari target 90% dapat tercapai sebanyak 98% pelabuhan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 98%. Pada tahun 2019 dari target 90% dapat tercapai sebanyak 86.39% pelabuhan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 95,99%. Sedangkan Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan satuan. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena ada beberapa lokasi pelabuhan yg tidak dilaksanakan. Hal ini dapat dijelaskan pada table berikut:

Tabel III.1.39

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 11 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 11	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 – 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial)	Pelabuhan	%	Target	306	72	100	90	90
			Realisasi	306	72	99	98	86.39
			Kinerja (%)	100	100	99	98	95,99

IKU no 11 : Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut

Realisasi Tahun 2019 sebesar 86.39% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 86.39%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.40



Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 11 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 11	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/Pengembangan Pelabuhan Non-Komersial)	%	100	86.39	86.39

12) Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat.

Tabel III.1.41

Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat

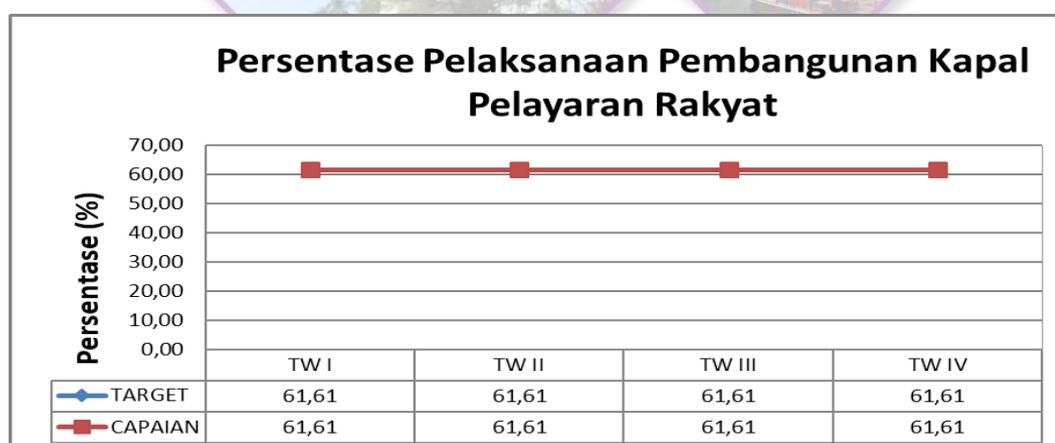
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.12 Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat	%	61.61	61.61	61.61	61.61	61.61	61.61	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai target Tahun 2019 sebesar 61.61% terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 61,61%, sehingga prosentase capaiannya sebesar 100%. Pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat pada tahun 2019 terdapat 20 (dua puluh) unit.

Grafik III.1.12

Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat





Persentase pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat diukur melalui jumlah pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat terhadap jumlah rencana pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat, atau dengan rumus :

$$\% \text{ Pelaksanaan} = \frac{\Sigma \text{pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat}}{\Sigma \text{rencana pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat}} \times 100\%$$

$$61,61\% = \frac{138}{224} \times 100\%$$

Jumlah pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat telah mencapai 138 (seratus tiga puluh delapan) kapal. Sedangkan rencana pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat sampai dengan tahun 2019 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) kapal. Capaian terhadap target sebesar 100%.

IKU No. 12: Persentase pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat

Realisasi Kinerja Tahun 2017 sebesar 24 kapal dari target 24 kapal sehingga persentasenya sebesar 100%, pada Tahun 2018 terdapat target sebesar 55% dan realisasinya sebesar 52,68% sehingga persentasenya sebesar 95,78% sedangkan pada Tahun 2019 terdapat target sebesar 61,61% dan realisasi sebesar 61,61% sehingga persentasenya sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian Kinerja IKU 13 tidak bisa dibandingkan dengan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016 dikarenakan pada tahun tersebut belum terdapat IKU dan terdapat perbedaan pada satuannya. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.42

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 12 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 12	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018 – 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat	Kapal	%	Target	-	-	24	55	61,61
			Realisasi	-	-	24	52,68	61,61
			Kinerja (%)	-	-	100	95,78	100



IKU no 13 : **Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat**

Realisasi Tahun 2019 sebesar 61,61% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 61,61%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.43

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 12 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 12	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat	%	100	61,61	61,61

SASARAN STRATEGIS (8)

Sasaran strategis **Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut** terdiri dari 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

13) Tingkat Kecukupan SBNP.

Tabel III.2.44

Tingkat Kecukupan SBNP

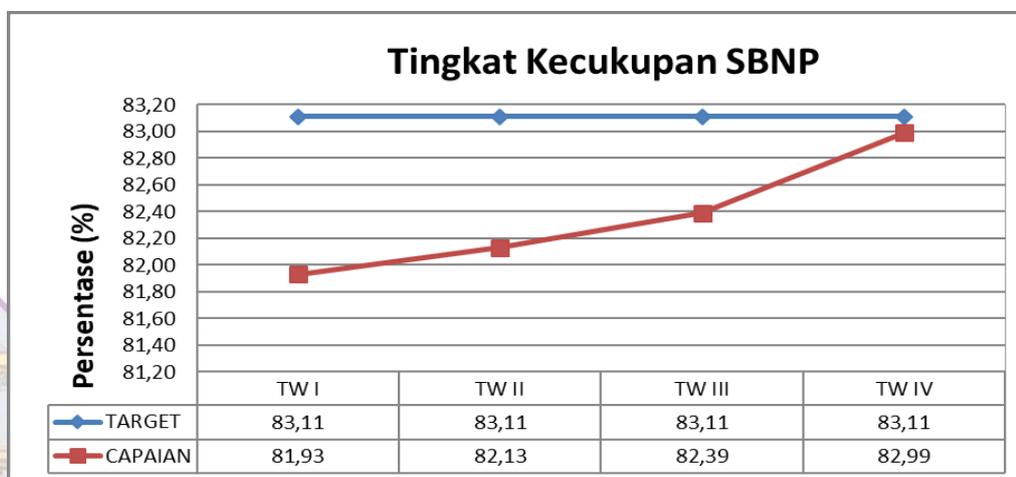
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.13 Tingkat Kecukupan SBNP	%	83.11	81.93	82.13	82.39	82,99	82,99	99,86

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 83,11%, dan terlihat kecukupan SBNP pada Triwulan I sebesar 81,93%, pada Triwulan II kecukupan SBNP sebesar 82,13%, sedangkan pada Triwulan III kecukupan SBNP sebesar 82,39%. Sampai dengan Triwulan IV kecukupan SBNP sebesar 82,99% sehingga prosentase pencapaian Tingkat Kecukupan SBNP adalah sebesar 99,86%.



Grafik III.1.13
Tingkat Kecukupan SBNP



Tingkat kecukupan SBNP dihitung berdasarkan jumlah SBNP yang telah dibangun dibagi dengan SBNP yang dibutuhkan kemudian dikali 100%, sesuai rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat kecukupan SBNP tetap bersuar} = \left(\frac{\sum \text{SBNP fix bersuar}}{\sum \text{kebutuhan SBNP}} \right) \times 100\%$$

Jumlah SBNP yang dibutuhkan Indonesia berdasarkan panjang garis pantai 41.628 mil laut (data Dishidros TNI AL) adalah 3.469 unit (setiap 12 mil terpasang 1 unit SBNP), sampai dengan tahun 2019 SBNP tetap (*fixed light*) bersuar yang ada di Indonesia berjumlah 2.879 unit, dengan rincian:

Menara Suar : 284 unit
 Rambu Suar : 2.595 unit (1.815 DJPL dan 780 non DJPL)
 Total : 2.879 unit

$$\begin{aligned} \text{Tingkat kecukupan SBNP tetap bersuar} &= \frac{\sum \text{SBNP Fix Bersuar}}{\sum \text{Kebutuhan SBNP}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.879}{3.469} \times 100 \% = 82,99 \% \end{aligned}$$

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 83,11%, dan terlihat realisasi prosentase pencapaian Tingkat Kecukupan SBNP telah mencapai target yaitu sebesar 83,11%, sehingga tingkat kecukupan SBNP sampai dengan Triwulan IV pencapaiannya sebesar 99,86%, dikarenakan pembangunan Rambu Suar di Lokasi Tual dan Palembang tidak selesai 100% (putus kontrak).



IKU No. 14: Tingkat kecukupan SBNP

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 82% dengan Realisasi kinerja sebesar 76% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 92,68%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 77,31% dengan realisasi kinerja sebesar 77,31% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 78,64% dengan realisasi kinerja sebesar 78,64% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2018 dari target 81,93% dapat tercapai sebesar 81,93% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 83,11% dapat tercapai sebesar 82,99% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 99,86%, dikarenakan pembangunan Rambu Suar di Lokasi Tual dan Palembang tidak selesai 100% (putus kontrak). Adapun pencapaian realisasi setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.45
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 13 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 13	SATUAN 2015 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat kecukupan SBNP	%	Target	82	77,31	78,64	81,93	83,11
		Realisasi	76	77,31	78,64	81,93	82,99
		Kinerja (%)	92,68	100	100	100	99,86

IKU no 13 : Tingkat Kecukupan SBNP

Realisasi Tahun 2019 sebesar 82,99% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 82,99%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.46
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 13 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 13	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Tingkat Kecukupan SBNP	%	100	82,99	82,99



14) Tingkat Keandalan SBNP.

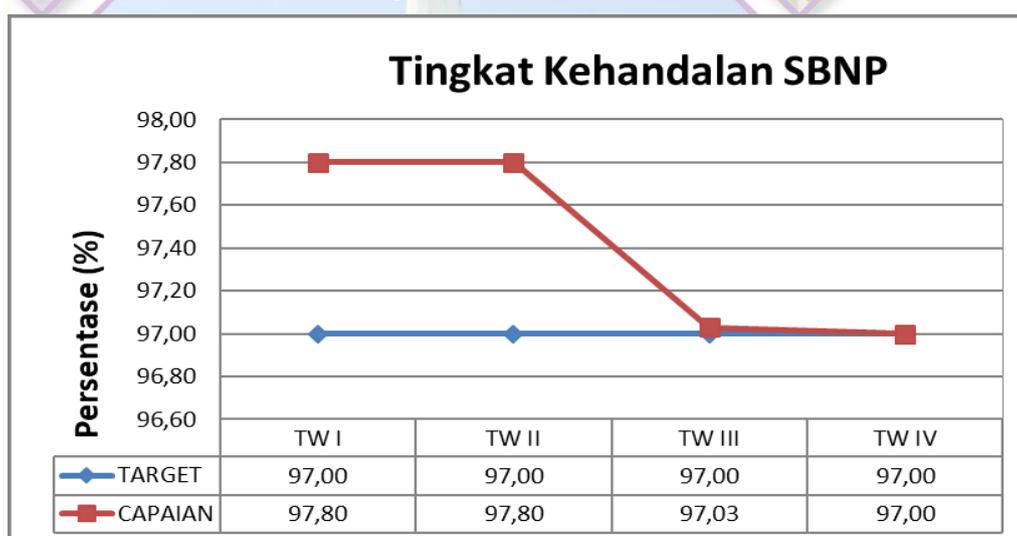
Tabel III.1.47
Tingkat Keandalan SBNP

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.14 Tingkat Keandalan SBNP	%	97.00	97.80	97.80	97.03	97,00	97.00	100

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 97,00%. Terlihat pada Triwulan I sebesar 97,80% dan Triwulan II sebesar 97,80% persentase pencapaian Tingkat Keandalan SBNP sampai dengan Triwulan II sebesar 100%. Pada Triwulan II ke Triwulan III mengalami penurunan dikarenakan banyaknya SBNP yang mengalami kerusakan. Meskipun demikian capaian pada Triwulan III masih sesuai dengan Target yang ditetapkan sedangkan pada Triwulan III Tingkat Keandalan SBNP sebesar 97.03%, sehingga persentasenya sebesar 100.03%. Pada Triwulan IV Tingkat Keandalan SBNP telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,00 %, sehingga persentase pencapaian Keandalan SBNP adalah 100%.

Grafik III.1.114
Tingkat Keandalan SBNP





Jumlah SBNP dihitung berdasarkan SBNP bersuar sebagai berikut :

Jumlah SBNP yang bersuar sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4.044 unit, terdiri dari 2.732 milik DJPL dan 1.312 milik non DJPL.

Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 44.281 hari.

Adapun Persentase kelainan SBNP hingga saat ini sebagai berikut :

$$\frac{\text{Hari Kelainan}}{365 \text{ hari} \times \sum \text{SBNP Bersuar}} \times 100 \% = \frac{44.281}{365 \text{ hari} \times 4044} \times 100 \% = 3,00\%$$

Sehingga Tingkat Keandalan SBNP adalah $100\% - 3,00\% = 97,00\%$.

IKU No. 14: Tingkat keandalan SBNP

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 98% dengan Realisasi kinerja sebesar 98% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 100 %. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 97,38% dengan realisasi kinerja sebesar 97,38% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 97,80% dengan realisasi kinerja sebesar 97,80% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2018 dari target 97,80% dapat tercapai sebesar 97,80% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2019 dari target 97,00% dapat tercapai sebesar 97,00% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.48

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 14 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 14	SATUAN 2015 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat kehandalan SBNP	%	Target	98	97,38	97,80	97,80	97,00
		Realisasi	98	97,38	97,80	97,80	97,00
		Kinerja (%)	100	100	100	100	100



IKU no 14 : Tingkat Kehandalan SBNP

Realisasi Tahun 2019 sebesar 97,00% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 99,00%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 97,97%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.49
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 14 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 14	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Tingkat Kehandalan SBNP	%	99,00	97,00	97,97

15) Persentase Pembangunan/Up-Grade GMDSS.

Tabel III.1.50
Persentase Pembangunan/Up-Grade GMDSS

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.15 Persentase Pembangunan /up-grade GMDSS	%	94,05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	100

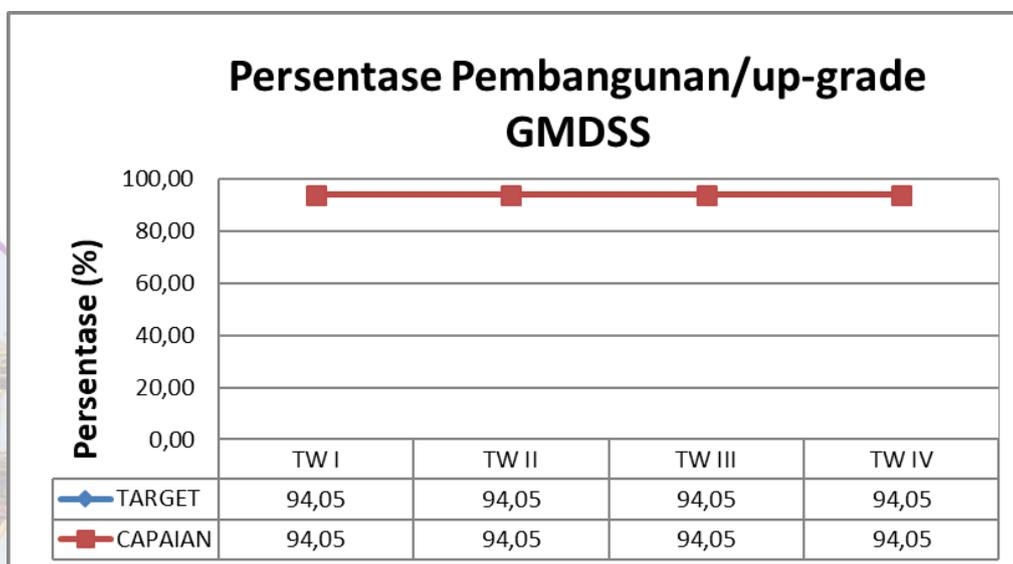
Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target Tahun 2019 sebesar 94,05%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 94.05% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Grafik III.1.15

Persentase Pembangunan/Up-Grade GMDSS



Pada Tahun 2019 terealisasi kegiatan pembangunan dan *Upgrade GMDSS* sebanyak 1 (satu) unit, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel III.2.51
Jumlah Pembangunan dan *Upgrade GMDSS*

NO	URAIAN	DISTRIK NAVIGASI	JUMLAH
1.	<i>Upgrading</i>	Tanjung Priok	1 unit

Tingkat Kecukupan SROP yang dilengkapi GMDSS sesuai dengan yang diusulkan ke IMO dapat dihitung dengan cara : $\frac{\text{Jumlah SROP yang ada}}{\text{Jumlah Kebutuhan SROP}} \times 100\%$

$$\text{Area A1} = \frac{115}{115} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Area A2} = \frac{69}{84} \times 100\% = 82,14\%$$

$$\text{Area A3} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Dari rata-rata Kecukupan SROP yang dilengkapi GMDSS Area A1, A2 dan A3 didapatkan persentase Pembangunan/ *Upgrade GMDSS* sebesar 94,05%.



IKU No. 15: Persentase pembangunan/Up grade GMDSS

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 23% dengan Realisasi kinerja sebesar 21% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 91,30%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 15% dengan realisasi kinerja sebesar 15 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 9% dengan realisasi kinerja sebesar 9% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2018 dari target 94,05 dapat tercapai sebesar 94,05 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 94,05% dapat tercapai sebesar 94,05% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan satuan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.52

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 15 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 15	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pembangunan/ <i>up-grade</i> GMDSS	UNIT	%	Target	23	15	9	94,05	94,05
			Realisasi	21	15	9	94,05	94,05
			Kinerja (%)	91,30	100	100	100	100

Realisasi Tahun 2019 sebesar 94,05 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 94,05%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.53

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 15 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 15	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Pembangunan/ <i>up-grade</i> GMDSS	%	100	94,05	94,05



16) Persentase Pembangunan/Up-Grade VTS.

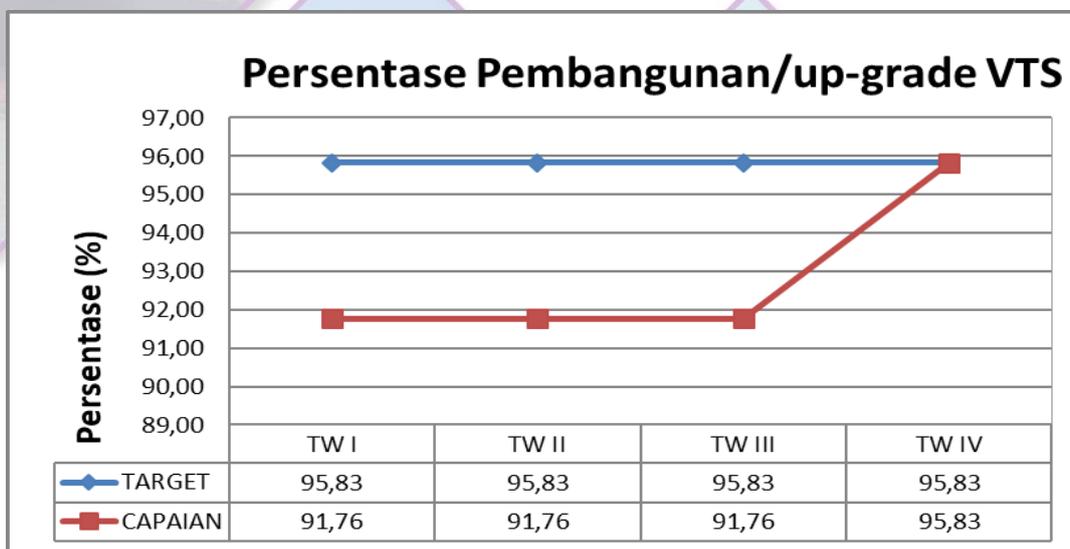
Tabel III.1.54
Persentase Pembangunan/Up Grade VTS

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.16 Persentase pembangunan /up-grade VTS	%	95.83	91.76	91.76	91.76	95,83	95,83	100

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target Tahun 2019 sebesar 95.83% Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 91.76% dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 95,83 sehingga Pencapaian kinerja 100% dan sudah sesuai arget yang telah ditetapkan.

Grafik III.1.16
Persentase Pembangunan dan Upgrade VTS



Pada tahun anggaran 2019 ditargetkan pembangunan VTS 1 (satu) Unit dan Upgrade VTS sejumlah 4 (empat) unit masih dalam proses pembangunan.



Tabel III.1.55
Pembangunan/Up-Grade VTS

NO	DISTRIK NAVIGASI	JUMLAH
1	Pengembangan SRS menjadi VTS Cirebon	1 paket
2	Upgrade VTS <ul style="list-style-type: none"> - Upgrade peralatan VTS Merak - Pengadaan dan pemasangan radar solid state VTS di Benoa - Pembangunan gedung VTS Disnav Teluk Bayur - Pengembangan gedung VTS Cirebon 	4 paket

$$\text{Tingkat Keandalan VTS} = \frac{\sum \text{VTS Terpasang}}{\sum \text{VTS ideal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Keandalan VTS} &= \frac{23}{24} \times 100\% \\ &= 95,83\% \end{aligned}$$

IKU No. 16: Persentase pembangunan/Up grade VTS

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 6 unit dengan Realisasi kinerja sebesar 5 unit sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 83,33%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 3 unit dengan realisasi kinerja sebesar 3 unit sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 2 unit sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2018 dari target 87,50 dapat tercapai sebesar 87,50 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 95.83% dapat tercapai sebesar 95.83% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan satuan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel III.1.56

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 16 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 16	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pembangunan/ <i>up-grade</i> VTS	UNIT	%	Target	6	3	2	87,50	95.83
			Realisasi	5	3	2	87,50	95.83
			Kinerja (%)	83,33	100	100	100	100

IKU no 16 : *Presentase Pembangunan/Up Grade VTS*

Realisasi Tahun 2019 sebesar 95,83% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 95,83%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.57

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 16 dengan Target Renstra Tahun 2019.

IKU 16	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Pembangunan/ <i>up-grade</i> VTS	%	100	95,83	95,83

17) Persentase Pembangunan / Lanjutan / Penyelesaian Kapal Patroli.

Tabel III.1.58

Persentase Pembangunan / Lanjutan / Penyelesaian Kapal Patroli

INDIKATOR KINERJAUTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.17 Persentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patroli	%	81	65	65	65	76	76	93,83

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.



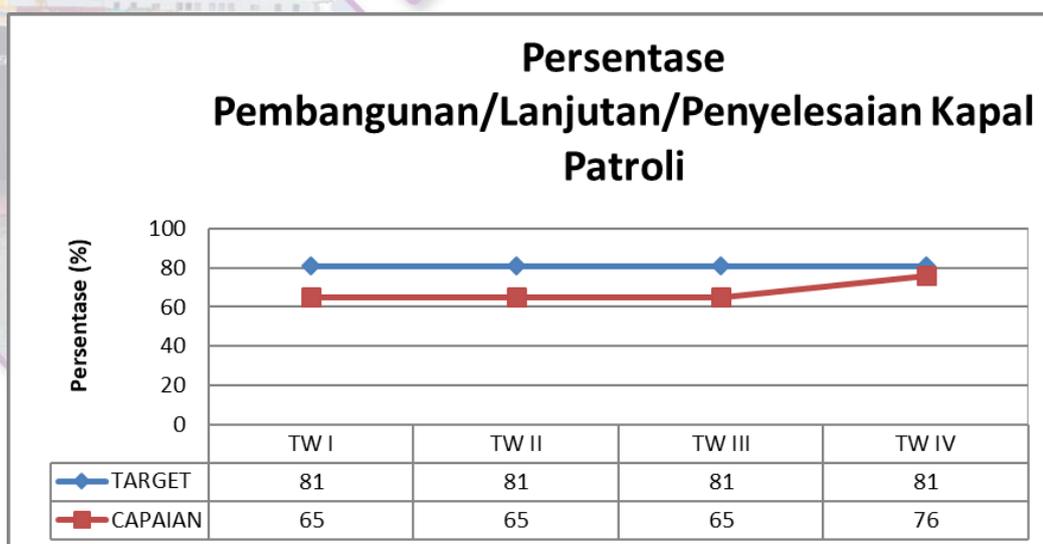
Sesuai dengan target Tahun 2019 sebesar 81% dan terlihat realisasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebesar 65% dan pada Triwulan IV capaian sebesar 76% sehingga persentase kinerja sebesar 93,83%. Untuk Pembangunan Kapal patroli Kelas V pekerjaan sudah selesai 100%, sedangkan untuk Kapal Patroli Kelas III (*multiyears*) masih dalam proses Uang Muka dan Termin I (Tahun 2019) direncanakan akan selesai di Tahun 2020. Rincian Perhitungan Persentase Pembangunan/Lanjutan/Penyelesaian Kapal Patroli :

$$= \left(\frac{\text{realisasi}(2015 - 2018) + \text{realisasi 2019}}{\text{target Renstra 2015 - 2019}} \right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{57 + 9}{87} \right) \times 100\% = 76\%$$

Grafik III.1.17

Persentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patroli



Indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja antara lain:

- **Pembangunan Baru Kapal Patroli**, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada Pembangunan Baru Kapal Patroli terdapat target sebanyak 9 unit Kapal Patroli Kelas V pada tahun 2019.
- **Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli**, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli terdapat target sebanyak 3 unit Kapal Patroli Kelas III pada tahun 2019.



- **Penyelesaian Pembangunan Kapal Patroli**, adapun sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada Penyelesaian Pembangunan Kapal Patroli tidak terdapat target maupun realisasi pencapaian pada tahun 2019.

IKU No. 17: Persentase Pembangunan / Lanjutan / Penyelesaian Kapal Patroli

Pada tahun 2019 dari target 81% terdapat realisasi kinerja sebesar 76% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 93,83%. Target dan Capaian Kinerja pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena belum terdapat IKU tersebut. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.59
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 17 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 17	SATUAN 2015 - 2018	SATUAN 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patroli	-	%	Target	-	-	-	-	81
			Realisasi	-	-	-	-	76
			Kinerja (%)	-	-	-	-	93,83

IKU no 17 : Presentase Pembangunan/Up Grade VTS

Realisasi Tahun 2019 sebesar 76% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 81%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 93,83%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.60

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 17 dengan Target Renstra Tahun 2019.

IKU 17	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patroli	%	81	76	93,83



SASARAN STRATEGIS (9)

Sasaran strategis **Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil** terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

18) Rasio Layanan Transportasi Laut Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil (Jumlah Trayek Angkutan Perintis).

Tabel III.1.61

Rasio Layanan Transportasi Laut Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil

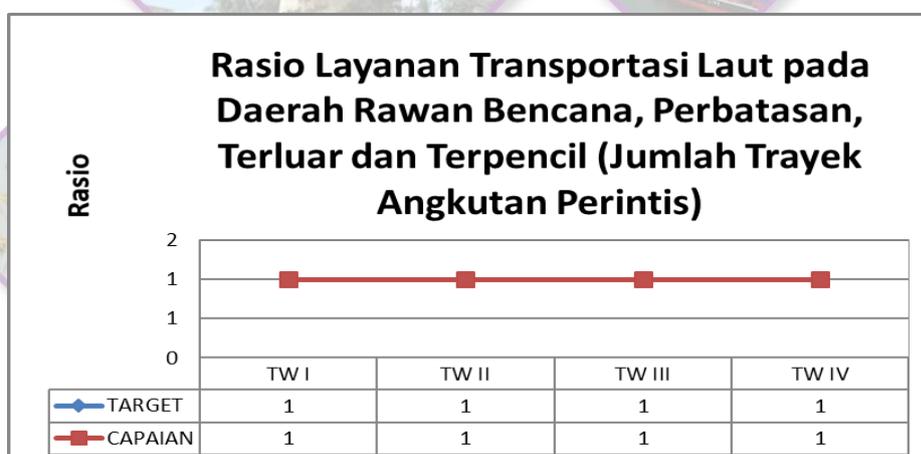
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.18 Rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio	1	1	1	1	1	1	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target Tahun 2019 sebesar 1 (satu) Rasio. Capaian triwulan I sampai dengan triwulan IV terdapat realisasi sebesar 1 (satu) Rasio, sehingga prosentase terhadap target sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.1.18

Rasio Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil





Rasio Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil diukur melalui jumlah layanan transportasi laut di wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil terhadap jumlah wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, atau dengan rumus :

$$\text{Rasio Layanan} = \frac{\sum \text{layanan transportasi laut di wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil}}{\sum \text{wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil}}$$

$$\text{Rasio Layanan} = \frac{83 \text{ trayek}}{83 \text{ wilayah}} = 1$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Jumlah wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil sebanyak 83 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah layanan transportasi laut di wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil terdapat di 83 kabupaten/kota. Berdasarkan data tersebut Rasio Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil sampai dengan triwulan IV terealisasi 1 (satu) rasio sehingga capaian terhadap target sebesar 100%.

IKU No. 18: Rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil (Jumlah Trayek Angkutan Perintis)

Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 0,68 Nilai sehingga persentasenya sebesar 100%. Capaian Kinerja tidak bisa dibandingkan dengan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016 dikarenakan pada tahun tersebut belum terdapat IKU Rasio Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil Transportasi Laut. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menggunakan IKU baru sesuai dengan Reviu PK. Sedangkan pada Tahun 2019 target sebesar 1 Rasio dan Realisasi sebesar 1 Rasio sehingga presentase sebesar 100% sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel III.1.62

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 18 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 18	SATUAN 2017 - 2018	SATUAN 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil (Jumlah Trayek Angkutan Perintis)	Nilai	Rasio	Target	-	-	0,68	0,68	1
			Realisasi	-	-	0,68	0,68	1
			Kinerja (%)	-	-	100	100	100

IKU no 18 : rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil (Jumlah Trayek Angkutan Perintis)

Realisasi Tahun 2019 sebesar 1 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 telah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 1. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.63
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 18 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 18	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio Layanan Transportasi Laut pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio	1	1	100



SASARAN STRATEGIS (10)

Sasaran strategis **Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Maritim** terdiri dari 1(satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

19) Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim.

Tabel III.1.64

Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.19	Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim	Nilai	1	1	1	1	1	1	100

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebanyak 1 (satu) Rasio dan terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV realisasi mencapai 1 (satu), sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

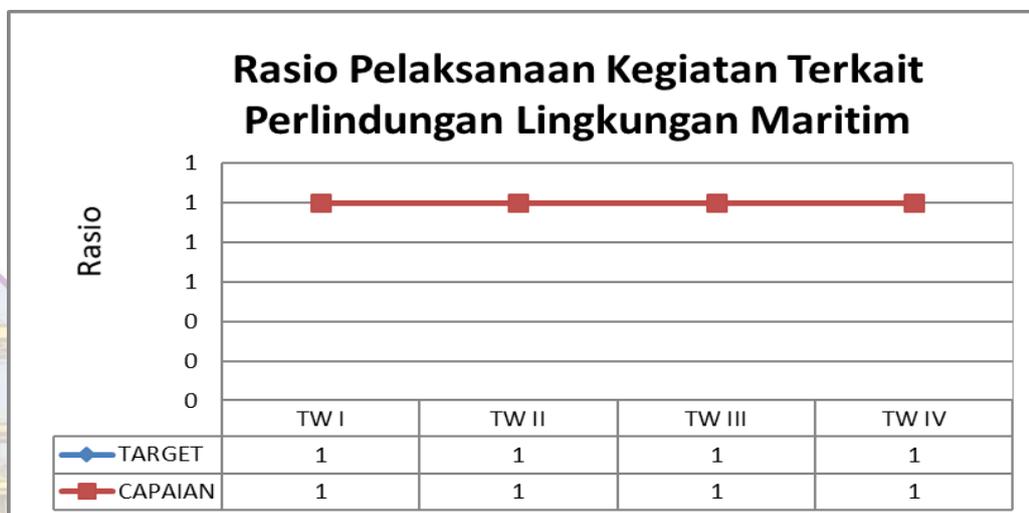
Rasio Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Linmar

$$= \frac{\sum \text{Kegiatan internasional terkait perlindungan linmar yang telah diikuti}}{\sum \text{Target kegiatan internasional terkait linmar yang akan diikuti pada 2019}}$$

$$\text{Rasio} = \frac{10}{10} = 1$$



Grafik III.1.19
Jumlah Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim



Dalam pelaksanaannya terdapat 10 (sepuluh) Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim diantaranya adalah :

- a. The 37th Meeting Of The ASEAN Maritime Transport Working Group yang dilaksanakan di Singapura pada tanggal 4 s.d. 8 Maret 2019;
- b. *Inception Workshop* dan 1st Meeting Of The Global Project Task Force Of The GEF – UNDP – IMO GloFouling Pathnership Project pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2019 di London, Inggris;
- c. 1st Marine Pollution Committee Indonesia-Australia and Transport Safety Forum (TSF) 2019 pada tanggal 27 s.d. 28 Maret di Bali;
- d. IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke 74 pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2019 di London, Inggris;
- e. *Regional Workshop on Ratification and Effective Implementation of MARPOL ANNEX VI* dan *IMO Data Collection for Fuel Consumption* pada tanggal 25 Juni 2019 di Thailand;
- f. Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak Di Laut (*Marpolex*) antara Indonesia, Phillipine, Jepang di Phillipine 1 s.d. 5 Juli 2019;
- g. *38th Meeting Of The Asean Maritime Transport Working Group Asean Maritime Working Group (MTWG)* pada tanggal 20 s.d. 24 Agustus 2019 di Singapura;
- h. *1st IMO-Glofouling Research and Development Forum on Biofouling Management and 4th ANZPAC Workshop on Biofouling Management for Sustainable Shipping* pada tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2019 di Melbourne, Australia;



- i. *Focus Group Discussion (FGD)* Pusat Komando Pengendalian Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PUSKODALNAS) pada tanggal 12 s.d. 13 Nopember 2019 di RedTop Jakarta;
- j. *The 3rd Expert Group Meeting on Green Ships Meeting* pada tanggal 28 s.d. 29 Nopember di Jepang.

IKU No. 19: Rasio pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan lingkungan maritim

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 5 Laporan dengan Realisasi kinerja sebesar 6 Laporan sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 120%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 4 Laporan dengan realisasi kinerja sebesar 4 Laporan sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100 %. Pada tahun 2017 dari target 8 Laporan dapat tercapai sebesar 8 Laporan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2018 dari target 1 dapat tercapai sebesar 1 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 1 dapat tercapai sebesar 1 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan satuan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.65
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 19 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 19	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018	SATUAN 2019	KRITERIA	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim	Laporan	Nilai	Rasio	Target	5	4	8	1	1
				Realisasi	6	4	8	1	1
				Kinerja (%)	120	100	100	100	100

IKU no 19 : rasio Pelaksanaan Kegiatan terkait Perlindungan Lingkungan Maritim

Realisasi Tahun 2019 sebesar 0,68 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 0,80. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 147%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel III.1.66

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 19 dengan Target Renstra Tahun 2019.

IKU 19	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim	Rasio	0,68	1	147

19) Persentase prasarana yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (SBNP solar cell).

Tabel III.1.67

Persentase Prasarana Yang Telah Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan (SBNP solar cell).

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.20 Persentase Prasarana Yang Telah Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan (SBNP solar cell)	%	89.60	89.30	89.31	89.44	89.59	89.59	99.99

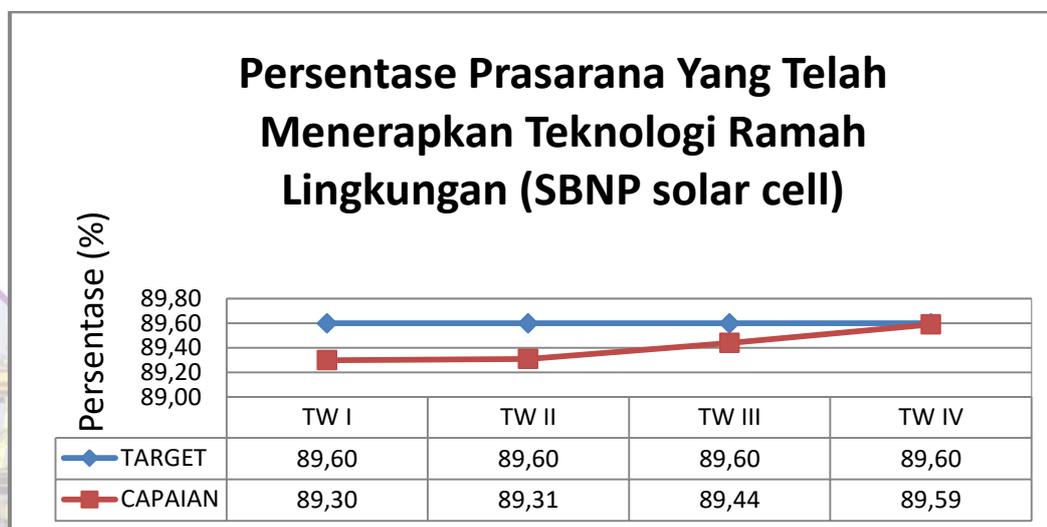
Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 89,60%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 89,30%. Pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 89,31% sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 89,44% dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 89,59% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 99,99% dikarenakan pembangunan Rambu Suar di Lokasi Tual dan Palembang tidak selesai 100% (putus kontrak).



Grafik III.1.20

Jumlah Prasarana yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan



Pada tahun 2019 jumlah pembangunan SBNP yang terbangun sebanyak 79 unit, dan setelah di akumulasikan dengan SBNP tahun-tahun sebelumnya berjumlah 2.732 Unit.

$$\text{Persentase SBNP Solar Cell} = \frac{\sum \text{SBNP Solar Cell DJPL}}{\sum \text{SBNP DJPL yang bersuar}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase SBNP Solar Cell} = \frac{2.444}{2.728} \times 100\% = 89,59\%$$

IKU No. 20: Persentase prasarana yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (SBNP Solar Cell)

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 2.475 unit dengan Realisasi kinerja sebesar 2.765 unit sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 111,71%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 2.419 unit dengan realisasi kinerja sebesar 2.419 unit sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 2.460 unit dengan realisasi kinerja sebesar 2.459 unit sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 99,96%. Pada tahun 2018 dari target 89,30% dapat tercapai sebesar 4,98% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 89,28%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 89,60% dapat tercapai sebesar 89,59% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 99,99% dikarenakan pembangunan Rambu Suar di Lokasi Tual dan Palembang tidak selesai 100% (putus kontrak). Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan satuan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel III.1.68

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 20 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 20	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Prasarana Yang Telah Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan (SBNP solar cell)	Unit	%	Target	2.475	2.419	2.460	89,28	89,60
			Realisasi	2.765	2.419	2.459	89,28	89,59
			Kinerja (%)	111,71	100	99,96	99,99	99,99

IKU no 20 : Rasio Pelaksanaan Kegiatan terkait Perlindungan Lingkungan Maritim

Realisasi Tahun 2019 sebesar 89,59 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 84,20. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 106%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.69

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 20 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 20	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Prasarana Yang Telah Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan (SBNP solar cell)	%	84,20	89,59	106

SASARAN STRATEGIS (11)

Sasaran strategis **Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengendalian di Bidang Pelayaran** terdiri dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:



20) Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Keterampilan serta Dokumen Kepelautan Lainnya.

Tabel III.1.70

Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Keterampilan serta Dokumen Kepelautan Lainnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.21 Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian Dan Keterampilan Serta Dokumen Kepelautan Lainnya	Nilai	1	1	1	1	1	1	100

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

Diukur melalui jumlah permohonan Sertifikat Keahlian dan Keterampilan serta Dokumen Kepelautan Lainnya terhadap jumlah Sertifikat Keahlian dan Keterampilan serta Dokumen Kepelautan Lainnya yang telah diterbitkan, atau dengan rumus :

$$Rasio\ Penerbitan\ Sertifikat = \frac{\sum \text{permohonan sertifikat/dokumen kepelautan}}{\sum \text{sertifikat/dokumen kepelautan yang diterbitkan}}$$

$$Rasio\ Penerbitan\ Sertifikat\ Kepelautan = \frac{222.954}{222.954} = 1$$

Adapun target pada tahun 2019 sebesar 1 (satu) Nilai dan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 1 (satu) nilai, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.1.21

Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Keterampilan Serta Dokumen Kepelautan Lainnya





Adapun penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kepelautan lainnya yang terealisasi pada tahun 2019, yaitu:

Tabel III.1.71
Penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kepelautan lainnya yang terealisasi pada tahun 2019

NO	NAMA SERTIFIKAT	JUMLAH
1.	Sertifikat BST	77.504
2.	Sertifikat BST IKAN	82.261
3.	Sertifikat ANT I	2.375
4.	Sertifikat ANT II	2.269
5.	Sertifikat ANT III MANAGEMEN	1.911
6.	Sertifikat ANT III	3.587
7.	Sertifikat ANT IV MANAGEMEN	2.732
8.	Sertifikat ANT IV	3.588
9.	Sertifikat ANT V MANAGEMEN	1.195
10.	Sertifikat ANT V	2.503
11.	Sertifikat RFN	6.072
12.	Sertifikat RAD	4.075
13.	Sertifikat ATT I	1.799
14.	Sertifikat ATT II	1.642
15.	Sertifikat ATT III MANAGEMEN	1.978
16.	Sertifikat ATT III	3.268
17.	Sertifikat ATT IV MANAGEMEN	2.157
18.	Sertifikat ATT IV	2.853
19.	Sertifikat ATT V MANAGEMEN	1.050
20.	Sertifikat ATT V	1.808
21.	Sertifikat RFE	3.149



NO	NAMA SERTIFIKAT	JUMLAH
22.	Sertifikat RAE	2.429
23.	Sertifikat ANKAPIN-I	292
24.	Sertifikat ANKAPIN-II	1.103
25.	Sertifikat ANKAPIN-III	2.796
26.	Sertifikat ATKAPIN-I	178
27.	Sertifikat ATKAPIN-II	693
28.	Sertifikat ATKAPIN-III	1.807
29.	Dokumen Pengawakan	3.754
30	Pengesahan program Lembaga Diklat Kapelautan	156
TOTAL		222.954

IKU No. 23: Rasio penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kapelautan lainnya

Pada tahun 2018 dari target 1 dapat tercapai sebesar 1 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 1 dapat tercapai sebesar 1 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun karena pada tahun sebelumnya IKU tersebut belum terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat dijelaskan pada table berikut:

Tabel III.1. 72

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 21 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 21	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018	SATUAN 2019	KRITERIA	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian Dan Keterampilan Serta Dokumen Kapelautan Lainnya	-	Nilai	Rasio	Target	-	-	-	1	1
				Realisasi	-	-	-	1	1
				Kinerja (%)	-	-	-	100	100



IKU no 21 : Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Keterampilan serta Dokumen Kepelautan Lainnya

Realisasi Tahun 2019 sebesar 1 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 1. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1. 73
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 21 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 21	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian Dan Keterampilan Serta Dokumen Kepelautan Lainnya	Rasio	1	1	100

21) Rasio Penerbitan Sertifikat/Surat/Akta/ Dokumen Kelaiklautan Kapal.

Tabel III.1.74
Rasio Penerbitan Sertifikat/Surat/Akta/ Dokumen Kelaiklautan Kapal

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.22 Rasio Penerbitan Sertifikat/Surat/Akta/ Dokumen Kelaiklautan Kapal	Nilai	1.00	1	1	1	0.996	0.996	99,60

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Diukur melalui jumlah permohonan Sertifikat /Surat/ Akta/ Dokumen Kelaiklautan Kapal terhadap jumlah Sertifikat /Surat/ Akta/ Dokumen Kelaiklautan Kapal yang telah diterbitkan, atau dengan rumus.

$$Rasio\ Penerbitan\ Dokumen = \frac{\sum \text{permohonan dokumen kelaiklautan kapal}}{\sum \text{dokumen kelaiklautan kapal yang diterbitkan}}$$

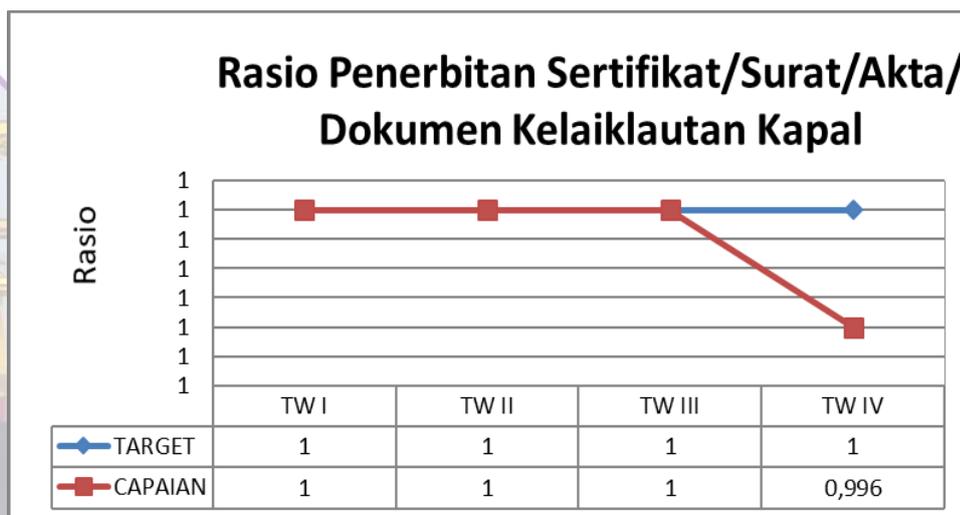
$$Rasio\ Penerbitan\ Dokumen\ Kelaiklautan\ Kapal = \frac{9393}{9431} = 0,996$$



Adapun sesuai dengan target pada tahun 2019 sebesar 1 (satu) Nilai, pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1 (satu) nilai sampai dengan Triwulan III terealisasi sebesar 1 (satu) nilai, dan pada triwulan IV teralisasi 0,996 nilai, sehingga prosentase pencapaian masih sebesar 99,60%. Dikarenakan terdapat dokumen layanan dalam proses pemeriksaan tidak dapat diterbitkan pada tahun 2019.

Grafik III.1.22

Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian Dan Keterampilan Serta Dokumen Kepelautan Lainnya



Adapun penerbitan sertifikat/ surat/ akta/ dokumen kelaiklautan kapal yang terealisasi pada tahun 2019, yaitu:

Tabel. III.1.75

Penerbitan Sertifikat/ Surat/ Akta/ Dokumen Kelaiklautan Kapal

NO	NAMA SERTIFIKAT	JUMLAH
1.	Jumlah Tonnage Certificate (Surat Ukur)	65
2.	Jumlah Sertifikat Keselamatan Kapal	3.140
3.	Jumlah Sertifikat Garis Muat Kapal	223
4.	Jumlah Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	1.423
5.	Jumlah Surat Tanda Kebangsaan Kapal	1.891
6.	Jumlah Akta (Pendaftaran, Baliknama dan Hipotek)	568
7.	Jumlah Surat Tanda Panggilan Kapal (<i>Call Sign</i>)	1.537
8.	Daftar Riwayat Kapal (<i>Continous Synopsis Record</i>)	194
9.	Jumlah Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>)	344
10.	Jumlah Dokumentasi Otorisasi Kapal yang mengangkut Biji-bijian	8
TOTAL		9.393



IKU No. 22 : Rasio penerbitan sertifikat/surat/akta/dokumen kelaiklautan kapal

Pada tahun 2018 dari target 1 dapat tercapai sebesar 1 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 1 dapat tercapai sebesar 1 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun karena pada tahun sebelumnya IKU tersebut belum terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.76
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 22 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 22	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018	SATUAN 2019	KRITERIA	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
Rasio penerbitan sertifikat/surat/akta/dokumen kelaiklautan kapal	-	NILAI	RASIO	Target	-	-	-	1	1
				Realisasi	-	-	-	1	0,996
				Kinerja (%)	-	-	-	100	99,60

IKU no 22 : Rasio Penerbitan Sertifikat/Surat/Akta/Dokumen Kelautan Kapal

Realisasi Tahun 2019 sebesar 0,996 Rasio menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 1 Rasio. Dikarenakan terdapat dokumen layanan dalam proses pemeriksaan tidak dapat diterbitkan pada tahun 2019, Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 99,60%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.77
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 22 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 22	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio penerbitan sertifikat/surat/akta / dokumen kelaiklautan kapal	RASIO	1	0,996	99,60



22) Rasio Penerbitan Sertifikat di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Tabel. III.1.78

Rasio Penerbitan Sertifikat di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.23 Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim	Rasio	1	1	1	1	0,997	0,997	99,70

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Diukur melalui jumlah permohonan Sertifikat Perlindungan Lingkungan Maritim terhadap jumlah Sertifikat Perlindungan Lingkungan Maritim yang telah diterbitkan, atau dengan rumus:

$$\text{Rasio Penerbitan Sertifikat} = \frac{\sum \text{permohonan Sertifikat Linmar}}{\sum \text{Sertifikat Linmar yang diterbitkan}}$$

$$\text{Rasio Penerbitan Sertifikat} = \frac{20.874}{20.947} = 0.997$$

Adapun sesuai dengan target pada tahun 2019 sebesar 1 (satu) Nilai. Pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1 (satu) Nilai, pada Triwulan II terealisasi sebesar 1 (satu) Nilai dan pada Triwulan III terealisasi sebesar 1 (satu) nilai, sedangkan pada Trwiulan IV terdapat realisasi sebesar 0,997 Rasio, Hal ini dikarenakan terdapat Layanan Sertifikat yang sedang dalam proses pemeriksaan lapangan atau audit sehingga tidak dapat diterbitkan pada tahun 2019. sehingga prosentase pencapaian sebesar 99,70% dan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Grafik III.1.23

Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim



Tabel. III.1.79

Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim

No	Jenis Sertifikat	Total	Sub Total
1.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	3.610	20.874
2.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC)	1.501	
3.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	5.760	
4.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Untuk Pengangkutan Bahan Cair Beracun Dalam Bentuk Curah (NLS)	14	
5.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	4.943	
6.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	44	
7.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	281	
8.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP)	310	
9.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	248	
10.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	134	
11.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP)	19	
12.	Ship Recycling	4	
13.	Ballast Water Management (BWM)	340	
14.	Attestation Removal Of Wrecks 2007	3.631	
15.	Tank Cleaning	8	



IKU No. 23: Rasio penerbitan sertifikat di bidang perlindungan lingkungan maritim

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 4.100 sertifikat dengan Realisasi kinerja sebesar 7.418 sertifikat sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 180,93 %. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 7.100 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 7.300 sertifikat sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100,42 %. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 7.000 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 9.957 sertifikat sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 105,93 %. Pada tahun 2018 dari target 1 Nilai dapat tercapai sebesar 1 Nilai dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 1 Rasio dapat tercapai sebesar 0.997 Rasio dengan prosentase capaian kinerja sebesar 99.70%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan satuan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.80

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 23 dengan Target Kinerja 2015 -2019

IKU 23	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018	SATUAN 2019	KRITERIA	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim	SERTIFIKAT	NILAI	RASIO	Target	4.100	7.100	7.000	1	1
				Realisasi	7.418	7.130	9.957	1	0,997
				Kinerja (%)	180,93	100,42	105,93	100	99,70

IKU no 23 : Rasio Penerbitan Sertifikat di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim

Realisasi Tahun 2019 sebesar 0,997 rasio menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 1,00. Hal ini dikarenakan terdapat Layanan Sertifikat yang sedang dalam proses pemeriksaan lapangan atau audit sehingga tidak dapat diterbitkan pada tahun 2019. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 99.70%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel III.1. 81

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 22 dengan Target Kinerja 2019

IKU 23	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim	RASIO	1	0.997	99.70

23) Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai).

Tabel. III.1.82

Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai).

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.24 Rasio Penerbitan Perizinan/ Rekomendasi Di Bidang Pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	Nilai	1.00	1	1	1	1	1	100

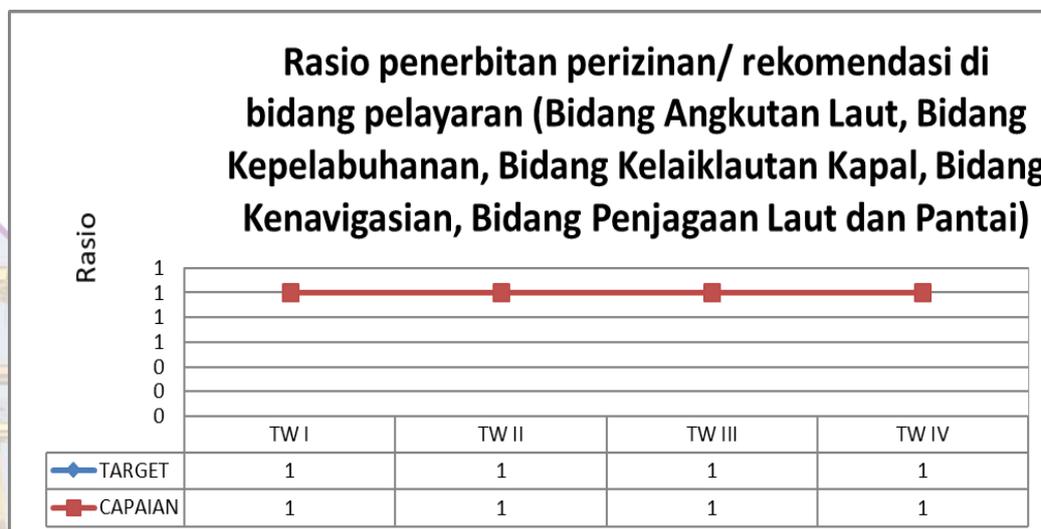
Sumber data : Direktorat Para Direktorat, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target pada tahun 2019 sebesar 1 (satu) Nilai dan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 1(satu) Nilai sehingga prosentase pencapaian masih sebesar 100% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Grafik 3.1.24

Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi dibidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut Pantai)



Adapun Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai) sebagai berikut :

1. Surat Ijin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), total penerbitan selama per Desember tahun 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) surat;
2. Surat Ijin Pekerjaan Bawah Air (PBA);
3. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);

Target validasi SIUPAL dan SIOPSUS Tahun 2019 sebanyak 1.150 perusahaan, sampai dengan bulan November sudah tercapai 1.104 perusahaan sehingga prosentase sebesar 96%.

4. Ijin Tersus;
5. Ijin SBNP.



IKU No. 24 : Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)

Pada tahun 2018 dari target 1 Nilai dapat tercapai sebesar 1 Nilai dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun karena pada tahun sebelumnya IKU tersebut belum terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.83

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 24 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 24	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018	SATUAN 2019	KRITERIA	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penerbitan Perizinan/ Rekomendasi Di Bidang Pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)		NILAI	RASIO	Target	-	-	-	1.00	1
				Realisasi	-	-	-	1.00	1
				Kinerja (%)	-	-	-	100	100

IKU no 24 : Rasio Penerbitan Perizinan/Rekomendasi di Bidang Pelayaran(Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, BidangKelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)

Realisasi Tahun 2019 sebesar 1,00 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 telah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 1,00. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel III.1.84

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 24 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 24	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Rasio Penerbitan Perizinan/ Rekomendasi Di Bidang Pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	NILAI	1,00	1,00	100

SASARAN STRATEGIS (12)

Sasaran strategis **Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Kompeten Dan Professional** terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 24) **Persentase peningkatan jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat.**

Tabel. III.1.85

Persentase Peningkatan Jumlah SDM Aparatur Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Bersertifikat

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.25 Persentase Peningkatan Jumlah SDM Aparatur Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	%	90	83,53	88,24	95,07	96,40	96,40	107,11

Sumber data : Bagian Kepegawaian, Ditjen. Perhubungan Laut.



Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) orang, Triwulan II realisasi 7.942 (tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua) orang, Triwulan III realisasi 8.556 (delapan ribu lima ratus lima puluh enam) orang, Triwulan IV realisasi 8. 676 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) orang, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 107.11% melebihi target yang ditetapkan di awal yaitu 90% melebihi target yang ditetapkan di awal yaitu 90% dari ASN 7.290 orang:

Baseline 2018 : 6.899
Realisasi th 2019 : 1.777
 Kumulatif s.d 2019 : 8.676

Tabel III.1.86

Perhitungan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

	TW I	TW II	TW III	TW IV
TARGET (90% x 8.100)	7.290	7.290	7.290	7.290
CAPAIAN	7.518	7.942	8.556	8.676

Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2019 jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis) sebanyak 8. 676 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) orang dan khusus di tahun anggaran 2019 realisasi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis) sebanyak 1.777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) orang yang terdiri dari:

Tabel II.1.87

Rincian Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1	Penanganan Muatan Berbahaya Angkata I	30
2	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal I	30
3	Pengukuran Kapal I	30
4	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran I	30



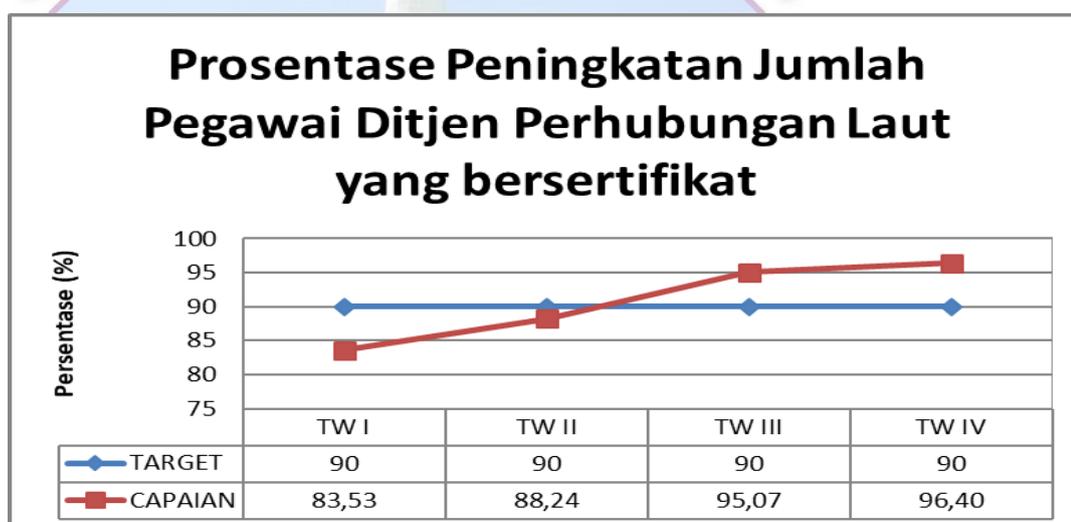
NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
5	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran II	30
6	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal II	30
7	Penanganan Muatan Barang Berbahaya II	30
8	Penanggulangan Pencemaran Tingkat I	26
9	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran III	30
10	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran IV	30
11	Pencegahan Pencemaran I	30
12	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran V	30
13	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran VI	30
14	ISPS Code I	30
15	Maritime English I	30
16	Teknis Terpadu Bidang Perhubungan Laut I	28
17	Penyelenggara Pelabuhan dan Otoritas I	23
18	Auditor ISM Code I	26
19	SBNPTingkat Dasar I	30
20	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran VII	30
21	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran VIII	29
22	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran IX	30
23	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran X	30
24	Pencegahan Pencemaran II	30
25	Kesyahbandaran klas B I	30
26	Dasar Bintara KPLP I	30
27	ISPS Code II	30
28	VTS (Operator) I	30
29	Sea And Coast Guard I	29
30	Maritime English II	27
31	Teknis Terpadu Bidang Perhubungan Laut II	23
32	ISPS Code III	25
33	Penanggulangan Pencemaran Tingkat I	28
34	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal II	29
35	Maritime English III	30
36	Pengukuran Kapal III	30
37	VTS (Operator) II	31
38	Pengukuran Kapal III	30
39	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XI	30
40	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XII	30
41	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal IV	30
42	Port State Control (PSC) I	30
43	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XIII	30



NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
44	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XIV	30
45	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XV	30
46	Maritime English IV	30
47	Penanganan Muatan Barang Berbahaya III	30
48	Penanganan Muatan Barang Berbahaya IV	30
49	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XVI	30
50	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XVII	30
51	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran XVIII	30
52	Port Management	30
53	Basic Safety Training	60
54	TOT 6.09	29
55	TOE 3.12	30
56	Bendahara Pengeluaran	15
57	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran XIX	30
58	Pencegahan Pencemaran III	30
59	Maritime English V	30
60	Penanganan Muatan Barang Berbahaya V	30
JUMLAH		1.777

Grafik III.1.25

Persentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Bersertifikat





IKU No. 25 : Persentase peningkatan jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 3.870 orang dengan Realisasi kinerja sebesar 954 orang sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 24,65 %. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 3.511 orang dengan realisasi kinerja sebesar 3.429 orang sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 97,66 %. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 4.621 orang dengan realisasi kinerja sebesar 4.782 orang sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 103,4%. Pada tahun 2018 dari target 86,81% dapat tercapai sebesar 98,96% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 123,70%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 90% dapat tercapai sebesar 96,40% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 107,11%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan pada satuan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.88
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 25 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 25	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 – 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Peningkatan Jumlah SDM Aparatur Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	ORANG	%	Target	3.870	3.511	4.621	86,81	90
			Realisasi	954	3.429	4.782	98,96	96,40
			Kinerja (%)	24,65	97.66	103,4	123,70	107,11

IKU no 25 : Persentase Peningkatan Jumlah SDM Aparatur Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Bersertifikat

Realisasi Tahun 2019 sebesar 96,40% menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 belum sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100%. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 96,40%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel III.1.89

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 25 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 25	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Peningkatan Jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	%	100	96,40	96,40

SASARAN STRATEGIS (13)

Sasaran strategis **Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** terdiri dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

25) Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel. III.1.90

Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.26 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target pada tahun 2019 sebesar 100% pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 100% (sistem informasi melalui portal hubla.dephub.go.id dapat di akses 24 jam). Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dilaksanakan kegiatan integrasi layanan perijinan Sistem Informasi Perhubungan Laut (SIHUBLA), pengembangan portal (*Website*) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pembangunan Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Elektronik (SIRANI).



Grafik III.1.26
Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Persentase kehandalan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melakukan survey yang ditayangkan melalui *Pop up* di portal Perhubungan Laut terhadap kurang lebih 205 (dua ratus lima) pengunjung pada kurun waktu tertentu, dengan skala likert yang menanyakan apakah sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan laut sudah handal? (sangat handal, handal, cukup handal, tidak handal, sangat tidak handal) dengan tabel poin sebagai berikut;

Tabel. III.1.91
Tabel Skala Likert

Skala Likert	Poin
Sangat puas	5
Puas	4
Cukup puas	3
Tidak puas	2
Sangat tidak puas	1



Tabel. III.1.92
Tabel Skala Likert

Jawaban	Keterangan
0 % - 20 %	Sangat tidak handal
21 % - 40 %	Tidak handal
41 % - 60 %	Cukup handal
61 % - 80 %	Handal
81 % - 100 %	Sangat handal

Hasil jawaban dari 205 (dua ratus lima) responden sebagai berikut:

- 37 responden menjawab sangat puas;
- 136 responden menjawab puas;
- 28 responden menjawab cukup puas;
- 4 responden menjawab tidak puas;
- 0 responden menjawab sangat tidak puas;

Dari data yang didapat di atas kemudian diolah dengan cara mengalikan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan dengan table bobot nilai, maka hasil penghitungan jawaban responden sebagai berikut:

- Responden yang menjawab sangat puas (5) = $37 \times 5 = 185$
- Responden yang menjawab puas (4) = $136 \times 4 = 544$
- Responden yang menjawab cukup puas (3) = $28 \times 3 = 84$
- Responden yang menjawab tidak puas (2) = $4 \times 2 = 8$
- Responden yang menjawab sangat tidak puas (1) = $0 \times 0 = 0$

Interpretasi Skor Perhitungan

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:

$Y = \text{skor tertinggi likert} \times \text{jumlah responden};$

$X = \text{skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}.$



Jumlah skor tertinggi untuk item “sangat puas” adalah $5 \times 185 = 925$, sedangkan item “sangat tidak puas” adalah $1 \times 0 = 0$. Jadi jika total skor responden di peroleh angka 205, maka penilaian interpretasi responden terhadap kehandalan system informasi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus index %.

$$\text{Rumus Index \%} = \text{Total Skor} / Y \times 100$$

Maka penyelesaian akhir dari contoh kasus :

$$= \text{Total Skor} / Y \times 100$$

$$= 925/925 \times 100$$

$$= 100\% = 100\% \text{ Kategori } \mathbf{SANGAT\ HANDAL}$$

IKU No. 26 : Persentase kehandalan system informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada tahun 2018 dari target 80% dapat tercapai sebesar 80% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun karena pada tahun sebelumnya IKU tersebut belum terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.93

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 26 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 26	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2109	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	-	%	Target	-	-	-	80	100
			Realisasi	-	-	-	80	100
			Kinerja (%)	-	-	-	100	100

IKU no 26 : Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Realisasi Tahun 2018 sebesar 100 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 melebihi target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 100. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 125%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel III.1.94

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 26 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 26	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Keandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	80	100	125

26) Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5).

Tabel. III.1.95

Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5).

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.27 Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5)	Nilai	4	0	0	0	4	4	100

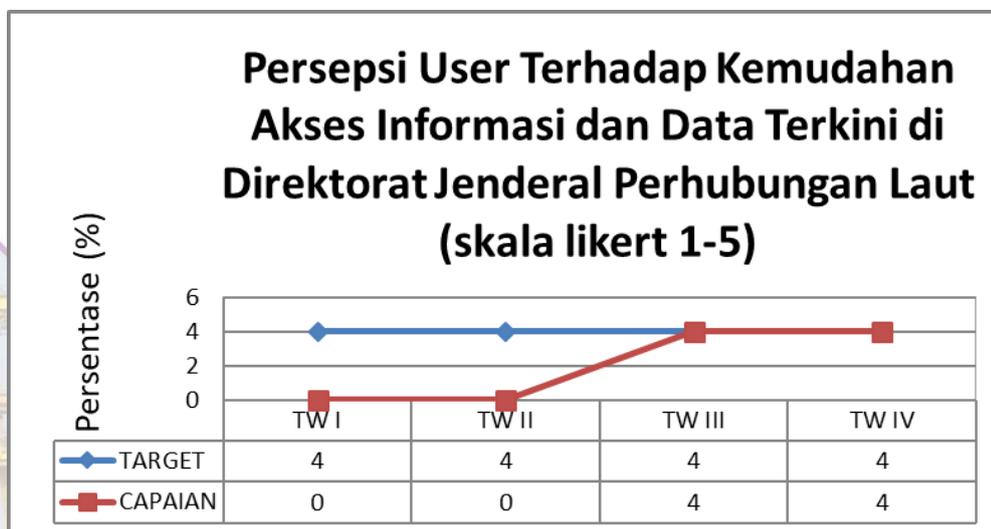
Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas, Ditjen. Perhubungan Laut

Sesuai dengan target pada tahun 2019 sebesar 4 (Empat) Nilai dan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi 0 (nol) dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 3,8% sehingga prosentasi kinerja sebesar 95% dikarenakan penilaian terhadap persepsi user dilaksanakan pada akhir tahun 2019.



Grafik III.1.27

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5)



Persentase Persepsi user terhadap Kemudahan Akses Informasi sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melakukan survey yang ditayangkan melalui Pop up di portal Perhubungan Laut terhadap kurang lebih 205 (dua ratus lima) pengunjung pada kurun waktu tertentu, dengan skala likert yang menanyakan apakah sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan laut sudah handal? (sangat handal, handal, cukup handal, tidak handal, sangat tidak handal) dengan tabel poin sebagai berikut:

Tabel. III.1.96
Tabel Skala Likert

Skala Likert	Poin
Sangat puas	5
Puas	4
Cukup puas	3
Tidak puas	2
Sangat tidak puas	1



Hasil jawaban dari 205 (dua ratus lima) responden sebagai berikut :

- a) 37 responden menjawab sangat puas;
- b) 136 responden menjawab puas;
- c) 28 responden menjawab cukup puas;
- d) 4 responden menjawab tidak puas;
- e) 0 responden menjawab sangat tidak puas.

Dari data yang didapat di atas kemudian diolah dengan dengan cara mengalikan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan dengan tabel bobot nilai, maka hasil penghitungan jawaban responden sebagai berikut:

- f) Responden yang menjawab sangat puas (5) = $37 \times 5 = 185$
- g) Responden yang menjawab puas (4) = $136 \times 4 = 544$
- h) Responden yang menjawab cukup puas (3) = $28 \times 3 = 84$
- i) Responden yang menjawab tidak puas (2) = $4 \times 2 = 8$
- Responden yang menjawab sangat tidak puas (1) = $0 \times 0 = 0$

Total skor = $185 + 544 + 84 + 8 + 0 = 821$

Dari total skor 821 dibagi 205 responden sehingga mendapatkan rata rata nilai 4 yang berarti puas.

IKU No. 27 : Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada tahun 2018 dari target 4 dapat tercapai sebesar 4 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 4 dapat tercapai sebesar 4 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun karena pada tahun sebelumnya IKU tersebut belum terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel III.1.97

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 27 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 27	SATUAN 2015 - 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5)	-	NILAI	Target	-	-	-	4	4
			Realisasi	-	-	-	4	4
			Kinerja (%)	-	-	-	100	100

IKU no 27 : Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Realisasi Tahun 2019 sebesar 4 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 telah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 4. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan dalam

Tabel III.1.98

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 27 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 27	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5)	NILAI	4	4	100



SASARAN STRATEGIS (14)

Sasaran strategis **Terwujudnya good governance and clean government** di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

27) Tingkat Kualitas Akuntabiliitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel. III.1.99

Tingkat Kualitas Akuntabiliitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.28 Tingkat Kualitas Akuntabiliitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP	87.00	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Bagian Perencanaan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 87.00 dan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi , sedangkan pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat nilai AKIP sebesar 0 sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 0%, karena masih menunggu evaluasi dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Laut.

Grafik 3.1.28

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)





Tabel III.1.100

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

No	Komponen	Nilai Per Komponen
1.	Perencanaan kinerja (30%)	
2.	Pengukuran kinerja (25%)	
3.	Pelaporan kinerja (15%)	
4.	Evaluasi internal (10%)	
5.	Pencapaian kinerja (20%)	
NILAI TOTAL		
KATEGORI		

IKU No. 28 : *Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut*

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 86,24 Nilai dengan Realisasi kinerja sebesar 88,77 Nilai sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 102,93%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 81,87 Nilai dengan realisasi kinerja sebesar 81,87 Nilai sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 82,01 Nilai dengan realisasi kinerja sebesar 82,01 Nilai sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2018 dari target 82,50% dapat tercapai sebesar 83,73 Nilai dengan prosentase capaian kinerja sebesar 101%. Pada tahun 2019 dari target 87,00% dapat tercapai sebesar ... Nilai dengan prosentase capaian kinerja sebesar ...% karena masih menunggu evaluasi dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Laut. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.101

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 28 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 28	SATUAN 2015 – 2017	SATUAN 2018 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	-	NILAI AKIP	Target	86,24	81,87	82,01	82,50	87,00
			Realisasi	88,77	81,87	82,01	83,73	
			Kinerja (%)	102,93	100	100	101	



IKU no 28 : Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Realisasi Tahun 2019 sebesar ... menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 kurang dari target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 85. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar% karena masih menunggu evaluasi dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Laut. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.102

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 30 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 28	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	NILAI AKIP	85

28) Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun.

Tabel. III.1.103

Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.29	Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun	Dokumen	5	5	5	5	5	5	100

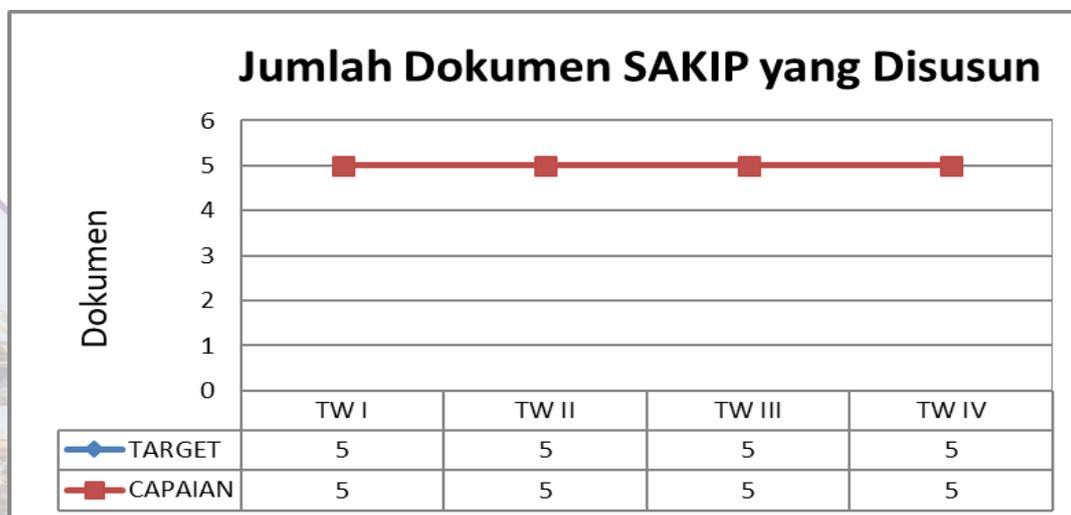
Sumber data : Bagian Perencanaan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 5 (Lima) Dokumen terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 5 (lima) Dokumen, sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 100%, dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan.



Grafik III.1.29

Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun



Adapun Dokumen SAKIP yang telah disusun yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019;
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019;
4. Rencana Aksi (Renaksi) Atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019;
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.

IKU No. 29 : Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 6 Dokumen dengan Realisasi kinerja sebesar 6 Dokumen sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 100 %. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 4 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 4 Dokumen sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 4 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 4 Dokumen sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100%. Pada tahun 2018 dari target 5 Dokumen dapat tercapai sebesar 5 Dokumen dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2019 dari target 5 Dokumen dapat tercapai sebesar 5 Dokumen dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan pada table berikut:



Tabel III.1.104

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 29 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 29	SATUAN 2015 – 2019	KRITERIA	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun	DOKUMEN	Target	6	4	4	5	5
		Realisasi	6	4	4	5	5
		Kinerja (%)	100	100	100	100	100

IKU no 29 : Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun

Realisasi Tahun 2019 sebesar 5 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 telah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu 5. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.105

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 29 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 29	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun	DOKUMEN	5	5	100

SASARAN STRATEGIS (15)

Sasaran strategis **Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang optimal** terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:



29) Persentase penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel. III.1.106

Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

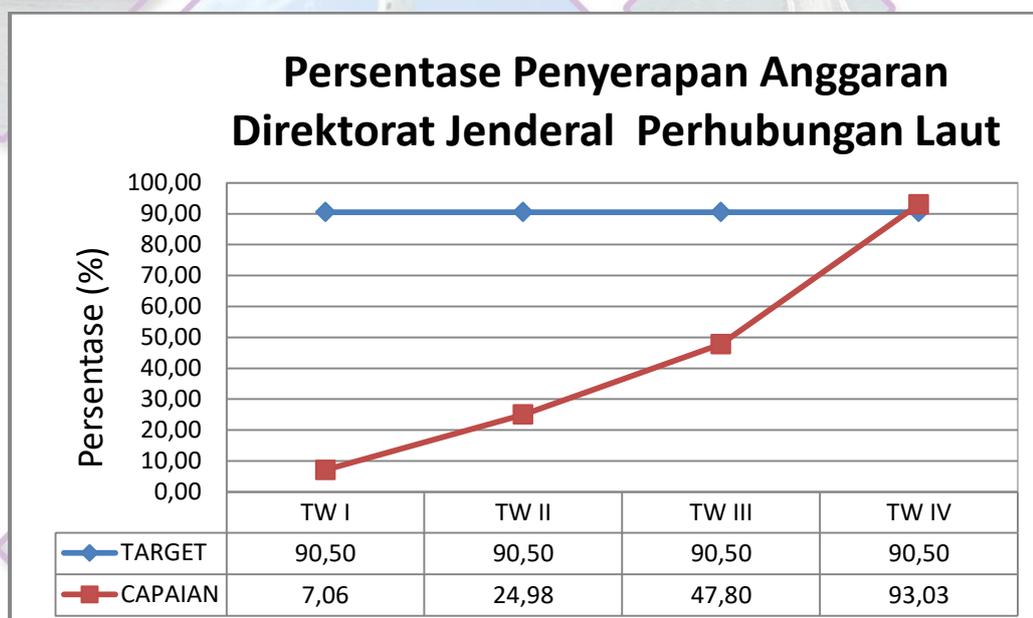
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.30 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal PerhubunganLaut	%	90,50	7.06	24,98	47.80	93,03	93,03	103

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 90,50% dan terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 7.06%. Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar 24,98%. Pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 47.80%. Pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 93,03% sehingga prosentase pencapaian sebesar 103%.

Grafik III.1.30

Prosentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan laut





IKU No. 30 : Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar 87,14% dengan Realisasi kinerja sebesar 63,37% sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 72,72%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 80% dengan realisasi kinerja sebesar 74,18% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 92,72 %. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar 80% dengan realisasi kinerja sebesar 89,92% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 112,40 %. Pada tahun 2018 dari target 90% dapat tercapai sebesar 79,74% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 88,60%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 90,50% dapat tercapai sebesar 93,03% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 103%. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.107

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 30 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 30	SATUAN 2015 – 2019	KRITERIA	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	Target	87,14	80	80	90	90,50
		Realisasi	63,37	74,18	89,92	79,74	93,03
		Kinerja (%)	72,72	92,72	112,40	88,60	103

Tabel III.1.108

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 30 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 30	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	93,03	93,03



Tabel III.1.109

30) Nilai Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

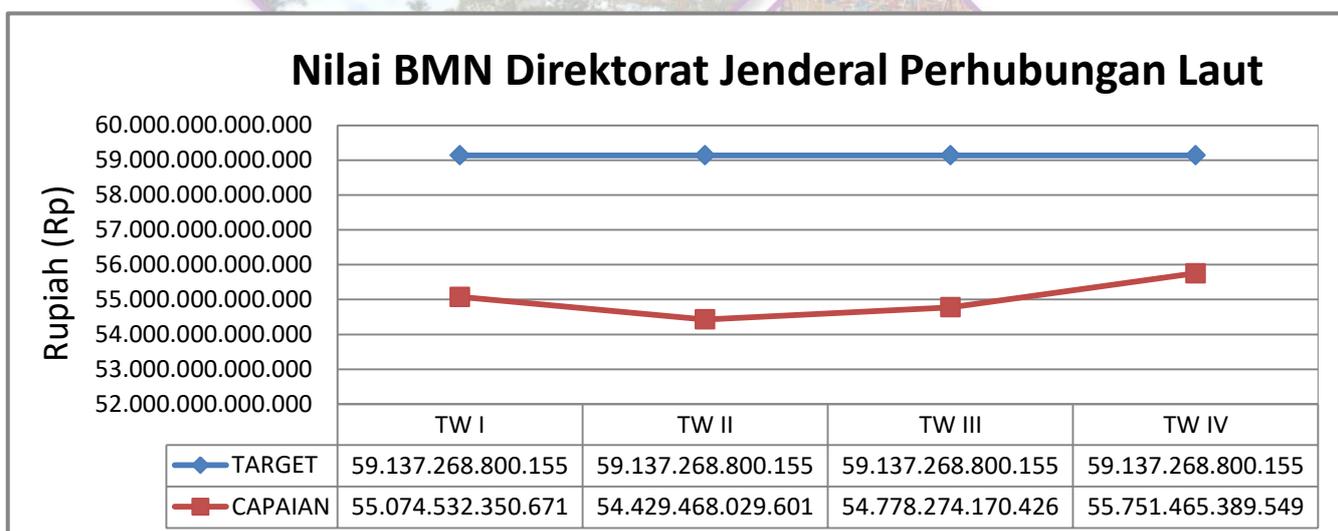
INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.31	Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	59,137,268,800,155	55,074,532,350,671	54,429,468,029,601	54,778,274,170,426	55,751,465,389,549	65,389,549	94,27

Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Sesuai dengan target tahun 2019 sebesar Rp. 59,137,268,800,155 terlihat pada Triwulan I terdapat Realisasi sebesar Rp. 55,074,532,350,671. Pada Triwulan II Terdapat Realisasi Sebesar Rp. 54,429,468,029,601, pada Triwulan III terdapat Realisasi sebesar Rp. 54,778,274,170,426, pada triwulan IV terdapat realisasi sebesar Rp. 55,751,465,389,549 sehingga prosentase pencapaian sebesar 94,27 %, namun belum merupakan nilai final karena masih dalam proses penginputan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (Koreksi Revaluasi) BMN pada masing-masing satker 2019 dengan berkoordinasi pada KPKNL setempat.

Tabel. III.1.31

Nilai Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut





IKU No. 31 : Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar Rp. 46.047.331.883.767 dengan Realisasi kinerja sebesar Rp. 38.792.116.978.452,00 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 84,24%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar Rp. 46.047.331.883.767,00 dengan realisasi kinerja sebesar Rp. 41.359.515.065.244,00 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 89,82%. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar Rp. 47.449.521.848.636 dengan realisasi kinerja sebesar Rp. 48.443.530.772.948 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 94,12%. Pada tahun 2018 dari target Rp. 4.630.893.802.000 dapat tercapai sebesar 89,99% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 89,99%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target Rp. 59.137.268.800.155,00 dapat tercapai sebesar Rp. 55.751.465.389.549 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 94,27% Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.110
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 30 dengan Target Kinerja 2015 – 2019

IKU 31	SATUAN 2015 – 2019	KRITERIA	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	Target	46.047.331. 883.767	46.047.331.883.7 67	47.449.521.848. 636	4.630.893.802.000	59.137, 268,800 ,155
		Realisasi	38.792.116. 978.452	41.359.515.065.2 44	48.443.530.772. 948	4.167.524.599.977	55,751, 465,38 9,549
		Kinerja (%)	84,24	89,82	102,07	89,99	94,27

IKU no 31 : Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 55,751,465,389,549 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 melebihi target Rencana Strategis (Renstra) yaitu Rp. 6.125.546.278.957 Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 908% karena ada revisi pagu BMN sehingga antara target awal dan realisasi terlalu jauh. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel III.1.111
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 31 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 31	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	6.125.546.278.957	55,751,465,389,549	908

31) Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel. III.1.112
Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2019					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU.32 Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	3.716.688.810.520	1.023.379.627.405	1.939.460.283.253	2.883.664.180.512	3.928.866.648.168	3.928.866.648.168	106

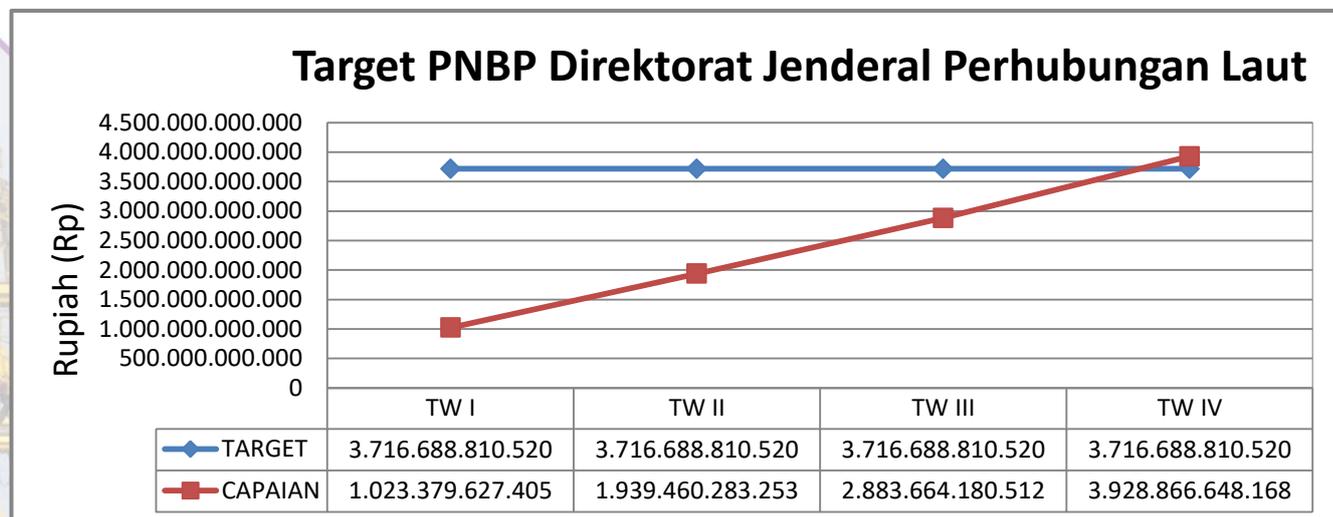
Sumber data : Bagian Keuangan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2019 sebesar Rp. 3.716.688.810.520 terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi Rp. 1.023.379.627.405. Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar Rp. 1.939.460.283.253. Pada Triwulan III terdapat Realisasi sebesar Rp. 2.883.664.180.512, Pada triwulan IV terdapat realisasi sebesar Rp. 3.928.866.648.168 sehingga prosentase pencapaian sebesar 106%, namun belum merupakan nilai final karena masih dalam proses penginputan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (Koreksi Revaluasi) BMN pada masing-masing satker 2019 dengan berkoordinasi pada KPKNL setempat.



Grafik III.1.32

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



IKU No. 32 : Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Target kinerja pada tahun 2015 sebesar Rp. 620.986.332.124,00 dengan Realisasi kinerja sebesar Rp. 1.606.115.572.806,00 sehingga Capaian kinerja terhadap target sebesar 258,64%. Pada tahun 2016 target kinerja sebesar Rp. 5.293.425.258.611,00 dengan realisasi kinerja sebesar Rp. 3.190.328.882.095,00 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 60,27 %. Pada tahun 2017 target kinerja sebesar Rp. 5.293.425.258.610,00 dengan realisasi kinerja sebesar Rp. 3.390.297.692.980,00 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 65,95%. Pada tahun 2018 dari target Rp. 4.000.014.861.362,00 dapat tercapai sebesar Rp. 3.658.517.627.391,00 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 91,46%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target Rp. 3.716.688.810.520,00 dapat tercapai sebesar Rp. 3.928.866.648.168 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 106% Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1.113

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 32 dengan Target Kinerja 2015 - 2019

IKU 32	SATUAN 2015 - 2019	KRITERIA	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	Target	620.986.332. 124	5.293.425.258. .611	5.293.425.258. .610	4.000.014.861.36 2	3.716.688.810. 520
		Realisasi	1.606.115.57 2.806	3.190.328.882. .095	3.390.297.692. .980	3.658.517.627.39 1	3.928.866.64 8.168
		Kinerja (%)	258,64	60,27	65,95	91,46	106



IKU no 32 : Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 3.920.750.748.879 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) yaitu Rp. 3.928.866.648.168. Sehingga prosentase Realisasi Kinerja sebesar 106%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.114
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 32 dengan Target Renstra Tahun 2019

IKU 32	SATUAN	TARGET TAHUN 2019 RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019	KINERJA (%)
Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	3.716.688.810.520	3.928.866.648.168	106



III.2 KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN IKU SEKRETARIAT JENDERAL

Tabel III.2.1

Kontribusi Terhadap Capaian IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2019 (Posisi 31 Desember 2019)

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET & Realisasi PK			PAGU Rp.	REALISASI		Capaian (%)
			T	R	%		Rp.	Fisik (%)	
1. Meningkatkan Optimalisasi Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai	87,00			10.405.455.584.000	9.679.947.447.019		



III.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2019 (Posisi 30 September 2019) akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3.1

Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2019

(Rp. 000,-)

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	1.604.604.641.000	1.885.335.698.000	1.849.362.781.569
2.	Belanja Barang	3.748.202.815.000	3.884.714.453.000	3.525.648.056.464
	Rupiah murni (RM)	3.373.852.522.000	3.464.914.729.000	3.126.935.047.744
	PNBP	374.350.293.000	409.018.974.000	388.607.626.387
	Pinjaman LN	-	-	-
	Hibah LN	-	10.780.750.000	9.390.156.650
3.	Belanja Modal	4.958.345.833.000	4.635.405.433.000	4.304.936.608.986
	Rupiah murni (RM)	1.867.925.973.000	1.493.968.709.000	1.457.218.756.139
	PNBP	546.772.384.000	512.103.703.000	487.826.467.699
	Pinjaman LN	2.447.687.662.000	2.533.373.207.000	2.296.044.628.938
	Hibah LN	-	-	-
	SBSN	95.959.814.000	95.959.814.000	63.854.801.057
	TOTAL PAGU	10.311.153.289.000	10.405.455.584.000	
	TOTAL REALISASI	-	-	9.679.947.447.019
	TOTAL SISA DANA	-	-	725.508.136.981

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Ditjen. Perhubungan Laut (Posisi 28 Januari 2020).



3.1.1 Realisasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2019

Tabel III.3.2

Realisasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2019

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	3.910.631.725.000	4.325.035.885.000	4,160,613,807,176
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	1.534.776.845.000	1.551.011.189.000	1,302,407,337,058
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	4.050.072.286.000	3.866.923.421.000	3,574,106,511,837
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kelautan	50.076.260.000	55.935.525.000	54,585,427,600
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	533.037.823.000	474.041.564.000	460,948,236,636
6	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	232.558.350.000	132.508.000.000	127,286,126,712
TOTAL		10.311.153.289.000	10.405.455.584.000	9.679.947.447.019

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Ditjen. Perhubungan Laut (Posisi 28 Januari 2020).

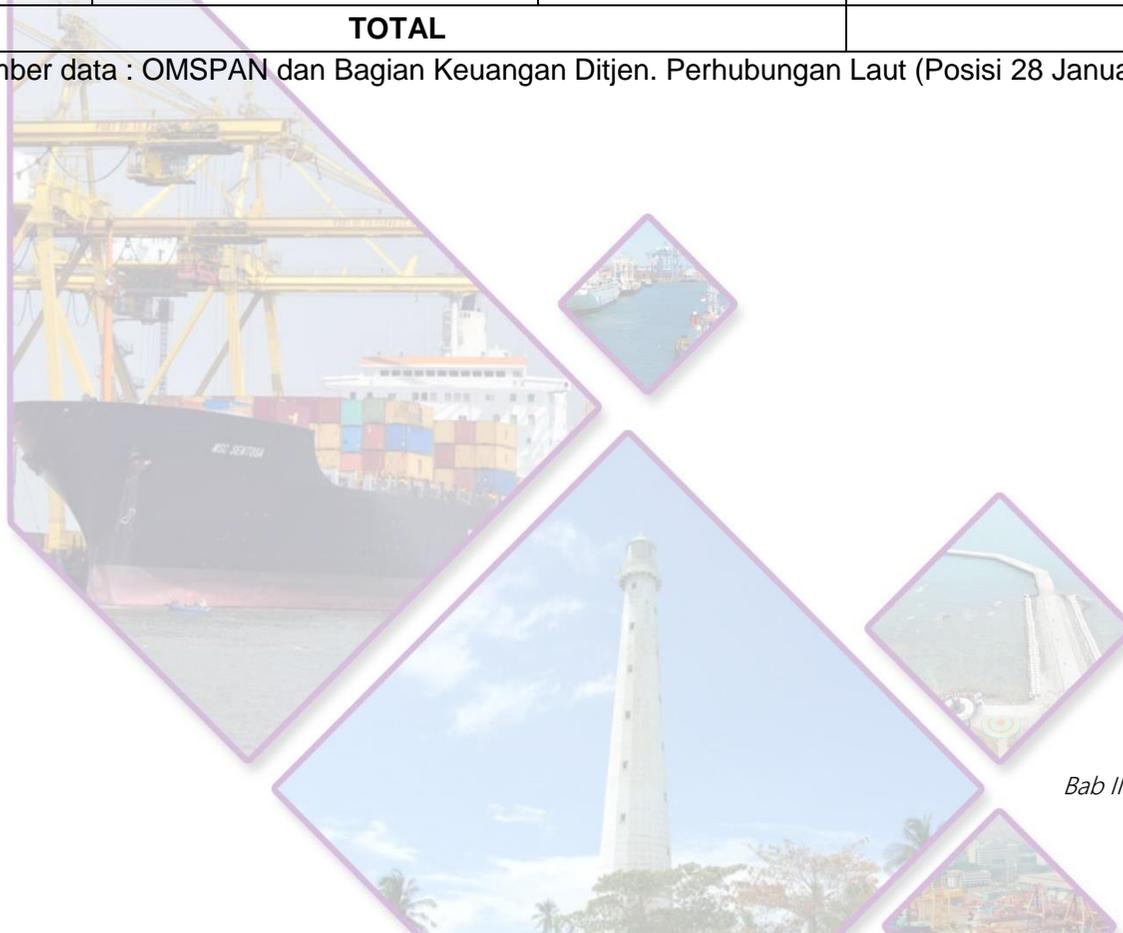


Tabel III.3.3

Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO.	Indikator Kinerja Utama	Target	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	90,50%	10.405.455.584.000	9.679.947.447.019	93,03	
TOTAL						

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Ditjen. Perhubungan Laut (Posisi 28 Januari 2020).





Tabel III.3.4

Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Laut Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional	IKU.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah	Nilai	1	Dit.LALA	0,88	Subsidi Angkutan Barang Tol Laut	236.194.539.000	221.864.830.819	35,21
							Subsidi Pengoperasian Kapal Khusus Angkutan Ternak	46.555.888.000	43.410.144.083	
							Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Laut Perintis melalui Penugasan dan Pelelangan Umum (swasta)	1.052.082.940.000	832.227.058.087	
							Subsidi Pengoperasian Kapal Rede	19.494.141.000	19.318.845.427	
Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran	IKU.2	Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri Oleh Pelayaran Nasional	%	5	Dit.LALA	4,98	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perusahaan Keagenan Kapal Asing dan Realisasi Wilayah Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Kegiatan Dalam Negeri	293.660.000	168.203.900	42,49
Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran	IKU.3	Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran)	1,11	Dit.KPLP	1,24	1. Asistensi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	84.924.000	64.045.000	-13,62
							2. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	612.000.000	561.752.000	
							3. Bimtek Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	136.438.000	135.115.300	
							4. Monitoring Terkait Permasalahan SPB	85.192.000	83.694.000	
							5. Monitoring Dan Evaluasi Petugas Pemeriksa Kecelakaan Kapal	80.687.000	52.642.000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKU.4	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa	Kejadian/ 100.000 freight (pelayaran)	0,5	Dit.KPLP	0	1. Peningkatan Keterampilan ISPS Code	300.000.000	231.512.550	17,54
							2. Verifikasi terhadap management keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan			
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKU.5	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET/BT)	%	80	Dit. KEPELABUHANAN	94				



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
SS.4	Terlaksananya Upaya Perlindungan Lingkungan <i>Maritime</i>	IKU.6 Persentase Penanggulangan Tumpahan Minyak Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Dari Kegiatan Pelayaran	%	100	Dit.KPLP	100	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	154.140.000	146.123.000	5,20
SS.5	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Dan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Transportasi	IKU.7 Rasio Rancangan Dan Peraturan Perundangan Di Bidang Pelayaran Yang Ditetapkan	Rasio	1	Bag. HUKUM	0,9				
SS.6	Terlaksananya Pembinaan Teknis Transportasi Laut	IKU.8 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi Dan Pelaporan	%	100	Para Direktorat Dan Bagian	100	Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran	5.580.546.000	3460307400	37,99
						Monitoring dan Evaluasi Dit. Kappel	1.568.833.000	264016300		
						Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kelaikan Peti Kemas	345.558.000	111617600		
						Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Awak Kapal	450.000.000	0		
						Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Kepelautan	490.000.000	302003600		



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	
SS.7	Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi	IKU.9	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang	%	25,18	Dit.LALA	25,18	Monitoring dan Evaluasi Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis	906.078.000	543.186.504	40,05
		IKU.10	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang	%	12,56	Dit.LALA	12,56	Monitoring dan Evaluasi Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis	906.078.000	543.186.504	40,05
		IKU.11	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Laut (Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Non - Komersial)	%	90	Dit.KEPELABUHANAN	86,58	Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Non - Komersial	960.901.511.000	920.411.573.480	0,43
		IKU.12	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat	%	61,61	Dit.LALA	61,61	Lanjutan Pembangunan Dan Supervisi Kapal Pelayaran Rakyat	63.972.034.000	32.681.361.002	48,91
SS.8	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKU.13	Tingkat kecukupan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	83,11	Dit. KENAVIGASIAN	82,99	Pembangunan Rambu Suar pada 13 lokasi - 11 Lokasi yang terlaksana (Tanjung Pinang, Tarakan, Semarang, Samarinda, Ambon, Bena, Cilacap, Jayapura, Kendari, Kupang, Merauke) - 2 Lokasi yang tidak selesai 100% (Tual, Palembang)	72.407.419.000	47.972.608.357	33,65
		IKU.14	Tingkat kehandalan SBNP	%	97,00	Dit. KENAVIGASIAN	97,00	Rehab dan Replace SBNP	90.499.595.000	77471854723	14,40
		IKU.15	Persentase Pembangunan/ up-grade GMDSS (Global Maritime Distess Safety)	%	94,05	Dit. KENAVIGASIAN	94,05	Pembangunan/Upgrade GMDSS	8.998.870.000	8.507.400.000	5,46
		IKU.16	Persentase Pembangunan/ up-grade VTS (Vessel Traffic Service)	%	95,83	Dit. KENAVIGASIAN	95,83	Pembangunan/Upgrade VTS	54.529.898.000	54361709500	0,31
		IKU.17	Persentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patrol	%	81	Dit.KPLP	65	Pembangunan Kapal Patroli	48.333.310.000	46.422.303.295	19,69



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
SS.9	Meningkatnya Layanan Transportasi Di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	IKU.18 Rasio Layanan Transportasi Laut Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil (Jumlah Trayek Angkutan Perintis)	Rasio	1	Dit.LALA	1	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Laut Perintis melalui Penugasan dan Pelelangan Umum (swasta)	1.052.082.940.000	832.227.058.087	20,90
SS.10	Tertindakannya Kegiatan Perlindungan <i>Maritime</i>	IKU.19 Rasio Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan <i>Maritime</i>	Rasio	1	Dit.KAPPEL	1				
		IKU.20 Persentase Prasarana Yang Telah Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan (SBNP <i>solar cell</i>)	%	89,60	Dit. KENAVIGASIAN	89,60				
SS.11	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengendalian Di Bidang Pelayaran	IKU.21 Rasio Penerbitan Sertifikat Keahlian Dan Keterampilan Serta Dokumen Kelautan Lainnya	Rasio	1	Dit.KAPPEL	1				
		IKU.22 Rasio Penerbitan Sertifikat / Surat/ Akta/ Dokumen Kelautan Kapal	Rasio	1	Dit.KAPPEL	1				
		IKU.23 Rasio Penerbitan Sertifikat Di Bidang Perlindungan Lingkungan <i>Maritime</i>	Rasio	1	Dit.KAPPEL	1				
		IKU.24 Rasio Penerbitan Perizinan/ Rekomendasi Di Bidang Pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	Rasio	1	Para Direktorat	1				



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	UNIT KERJA	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
SS.12	Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Kompeten Dan Profesional	IKU.25 Persentase Peningkatan Jumlah SDM Aparatur Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Bersertifikat	%	90	Bag.KEPEGAWAIAN	109,54				
SS.13	Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal Dan Mudah Diakses Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26 Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	Bag.ORGANISASI DAN HUMAS	100				
		IKU.27 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5).	Nilai	4	Bag.ORGANISASI DAN HUMAS	0				
SS.14	Terwujudnya Good Governance And Clean Government di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.28 Tingkat kualitas akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP	87	Bag.PERENCANAAN	83,73	0			
		IKU.29 Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5	Bag.PERENCANAAN	5	5			
SS.15	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yang Optimal	IKU.30 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90,50	Bag.KEUANGAN	89,58	Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2019	10.405.455.584.000	9.321.039.513.297	9,50
		IKU.31 Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	59.137.268.800.155	Bag.KEUANGAN	55.751.465.389.549	Alat Pengolah Data, Monitoring, Penyuluhan dan Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran, Evaluasi dan Penghapusan BMN	59.137.268.800.155	55.751.465.389.549	-
		IKU.32 Target PNPB Direktorat Jenderal Perhubungan	Rp	3.716.688.810.520	Bag.KEUANGAN	3.928.866.648.168	Monmitoring realisasi target PNPB Ta.2019	3.716.688.810.520	3.928.866.648.168	-







BAB IV

Penutup

IV.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan peningkatan kinerja pelayanan sarana maupun prasarana transportasi laut dan peningkatan kinerja pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga menambah jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi.

Adanya peningkatan sarana prasarana di bidang transportasi laut sebagai penunjang tugas fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menunjukkan terdapat beberapa perkembangan positif dalam pelaksanaan pelayanan maupun keselamatan bidang transportasi laut, antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah kapal maupun pelabuhan yang memiliki sertifikat ISPS (*International Ship and Port Facility*).
- b. Kemudahan pelayanan pihak ketiga di bidang perijinan publik melalui penyederhanaan sistem perijinan, dimana semula pengurusannya masih melalui cara-cara manual kemudian diubah menjadi *system on-line*.

IV.2 Langkah ke depan

Dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan wujud dari komitmen dan dukungan pimpinan serta dukungan kemampuan SDM dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana keselamatan serta meningkatkan kewaspadaan/ keandalan terhadap keberadaan sarana prasarana keselamatan tersebut utamanya yang rawan tindak pencurian, dalam upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan melalui:



- a. Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar keberadaan sarana dan prasarana keselamatan;
 - b. Peningkatan patroli keamanan;
 - c. Uji petik pemeriksaan kapal berkala (*ramp check*);
 - d. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
 - e. Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakaan kapal;
 - f. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - g. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah Unit Pelaksana Teknis.
2. Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah muatan angkutan laut penumpang maupun barang, maka akan dilaksanakan hal sebagai berikut:
- a. Optimalisasi sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang terkait erat dengan perdagangan internasional, untuk menarik investor dari asing mau menggunakan armada nasional sehingga dapat memenuhi program *beyond cabotage*;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik sub sektor transportasi laut antara lain melalui: penerapan SOP ketertiban jadwal keberangkatan maupun kedatangan pelayaran, meningkatkan nilai tambah penggunaan moda transportasi laut sebagai contoh: pengenalan *meeting on board program* pada publik/ masyarakat umum.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PERJANJIAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2019**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang, mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban

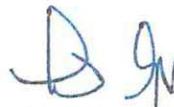
anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

**PIHAK KEDUA,
MENTERI PERHUBUNGAN**

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**


BUDI KARYA SUMADI


R. AGUS H. PURNOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Stakeholders Perspectives					
SS.1	Terwujudnya pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan	IKU.1	Rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah	Nilai	1
		IKU.2	Pangsa muatan angkutan laut barang luar negeri oleh pelayaran nasional	%	5
Costumer Perspectives					
SS.2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	IKU.3	Rasio kejadian kecelakaan pada transportasi laut	kecelakaan/ 10.000 <i>freight</i> (pelayaran)	1,11
		IKU.4	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut	Kejadian/ 100.000 <i>freight</i> (pelayaran)	0,5
SS.3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKU.5	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	80,00
SS.4	Terlaksananya upaya perlindungan lingkungan maritim	IKU.6	Persentase penanggulangan tumpahan minyak yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari kegiatan pelayaran	%	100
Internal Business Process Perspective					
SS.5	Terlaksananya perumusan kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan transportasi laut	IKU.7	Rasio rancangan dan peraturan perundangan di bidang pelayaran yang ditetapkan	Rasio	1
SS.6	Terlaksananya pembinaan teknis transportasi laut	IKU.8	Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan	%	100
SS.7	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKU.9	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut penumpang	%	25,18
		IKU.10	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut barang	%	12,56
		IKU.11	Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut (pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian/ pengembangan pelabuhan non-komersial)	%	90

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKU.12	Persentase pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat	%	61,61
SS.8	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKU.13	Tingkat kecukupan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	83,28
		IKU.14	Tingkat kehandalan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	97,00
		IKU.15	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> GMDSS (<i>Global Maritime Distess Safety System</i>)	%	94,05
		IKU.16	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> VTS (<i>Vessel Traffic Service</i>)	%	95,83
		IKU.17	Persentase pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian kapal patroli	%	81
SS.9	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar	IKU.18	Rasio layanan transportasi laut pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil (jumlah trayek angkutan perintis)	Rasio	1
SS.10	Terlaksananya kegiatan perlindungan maritim	IKU.19	Rasio pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan lingkungan maritim	Rasio	1
		IKU.20	Persentase prasarana yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (<i>SBNP solar cell</i>)	%	89,63
SS.11	Meningkatnya efektivitas kinerja pengendalian di bidang pelayaran	IKU.21	Rasio penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kepelautan lainnya	Rasio	1
		IKU.22	Rasio penerbitan sertifikat / surat/ akta/ dokumen kelaiklautan kapal	Rasio	1
		IKU.23	Rasio penerbitan sertifikat di bidang perlindungan lingkungan	Rasio	1
		IKU.24	Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	Rasio	1
Learn and Growth Perspective					
SS.12	Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan professional	IKU.25	Persentase peningkatan jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
SS.13	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah	IKU.26	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
13	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Persentase kehandaian sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.27	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert 1-</i>	Nilai	4
14	Terwujudnya <i>good governance and clean government</i> di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.28	Tingkat kualitas akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP	87.00
		IKU.29	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
15	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang optimal	IKU.30	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.31	Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	56,418,617,607,856
		IKU.32	Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	3,716,688,810,520

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	1,534,776,845.000
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	4,050,072,286.000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	50,076,260.000
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	533,037,823.000
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	232,558,350.000
6. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	3,910,631,725.000
Jumlah	10,311,153,289.000

(sepuluh triliun tiga ratus sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BUDI KARYA SUMADI

R. AGUS H. PURNOMO



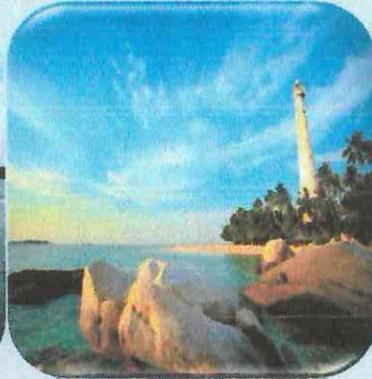
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



REVIU PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2019



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang, mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban

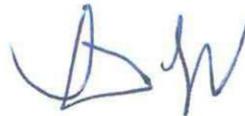
anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

**PIHAK KEDUA,
MENTERI PERHUBUNGAN**

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**


BUDI KARYA SUMADI


R. AGUS H. PURNOMO

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Stakeholders Perspectives					
SS.1	Terwujudnya pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional	IKU.1	Rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah	Nilai	1
		IKU.2	Pangsa muatan angkutan laut barang luar negeri oleh pelayaran nasional	%	5
Costumer Perspectives					
SS.2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	IKU.3	Rasio kejadian kecelakaan pada transportasi laut	kecelakaan/ 10.000 <i>freight</i> (pelayaran)	1,11
		IKU.4	Rasio gangguan keamanan pada pelayaran jasa transportasi laut	Kejadian/ 100.000 <i>freight</i> (pelayaran)	0,5
SS.3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKU.5	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	80,00
SS.4	Terlaksananya upaya perlindungan lingkungan maritim	IKU.6	Persentase penanggulangan tumpahan minyak yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari kegiatan pelayaran	%	100
Internal Business Process Perspective					
SS.5	Terlaksananya perumusan kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan transportasi laut	IKU.7	Rasio rancangan dan peraturan perundangan di bidang pelayaran yang ditetapkan	Rasio	1
SS.6	Terlaksananya pembinaan teknis transportasi laut	IKU.8	Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan	%	100
SS.7	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKU.9	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut penumpang	%	25,18
		IKU.10	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut barang	%	12,56

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKU.11	Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut (pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian/ pengembangan pelabuhan non-komersial)	%	90
		IKU.12	Persentase pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat	%	61,61
SS.8	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKU.13	Tingkat kecukupan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	83,11
		IKU.14	Tingkat kehandalan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	97,00
		IKU.15	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> GMDSS (<i>Global Maritime Distess Safety System</i>)	%	94,05
		IKU.16	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> VTS (<i>Vessel Traffic Service</i>)	%	95,83
		IKU.17	Persentase pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian kapal patroli	%	81
SS.9	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	IKU.18	Rasio layanan transportasi laut pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil (jumlah trayek angkutan perintis)	Rasio	1
SS.10	Terlaksananya kegiatan perlindungan maritim	IKU.19	Rasio pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan lingkungan maritim	Rasio	1
		IKU.20	Persentase prasarana yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (<i>SBNP solar cell</i>)	%	89,60
SS.11	Meningkatnya efektivitas kinerja pengendalian di bidang pelayaran	IKU.21	Rasio penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kepelautan lainnya	Rasio	1
		IKU.22	Rasio penerbitan sertifikat / surat/ akta/ dokumen kelaiklautan kapal	Rasio	1
		IKU.23	Rasio penerbitan sertifikat di bidang perlindungan lingkungan maritim	Rasio	1
		IKU.24	Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	Rasio	1

Learn and Growth Perspective

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Learn and Growth Perspective				
SS.12	Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan professional	IKU.25	Persentase peningkatan jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	% 90
SS.13	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	% 100
		IKU.27	Persepsi <i>user</i> terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert 1-5</i>).	Nilai 4
SS.14	Terwujudnya <i>good governance and clean government</i> di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.28	Tingkat kualitas akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP 87,00
		IKU.29	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen 5
SS.15	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang optimal	IKU.30	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	% 90,50
		IKU.31	Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp 59.137.268.800.155
		IKU.32	Target PNPB Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp 3.716.688.810.520

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan	1.551.011.189.000
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	3.867.347.121.000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan	55.935.525.000
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	463.260.814.000
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	132.508.000.000
6. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	4.324.612.185.000
Jumlah	10.394.674.834.000,000

(sepuluh triliun tiga ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BUDI KARYA SUMADI

R. AGUS H. PURNOMO



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2019



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

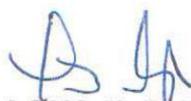
Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan memuat beberapa indikator kinerja serta target yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut yang disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran.

Jakarta,

2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

RENCANA KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Stakeholders Perspectives					
SS.1	Terwujudnya pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan	IKU.1	Rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah	Nilai	1
		IKU.2	Pangsa muatan angkutan laut barang luar negeri oleh pelayaran nasional	%	5
Costumer Perspectives					
SS.2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	IKU.3	Rasio kejadian kecelakaan pada transportasi laut	kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran)	1,11
		IKU.4	Rasio gangguan keamanan pada pelayaran jasa transportasi laut	Kejadian/ 100.000 freight (pelayaran)	0,5
SS.3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKU.5	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	80,00
SS.4	Terlaksananya upaya perlindungan lingkungan maritim	IKU.6	Persentase penanggulangan tumpahan minyak yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari kegiatan pelayaran	%	100
Internal Business Process Perspective					
SS.5	Terlaksananya perumusan kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan transportasi laut	IKU.7	Rasio rancangan dan peraturan perundangan di bidang pelayaran yang ditetapkan	Rasio	1
SS.6	Terlaksananya pembinaan teknis transportasi laut	IKU.8	Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan	%	100
SS.7	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKU.9	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut penumpang	%	25,18
		IKU.10	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut barang	%	12,56
		IKU.11	Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut (pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian/ pengembangan pelabuhan non-komersial)	%	90

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKU.12	Persentase pelaksanaan pembangunan kapal pelayaran rakyat	%	61,61
SS.8	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKU.13	Tingkat kecukupan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	83,28
		IKU.14	Tingkat kehandalan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	%	97,00
		IKU.15	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> GMDSS (<i>Global Maritime Distess Safety System</i>)	%	94,05
		IKU.16	Persentase pembangunan/ <i>up-grade</i> VTS (Vessel Traffic Service)	%	95,83
		IKU.17	Persentase pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian kapal patroli	%	81
SS.9	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar	IKU.18	Rasio layanan transportasi laut pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil (jumlah trayek angkutan perintis)	Rasio	1
SS.10	Terlaksananya kegiatan perlindungan maritim	IKU.19	Rasio pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan lingkungan maritim	Rasio	1
		IKU.20	Persentase prasarana yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (<i>SBNP solar cell</i>)	%	89,63
SS.11	Meningkatnya efektivitas kinerja pengendalian di bidang pelayaran	IKU.21	Rasio penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan serta dokumen kepelautan lainnya	Rasio	1
		IKU.22	Rasio penerbitan sertifikat / surat/ akta/ dokumen kelaiklautan kapal	Rasio	1
		IKU.23	Rasio penerbitan sertifikat di bidang perlindungan lingkungan	Rasio	1
		IKU.24	Rasio penerbitan perizinan/ rekomendasi di bidang pelayaran (Bidang Angkutan Laut, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Kelaiklautan Kapal, Bidang Kenavigasian, Bidang Penjagaan Laut dan Pantai)	Rasio	1
Learn and Growth Perspective					
SS.12	Tersedianya SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan professional	IKU.25	Persentase peningkatan jumlah SDM aparatur teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
SS.13	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah	IKU.26	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS.13	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.27	Persepsi <i>user</i> terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert</i> 1-5).	Nilai	4
SS.14	Terwujudnya <i>good governance and clean government</i> di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.28	Tingkat kualitas akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP	87,00
		IKU.29	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.15	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang optimal	IKU.30	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.31	Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	56.418.617.607.856
		IKU.32	Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	3.716.688.810.520

Jakarta, 2019
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


R. AGUS H. PURNOMO

DAFTAR PELABUHAN YANG DILAYANI OLEH ANGKUTAN LAUT TAHUN 2019

NO.	NAMA PELABUHAN	NO.	NAMA PELABUHAN	NO.	NAMA PELABUHAN
1	Adault	51	Bayun	101	Daruba
2	Agats	52	Belang (Minahasa Utara/Sulut)	102	Darume
3	Air Bangis	53	Belang-Belang (Mamuju / Sulbar)	103	Dawai
4	Air Buaya	54	Belawan	104	Dawelor
5	Amahai	55	Belinyu	105	Depapre
6	Amamapare	56	Belopa	106	Dobo
7	Ambalau	57	Bemo	107	Dofa
8	Ambon	58	Benete	108	Donggala
9	Ampana	59	Bengkalis,	109	Dumai
10	Ampenan	60	Benjina	110	Eci
11	Amurang	61	Benoa	111	Elat
12	Anggrek	62	Beo	112	Ende
13	Ansus	63	Biak	113	Eray
14	Anyer Lor	64	Biaro	114	Ereke
15	Arwala / Sutilarang	65	Bicoli	115	Essang
16	Asiki	66	Bima	116	Fak-fak
17	Atapupu	67	Binongko	117	Falabisahaya
18	Atsy	68	Bintuhan/Linau	118	Fani
19	Awerange	69	Bintuni	119	Fogi
20	Baa	70	Biringkasi	120	Galela
21	Babang	71	Bisui	121	Galesong/Takalar
22	Badas	72	Bitung	122	Garongkong
23	Bade	73	Boepinang	123	Geser
24	Bagan Asahan	74	Bojonegara	124	Giliketapang
25	Bagan Siapi Api	75	Boom Baru/Palembang	125	Gilimanuk
26	Baing	76	Branta	126	Gita/Payahe
27	Bajoe	77	Brebes	127	Gorom
28	Balauring	78	Brondong	128	Gorontalo
29	Balikpapan	79	Buano	129	Gresik
30	Banabungi Pasarwajo	80	Budong-Budong	130	Gudang Arang
31	Banda Besar	81	Buhias	131	Gunung Sitoli
32	Bandanaira	82	Bukide	132	Hatu Piru
33	Banemo	83	Bula	133	Hila/Romang
34	Banggai	84	Buleleng	134	Idi
35	Banjarmasin	85	Buli	135	Ilwaki
36	Bantaeng	86	Bulukumba/Lappe'e	136	Inawatan
37	Banten	87	Bumbulan	137	Indari
38	Banyu Wangi/ Boom	88	Bungku	138	Indramayu/Losarang
39	Baranusa	89	Bunta	139	Ippi
40	Bastiong	90	Bunyu	140	Jailolo
41	Bataka	91	Calabai	141	Jampea

42	Batam/Batu Ampar	92	Calang	142	Janggerbun
43	Batang	93	Carik	143	Jayapura
44	Batu Atas	94	Carocok Painan	144	Jeneponto
45	Batu Goyang/Kalar-Kalar	95	Celukan Bawang	145	Jepara
46	Batu Panjang	96	Cirebon	146	Juwana
47	Baturube	97	Dabo Singkep	147	Kabare
48	Batutua	98	Dama	148	Kahakitang
49	Bau-Bau/Murhum	99	Damar	149	Kaimana
50	Bawean	100	Dapalan	150	Kairatu

NO.	NAMA PELABUHAN	NO.	NAMA PELABUHAN	NO.	NAMA PELABUHAN
151	Kaiwatu/Moa	201	Kuala Tanjung	251	Malahayati
152	Kakorotan	202	Kuala Tungkal	252	Malakoni/P. Enggano
153	Kalabahi	203	Kumai	253	Malala
154	Kalaotoa	204	Kur	254	Malbufa
155	Kalbut	205	Kwandang	255	Maligano
156	Kaledupa	206	Labuan Amuk/Tanahamp	256	Malili
157	Kalianda	207	Labuan Bajo	257	Maloy
158	Kalianget	208	Labuha	258	Mamboro
159	Kalibaru	209	Labuhan	259	Mamuju
160	Kangean	210	Labuhan Haji	260	Manado
161	Karang Agung	211	Labuhan Lombok	261	Mangarang
162	Karangantu	212	Labuhan Maringgai	262	Manggar
163	Karatung	213	Labuhan Uki	263	Mangoli
164	Karimata	214	Lagundi	264	Manipa
165	Karimun Jawa	215	Lahewa	265	Manitingting/Maba
166	Kasipute	216	Laiwui	266	Manokwari
167	Kawaluso	217	Lakara	267	Mansinam
168	Kawio	218	Lakor	268	Marabatuan
169	Kayuadi	219	Lamakera	269	Marabombang
170	Kedi/Loloda	220	Langara	270	Marampit
171	Kempo	221	Lapuko	271	Marapokot
172	Kendal	222	Larantuka	272	Maritaing
173	Kendari/Bungkutoko	223	Larat	273	Marlasi
174	Kendawangan	224	Lasalimu	274	Marore
175	Kep. Sembu (P. Dremuka)	225	Legon Bajak	275	Marsela
176	Keramaian	226	Leksula	276	Marunda
177	Kereng Bengkirai	227	Lembar	277	Masalembo
178	Kertapati	228	Leok	278	Matangisi
179	Kesui	229	Lerokis	279	Mataritip
180	Ketapang (Banyuwangi)	230	Leti	280	Matasiri
181	Ketapang (Ketapang/Kalbar)	231	Letung	281	Matutuang
182	Kintap	232	Lewoleba	282	Maumbawa
183	Kisar	233	Lhok Tuan	283	Maumere /Lorens Say
184	Kobisadar	234	Lhokseumawe/Kreung Geukeh	284	Maurole

185	Kokas	235	Likupang	285	Mega
186	Kolaka	236	Lipang	286	Melonguane
187	Kolbano	237	Lirang	287	Mempawah
188	Kolonedale	238	Lirung	288	Menanga
189	Komodo	239	Loleo Jaya	289	Merauke
190	Korido	240	Losseng	290	Mesuji (Mesuji/Lampung)
191	Kota Baru	241	Lurang	291	Mesuji (Ogan Komering Ilir/Sumsel)
192	Kresek/Kronjo	242	Luwuk	292	Meulaboh
193	Kroing	243	Maccini Baji	293	Miangas
194	Kuala Enok	244	Madopolo/Joame	294	Midai
195	Kuala Gaung	245	Mafa	295	Molawe
196	Kuala Jelay	246	Mahaleta	296	Moor
197	Kuala Langsa	247	Majene	297	Moutong
198	Kuala Mendahara	248	Makalehi	298	Muara Angke
199	Kuala Pembuang	249	Makassar	299	Muara Baru
200	Kuala Semboja/Sebulu	250	Makian	300	Muara Padang
NO.	NAMA PELABUHAN	NO.	NAMA PELABUHAN	NO.	NAMA PELABUHAN
301	Muara Sabak	351	Pantoloan	401	Sadai
302	Muara Siberut/Simailepet	352	Para	402	Saketa
303	Muko-Muko	353	Pare-Pare	403	Salakan
304	Munte (Likupang Barat/Sulut)	354	Parigi	404	Samarinda
305	Munte (Luwu Utara/Sulsel))	355	Pasang Kayu	405	Sampang
306	Muntok	356	Pasapat	406	Sampit
307	Nabire	357	Pasipalele	407	Samuda
308	Naikliu	358	Pasuruan	408	Sanana
309	Namlea	359	Patani	409	Sangatta
310	Namrole	360	Pattirobajo	410	Sangkulirang
311	Natal (Sikarakara)	361	Pegatan Mendawai	411	Saonek
312	Ndao	362	Pekalongan	412	Saparua/Haria
313	Ngalipaeng	363	Pekanbaru	413	Sapeken
314	Nipah Panjang	364	Pelaihari/Swarangan	414	Sapeken
315	Nunukan/Tunon Taka	365	Pelita	415	Sapudi
316	Nusa Penida	366	Pemalang	416	Sarmi
317	Ogoamas	367	Pemenang	417	Satui
318	Oransbari	368	Penajam Paser	418	Saukorem
319	Oswald	369	Petta	419	Saumlaki
320	P. Banyak	370	Pigaraja	420	Sausapor
321	P. Bonerate	371	Pomako	421	Seba
322	P. Gebe	372	Pomalaa/Dawi-dawi	422	Sebuku
323	P. Jinato	373	Pontianak	423	Sedanau
324	P. Kalukalukuang	374	Poom	424	Seget
325	P. Mules	375	Poopongan	425	Segun

326	P. Raas	376	Popolii	426	Sei Berombang
327	P. Sabutung	377	Poso	427	Sei Kolak Kijang
328	P. Sailus	378	Probolinggo	428	Seira
329	P. Sapuka	379	Pulang Pisau	429	Selat Lampa
330	P. Sebesi	380	Pulau Baai	430	Selat Panjang
331	Pacitan	381	Pulau Ende	431	Selayar/Benteng/Rauf Rahman
332	Padang Bai	382	Pulau Kampai	432	Senayang
333	Pagimana	383	Pulau Kayoa	433	Serasan
334	Palabuhanratu	384	Pulau Laut	434	Serongga
335	Paleleh	385	Pulau Owi	435	Serui
336	Palipi	386	Pulau Salura	436	Serwaru
337	Palopo/Tg. Ringgit	387	Pulau Sambu	437	Sesayap
338	Palue	388	Pulau Tello	438	Sibadeh
339	Pamatata	389	Pulau Teor	439	Sibigo
340	Panarukan	390	Raha	440	Sibolga
341	Pangandaran/Bojongsal	391	Raijua	441	Sigli
342	Pangkal Balam	392	Rainis	442	Sikabalan/Pokai
343	Pangkalan Brandan	393	Ranai	443	Sikakap
344	Pangkalan Bun	394	Rangga Ilung	444	Sikeli
345	Pangkalan Dodek	395	Ransiki	445	Sinabang
346	Pangkalan Susu	396	Rembang/Sluke (Jateng)	446	Sinaboi
347	Panipahan	397	Rembang/Tasik Agung (Jateng)	447	Singkawang
348	Paniti	398	Rengat/Kuala Cinaku	448	Singkil
349	Panjang	399	Reo	449	Sinjai/Larea-rea
350	Pantai Cermin	400	Sabang	450	Sintete

NO.	NAMA PELABUHAN	NO.	NAMA PELABUHAN	NO.	NAMA PELABUHAN
451	Siompu	501	Tarempa	551	Wasior
452	Sirombu	502	Tegal	552	Watunohu
453	Siuban	503	Telaga baru	553	Waworada
454	Siwa/Bangsalae	504	Teluk Air / Padang Tikar	554	Wayabula
455	Soasio/Goto	505	Teluk Bayur	555	Weda
456	Sofifi	506	Teluk Betung	556	Windesi
457	Sorong	507	Teluk Dalam	557	Wini
458	Subaim/Wasile	508	Teluk Leidong	558	Wolu
459	Subi	509	Teluk Melano/Teluk Batang	559	Wonreli
460	Sukadana	510	Tembilahan	560	Wulur
461	Sukamara	511	Teminabuan		
462	Sunda Kelapa	512	Tenau/ Kupang		
463	Sungai Guntung	513	Tepa		
464	Sungai Lumpur	514	Ternate/A.Yani		
465	Sungai Nyamuk/Sebatik	515	Terong/Waiwerang		

466	Sungai Pakning	516	Tg. Balai Asahan/Teluk Nibung
467	Susoh	517	Tg. Priok
468	Taberfane	518	Tg. Sidupa
469	Tagulandang	519	Tifure
470	Tahuna	520	Tikong
471	Talaga Raya	521	Tilamuta
472	Talang Duku	522	Tinombo
473	Tangkiang	523	Tobelo
474	Taniwel	524	Toboali
475	Tanjung Api Api	525	Toli-toli
476	Tanjung Balai Karimun	526	Torosik
477	Tanjung Batu (Belitung/Babel)	527	Toyando
478	Tanjung Batu (Kotabaru/Kalsel)	528	Tual
479	Tanjung Batu Kundur	529	Tuapejat
480	Tanjung Beringin	530	Tuhaha
481	Tanjung Buton	531	Tulehu
482	Tanjung Emas	532	Tutu Kembong
483	Tanjung Intan	533	Ujung Jabung
484	Tanjung Laut	534	Ujung Jampea
485	Tanjung Medang	535	Ulu Siau
486	Tanjung Pakis	536	Una-Una
487	Tanjung Pandan	537	Upisera
488	Tanjung Perak	538	Wahai
489	Tanjung Pinang	539	Waigama
490	Tanjung Pura	540	Waikelo
491	Tanjung Redeb	541	Waingapu
492	Tanjung Santan	542	Waisai
493	Tanjung Satai	543	Waisarisa
494	Tanjung Selor	544	Waiwadan
495	Tanjung Silopo/Polewali	545	Waiwole
496	Tanjung Tiram	546	Waiwuring
497	Tanjung Uban / Teluk Sasah	547	Wakai
498	Tanjung Wangi	548	Wanci
499	Tapaktuan	549	Wani
500	Tarakan/Malundung	550	Waren

Lampiran IKU 9. Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Penumpang**DAFTAR PEMELIHARAAN 42 KAPAL PERINTIS TAHUN 2019**

NO.	NAMA KAPAL	KAPASITAS ANGKUT (ORANG)
1	KM. Papua Empat	85
2	KM. Sabuk Nusantara 47	85
3	KM. Sabuk Nusantara 46	85
4	KM. Nanggalala	150
5	KM. Nemberala	150
6	KM. Papua Dua	150
7	KM. Papua Satu	150
8	KM. Papua Enam	150
9	KM. Kie Raha I	180
10	KM. Amukti Palapa	180
11	KM. Kie Raha III	180
12	KM. Maloli	180
13	KM. Kasuari Pasifik I	180
14	KM. Papua Lima	180
15	KM. Kasuari Pasifik II	180
16	KM. Meliku Nusa	180
17	KM. Entebe Express	180
18	KM. Kasuari Pasifik III	180
19	KM. Sabuk Nusantara 29	180
20	KM. Sabuk Nusantara 27	180
21	KM. Sabuk Nusantara 36	180
22	KM. Berkat Taloda	201
23	KM. Wetar	200
24	KM. Gunung Bintan	200
25	KM. Tanjung Tungkor	200
26	KM. Sabuk Nusantara 28	200
27	KM. Sabuk Nusantara 35	200
28	KM. Sabuk Nusantara 52	200
29	KM. Sabuk Nusantara 53	200
30	KM. Sabuk Nusantara 55	200
31	KM. Sabuk Nusantara 56	200
32	KM. Sabuk Nusantara 31	260
33	KM. Sabuk Nusantara 32	260
34	KM. Sabuk Nusantara 30	260
35	KM. Sabuk Nusantara 33	260
36	KM. Sabuk Nusantara 34	260
37	KM. Sabuk Nusantara 38	260
38	KM. Sabuk Nusantara 39	260
39	KM. Sabuk Nusantara 41	260
40	KM. Sabuk Nusantara 42	260
41	KM. Sabuk Nusantara 37	260
42	KM. Sabuk Nusantara 40	260

Lampiran IKU 10. Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut Barang**DAFTAR PEMELIHARAAN 42 KAPAL PERINTIS TAHUN 2019**

NO.	NAMA KAPAL	KAPASITAS ANGKUT (TON)
1	KM. Papua Empat	40
2	KM. Sabuk Nusantara 47	80
3	KM. Sabuk Nusantara 46	80
4	KM. Nanggalala	30
5	KM. Nemberala	30
6	KM. Papua Dua	30
7	KM. Papua Satu	30
8	KM. Papua Enam	30
9	KM. Kie Raha I	30
10	KM. Amukti Palapa	30
11	KM. Kie Raha III	30
12	KM. Maloli	30
13	KM. Kasuari Pasifik I	30
14	KM. Papua Lima	30
15	KM. Kasuari Pasifik II	30
16	KM. Meliku Nusa	30
17	KM. Entebe Express	30
18	KM. Kasuari Pasifik III	30
19	KM. Sabuk Nusantara 29	80
20	KM. Sabuk Nusantara 27	80
21	KM. Sabuk Nusantara 36	80
22	KM. Berkat Taloda	50
23	KM. Wetar	50
24	KM. Gunung Bintan	50
25	KM. Tanjung Tungkor	40
26	KM. Sabuk Nusantara 28	80
27	KM. Sabuk Nusantara 35	80
28	KM. Sabuk Nusantara 52	80
29	KM. Sabuk Nusantara 53	80
30	KM. Sabuk Nusantara 55	80
31	KM. Sabuk Nusantara 56	80
32	KM. Sabuk Nusantara 31	50
33	KM. Sabuk Nusantara 32	50
34	KM. Sabuk Nusantara 30	50
35	KM. Sabuk Nusantara 33	50
36	KM. Sabuk Nusantara 34	50
37	KM. Sabuk Nusantara 38	50
38	KM. Sabuk Nusantara 39	50
39	KM. Sabuk Nusantara 41	50
40	KM. Sabuk Nusantara 42	50
41	KM. Sabuk Nusantara 37	50
42	KM. Sabuk Nusantara 40	50

Lampiran IKU 18. Rasio Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil

DAFTAR KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU TERLUAR YANG DILAYANI

NO.	KABUPATEN/ PULAU TERLUAR	PELABUHAN	PANGKALAN	JUMLAH KAPAL	KODE TRAYEK	
1	Aceh Singkil	Singkil	Meulaboh	1	R-1	
		Pulau Banyak				
2	Nias Selatan	Pulau Tello	Teluk Bayur	1	R-3	
		Teluk Dalam				
		Sigologolo				
		Sikabalu/Pokai				
3	Kepulauan Mentawai	Siberut/Simalepet	Teluk Bayur	1	R-4	
		Sikakap				
		Sioban				
		Pasapat				
		Tua Pejat				
4	Bima	Bima	Bima	2	R-21, 22	
5	Lombok Utara	Carik		1	R-22	
6	Kupang	Kupang	Kupang	4	R-23,24,25,26	
7	Sumba Timur	Waingapu		1	R-23	
8	Timor Tengah Uta	Wini		1	R-24	
9	Belu	Atapupu		1	R-25	
10	Alor	Baranusa		1	R-25	
		Kalabahi		1	R-25	
11	Lembata	Balauring		1	R-25	
		Lewoleba		1	R-25	
12	Ende	Maurole		Maumere	1	R-28
13	Manggarai	Reo		Kupang	1	R-26
14	Manggarai Barat	Labuan Bajo	1		R-26	
15	Nagekeo	Marapokot	1		R-26	
16	Sabu Raijua	Sabu/Seba Raijua	1		R-23	
17	Sumba Barat Daya	Waikelo	1		R-23	
18	Manggarai Timur	Mborong	1		R-23	
		Waiwole	1		R-23	
19	Rote Ndao	Ndao	1		R-23	
20	Sambas	Sintete	Sintete		1	R-9
21	Kayong Utara	Telok Melano/Telok Batang	Pontianak		1	R-10
22	Ketapang	Kendawangan	Semarang	1	R-15	
23	Seruyan	Kuala Pembuang		1	R-14	
24	Nunukan	Nunukan	Wani	1	R-30	
25	Donggala	Wani				
		Ogoamas				

26	Toli-Toli	Toli-Toli			
27	Parigi Moutong	Parigi	Poso	1	R-29
28	Tojo Una-Una	Ampana		1	R-29
29	Banggai Kepulauan	Banggai	Tilamuta	1	R-41
30	Buol	Leok	Kwandang	1	R-42
31	Banggai Laut	Bunta	Poso	1	R-29
32	Bombana	Boepinang	Kendari	1	R-37
		Sikeli		1	R-38
33	Konawe Kepulauan	Langara	Kendari	1	R-38
34	Boalemo	Tilamuta	Tilamuta	1	R-41
35	Pohuwatu	Bumbulan	Tilamuta	1	R-41
36	Gorontalo Utara	Kwandang	Kwandang	1	R-42
37	Polewali Mandar	Tanjung Silopo/Polewali	Mamuju	1	R-45
38	Maluku Tenggara Barat	Saumlaki	Ambon	1	R-47
39	Maluku Tengah	Amahai	Ambon	1	R-46
40	Kepulauan Aru	Dobo	Ambon	1	R-48
41	Seram Bagian Barat	Manipa	Ambon	1	R-53
		Buano			
		Taniwel			
42	Seram Bagian Timur	Bula Geser	Ambon	1	R-53
43	Maluku Barat Daya	Dawelor/Dawera	Ambon	1	R-52
		Eray	Tual	1	R-55
		Romang/Hila	Ambon	1	R-50
		Ilwaki		1	R-49
		Moa/Kaiwatu		1	R-47
		Kroing		1	R-50
		Lakor		1	R-52
		Pulau Lirang		1	R-47
		Marsela		1	R-50
Tepa	1				
Wulur	1				
44	Buru Selatan	Leksula	Saumlaki	1	R-60
45	Halmahera Barat	Jailolo	Ternate	1	R-65
46	Kepulauan Sula	Sanana	Sanana	1	R-71
47	Halmahera Selatan	Babang	Babang	2	R-68,69
		Mafa		1	R-68
48	Halmahera Timur	Buli	Ternate	1	R-65
49	Pulau Taliabu	Bobong	Sanana	1	R-71
		Loseng			
50	Teluk Wondama	Wasior	Jayapura	1	R-72
51	Teluk Bintuni	Bintuni	Manokwari	1	R-87
		Babo			

52	Sorong Selatan	Teminabuan	Sorong	1	R-93
53	Sorong	Sorong	Sorong	6	R-91-96
54	Raja Ampat	Saonek	Sorong	1	R-92
55	Tambrau	Mega	Sorong	1	R-94
		Sausapor			
56	Merauke	Merauke	Merauke	7	R-80-86
57	Nabire	Nabire	Jayapura	1	R-72
58	Kepulauan Yapen	Serui	Jayapura	1	R-76
59	Biak Numfor	Biak	Biak	3	R-77-79
60	Mappi	Bade	Merauke	3	R-84-86
61	Asmat	Agats	Merauke	3	R-82,84,85
62	Sarmi	Sarmi	Jayapura	2	R-72,74
63	Waropen	Waren	Jayapura	4	R-72,74,75,76
64	Supiori	Korido	Biak	2	R-78,79
65	Natuna (Kec. Subi)	Serasan	Kijang	1	R-8
		Midai	Kwandang	1	R-42
66	Berau	Berau	Wani	1	R-30
67	Kepulauan Sangihe	Miargas	Bitung	1	R-32
68	Kepulauan Talaud	Siau	Bitung	2	R-31,32
		Tahuna	Bitung	1	R-31
69	Bengkulu Utara	Pulau Baai	Bengkulu	1	R-5
70	Pulau Subi Kecil	Kijang	Kijang	1	R-8
71	Pulau Sebatik (Pel. Sebatik/Sungai Nyamuk)	Kwandang	Kwandang	1	R-42
72	Pulau Maratua	Wani	Wani	1	R-30
73	Pulau Makalehi	Bitung	Bitung	1	R-32
74	Pulau Kawaluso	Bitung	Bitung	2	R-31,32
75	Pulau Kawio	Bitung	Bitung	2	R-31,32
76	Pulau Marore	Bitung	Bitung	2	R-31,32
77	Pulau Miargas	Bitung	Bitung	2	R-31,32
78	Pulau Marampit	Bitung	Bitung	1	R-31
79	Pulau Kakorotan	Bitung	Bitung	1	R-32
80	Pulau Fani (Kabupaten Raja Ampat)	Sorong	Sorong	3	R-92,94,96
81	Pulau Bepondi (Kab. Supiori)	Biak	Biak	2	R-77,79
82	Pulau Liki (Kab. Sarmi)	Jayapura	Jayapura	1	R-73
83	Pulau Larat (Kab. Maluku Tenggara Barat)	Tual	Tual	1	R-54